



Katalog BPS : 5101014.33

ANALISIS SOSIAL EKONOMI PETANI DI JAWA TENGAH

Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian
Sensus Pertanian 2013



st2013
SENSUS PERTANIAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

ANALISIS SOSIAL EKONOMI PETANI DI JAWA TENGAH

**Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian
Sensus Pertanian 2013**

<https://jateng.bps.go.id>

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Analisis Sosial Ekonomi Petani di Jawa Tengah
Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus Pertanian 2013

ISBN : 978-602-0916-25-5

No. Publikasi : 33550.1502

Katalog BPS : 5101014.33

Diproduksi : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pengarah : Drs. Ibram Syahboedin, MA

Penanggung Jawab : Syarifuddin Nawie, S.Si, M.E.

Editor : Totok Tavirijanto, S.Si

Penulis : Dra. Eny Pramudyastuti, Sriningsih, S.ST, M.Si, Dody Saputro, S.ST, M.Si, Renaldhi Priyantomo, S.ST, Santi Widyastuti, S.ST, Kharis Komarudin, S.ST, M.Stat

Retabulasi : Joko Mulyono

Penyusun : Joko Mulyono

Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2014

X + 136 halaman ; 18,2 x 25,7 cm

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta mengacu pada rekomendasi FOOD and Agriculture Organization (FAO), Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Pertanian 2013 (ST2013). Sensus kali ini merupakan Sensus Pertanian keenam sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1963.

Tahap pertama pemanfaatan data ST2013 dalam bentuk kajian/analisis dilakukan BPS Provinsi Jawa Tengah dengan mempublikasikan buku Pertanian Jawa Tengah : Analisis Hasil Pendataan Lengkap Sensus Pertanian 2013. Analisis lanjutan dilakukan BPS Provinsi Jawa Tengah dengan mempublikasi buku Analisis Sosial Ekonomi Petani di Jawa Tengah, yang merupakan analisis Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian, Sensus Pertanian 2013. Tujuan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian (petani) menurut karakteristik rumah tangga/petani, penguasaan lahan pertanian, akses sumber daya produktif, struktur pendapatan/penerimaan, kemiskinan multidimensi, dan ketahanan pangan rumah tangga di tingkat nasional dan provinsi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ST2013 hingga tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Semarang, Januari 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah

ji Drs. Ibram Syāhboedin, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. JAWA TENGAH MASIH DAERAH AGRARIS	3
1.1 Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Jawa Tengah	3
1.2 Petani Jawa Tengah Cukup Sejahtera?	6
1.3 Sejuta Harapan di Balik Seribu Tantangan.....	8
BAB 2. SIAPA DAN BAGAIMANA PETANI JAWA TENGAH	13
2.1 Karakteristik Rumah Tangga Pertanian	14
2.2 Kapasitas SDM di Sektor Pertanian	17
BAB 3. LAHAN PERTANIAN, ISU HANGAT YANG DIANGGAP DINGIN	23
3.1 Petani Jawa Tengah Tuan Tanah atau Gurem?	24
3.2 Penguasaan Lahan Pertanian	26
3.3 Mutasi Lahan Pertanian	28
BAB 4. SUMBER DAYA PRODUKTIF BUKAN TAK TERJANGKAU	35
4.1 Akses Terhadap Permodalan	36
4.2 Akses Terhadap Kelembagaan	39
4.3 Akses Terhadap Sarana Produksi	42
BAB 5. BAGAIMANA AGAR PETANI BISA KAYA	49
5.1 Determinan Pendapatan Rumah Tangga Pertanian	49
5.2 Implikasi Kebijakan	61
BAB 6. RUMAH TANGGA PERTANIAN DAN ANCAMAN KEMISKINAN	65
6.1 Tanaman Pangan Sang Primadona	65
6.2 Tingkat dan Intensitas Kemiskinan Petani	68
6.3 Kemiskinan Multidimensi Rumah Tangga Pertanian	76
BAB 7. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN	79
7.1 Kekhawatiran Akan Kekurangan Pangan	79
7.2 Petani Jawa Tengah Mampu Menjangkau dan Memanfaatkan Pangan	81
7.3 Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Tinggi	84
BAB 8. KESIMPULAN	87
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95
CATATAN TEKNIS	117

DAFTAR TABEL

2.1.	Karakteristik RTUP, Jawa Tengah 2003 dan 2013	14
2.2.	Karakteristik Anggota RTUP, Jawa Tengah 2003 dan 2013.....	16
2.3.	Karakteristik Petani, Jawa Tengah 2003 dan 2013.....	18
3.1.	Struktur Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Luas Penguasaan Lahan, Jawa Tengah 2013	25
3.2.	Persentase RTUP yang Melakukan Mutasi Lahan Menurut Jenis Mutasi dan Luas Lahan yang Dimiliki, Jawa Tengah 2013	29
3.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lahan yang Dijual/Dihibahkan dan Penggunaan Utama Lahan, Jawa Tengah 2013	30
3.4.	Persentase RTUP Menurut Alasan Utama RTUP Menjual Lahan dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013.....	31
4.1.	Persentase Petani yang Memperoleh Bantuan Kredit Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kelompok Pendapatan, Jawa Tengah 2013	36
4.2.	Persentase Petani Menurut Kesulitan Pengajuan Kredit dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	38
4.3.	Persentase Petani Menurut Sumber Bantuan dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	39
4.4.	Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Kelembagaan dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	40
4.5.	Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Sarana Produksi, Penjualan Hasil Pertanian dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	42
4.6.	Persentase Petani Menurut Alasan Kesulitan Memperoleh Sarana Produksi dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	44
4.7.	Persentase Petani Menurut Alasan Kesulitan Menjual Hasil Pertanian dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	45
5.1.	Uji Simultan Regresi Linier Berganda	56
5.2.	Uji Parsial Regresi Linier Berganda	57
6.1.	Persentase RTUP Menurut Kecukupan Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013.....	67
6.2.	Indikator Kemiskinan Multidimensi RTUP, Jawa Tengah 2013	69
6.3.	Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, Jawa Tengah 2013	70
6.4.	Persentase RTUP Menurut Kelompok Pendapatan dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, Jawa Tengah 2013	70
6.5.	Persentase RTUP Menurut Luas Lahan Pertanian yang dikuasai dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, Jawa Tengah 2013.....	71
7.1.	Persentase RTUP Menurut Dimensi Ketersediaan Pangan, Jawa Tengah 2013	80

DAFTAR TABEL

- 7.2. Persentase RTUP Menurut Dimensi Keterjangkauan Pangan, Jawa Tengah 2013 81
- 7.3. Persentase RTUP Menurut Dimensi Pemanfaatan Pangan, Jawa Tengah 2013 83
- 7.4. Persentase RTUP Menurut Kategori Ketahanan Pangan, Jawa Tengah 2013 85

<http://jateng.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2004-2013	4
1.2.	Struktur PDRB dan Tenaga Kerja, Jawa Tengah 2013	5
1.3.	Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor, Jawa Tengah 2013 (Juta Rupiah/org/tahun)	6
1.4.	Rumah Tangga Miskin menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2011-2012.	7
1.5.	Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor, Jawa Tengah 2012-2013	8
3.1.	Persentase RTUP yang Menguasai Lahan 0,5 Ha (Petani Gurem), Jawa Tengah 2013..	26
3.2.	Persentase RTUP Menurut Lahan yang dikuasai dan Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013	27
4.1.	Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Kelembagaan dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013	41
4.2.	Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Sarana Produksi, Penjualan Hasil Pertanian dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013	43
6.1.	Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	66
6.2.	Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	72
6.3.	Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013.....	72
6.4.	Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013	73
6.5.	Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Luas Lahan yang dikuasai RTUP, Jawa Tengah 2013	74
6.6.	Rata-rata Kekurangan RTUP Miskin Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	74
6.7.	Rata-rata Kekurangan RTUP Miskin Multidimensi Menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	75
6.8.	Rata-rata Kekurangan RTUP Miskin Multidimensi Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013	75
6.9.	Peta Kemiskinan Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013.....	76
7.1.	Peta Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	84
7.2.	Persentase RTUP menurut Luas Lahan yang dikuasai dan Kategori Ketahanan Pangan, Jawa Tengah 2013	86
7.3.	Persentase RTUP Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Kategori Ketahanan Pangan, Jawa Tengah 2013.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Provinsi, Jawa Tengah 2003 dan 2013	97
2.	Persentase RTUP Pengguna Lahan yang Menguasai Lahan Pertanian Kurang dari 0,5 Ha Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	98
3.	Persentase Kepala Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2013	99
4.	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	100
5.	Rasio Ketergantungan RTUP Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	101
6.	Persentase ART Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan, Jawa Tengah 2013	102
7.	Persentase ART Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Utama, Jawa Tengah 2013	103
8.	Jumlah Petani Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2013	104
9.	Jumlah RTUP Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Pendapatan ART, Jawa Tengah 2013	105
10.	Rata-Rata Pendapatan RTUP Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013	106
11.	Persentase RTUP Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Pendapatan Utama, dan Status Pekerjaan, Jawa Tengah 2013	107
12.	Persentase RTUP Menurut Kabupaten/Kota dan Share Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013	108
13.	Rata-Rata Pendapatan per Kapita RTUP Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	109
14.	Persentase Penduduk Miskin (<i>Headcount</i>), Intensitas Kemiskinan dan Indeks Kemiskinan Multidimensi Pada RTUP menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	110
15.	Indeks Ketahanan Pangan Menurut Dimensi dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	111
16.	Dimensi Ketersediaan Pangan Menurut Skor Indikator, Aspek Kecukupan Pangan dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	112
17.	Dimensi Keterjangkauan Pangan Menurut Skor Indikator Keterjangkauan Fisik, Sosial, Ekonomi dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	113
18.	Dimensi Pemanfaatan Pangan Menurut Aspek dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	114
19.	Aspek Kecukupan Asupan Menurut Skor Indikator dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	115
20.	Aspek Kualitas Air Menurut Skor Indikator dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013	116



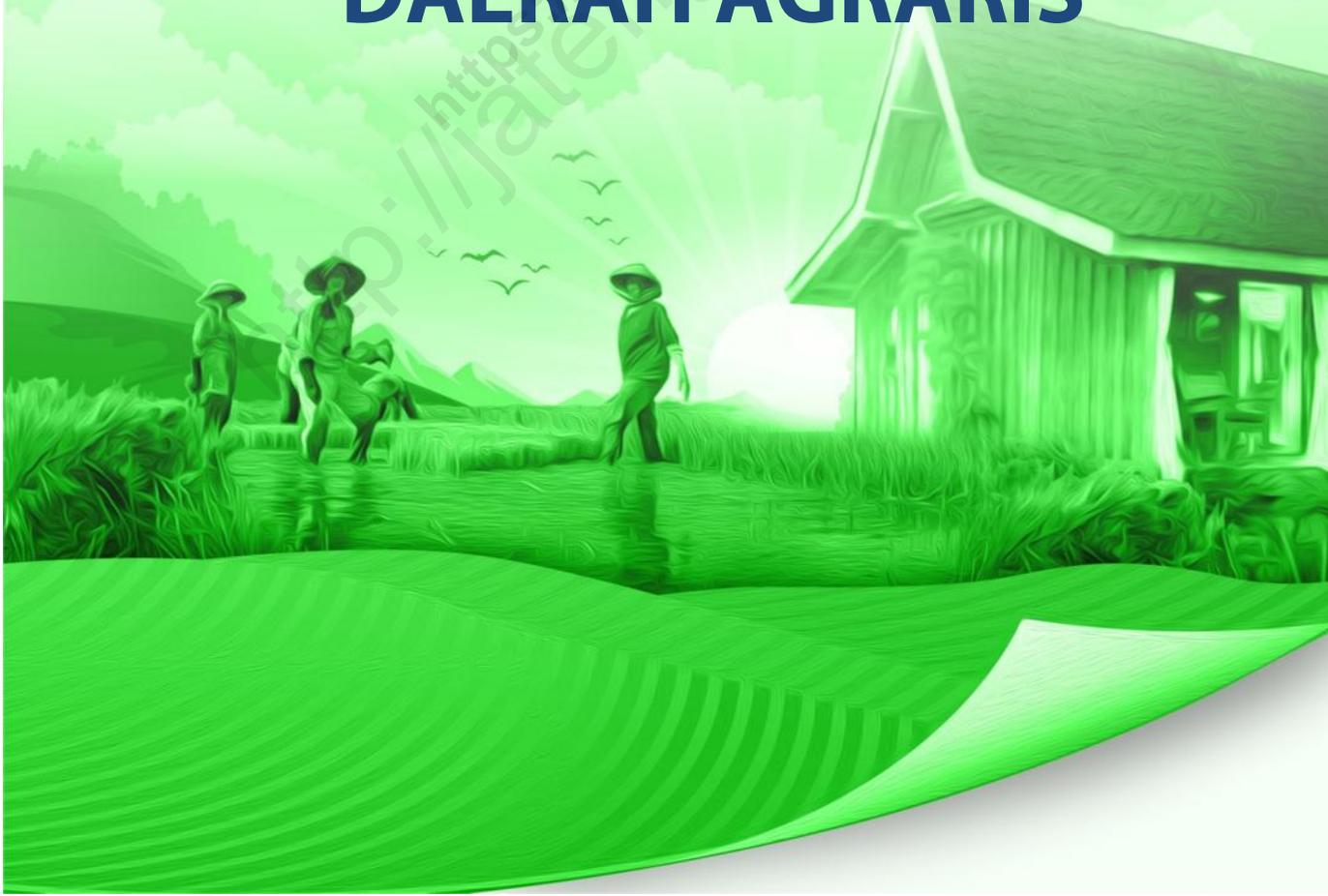
BTh86201TS

<https://jateng.bps.go.id>



1

**JAWA TENGAH MASIH
DAERAH AGRARIS**



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 1. JAWA TENGAH MASIH DAERAH AGRARIS



1.1. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Jawa Tengah

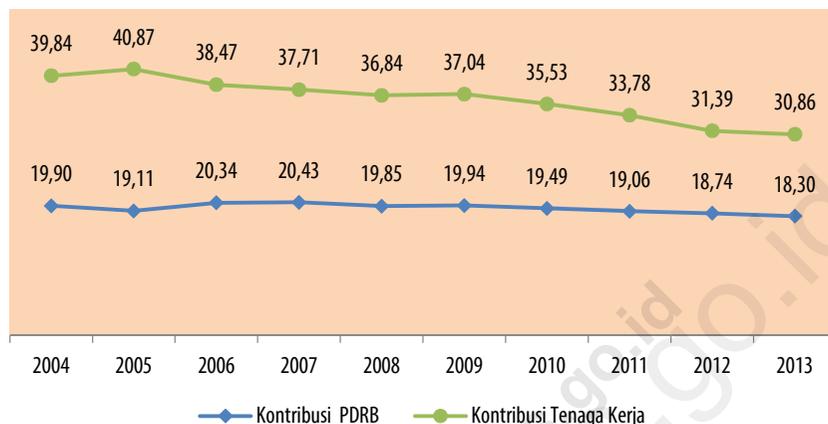
Sektor pertanian masih merupakan sandaran sebagian besar penduduk Jawa Tengah sebagai sumber penghasilan. Meskipun semakin lama semakin ditinggalkan dan beralih ke sektor lainnya

Indonesia merupakan Negara agraris. Sebutan tersebut masih melekat sampai sekarang. Posisi Indonesia tepat di bawah garis katulistiwa menyebabkan wilayahnya mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Ditambah banyaknya gunung vulkanik yang bertebaran di hampir semua wilayah, menjadikan tanah subur dan kaya akan zat hara yang diperlukan tumbuhan.

Sebagai negara agraris sebagian besar masyarakatnya memiliki sumber penghasilan dari pertanian. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional. Jawa Tengah bahkan sering dikenal dengan sebutan lumbung padi nasional.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian dapat dilihat dari seberapa besar Nilai Tambah Bruto (NTB) yang bersumber dari sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB selama 10 tahun terakhir cenderung menurun, meskipun penurunannya landai. Selama tahun 2004-2013 penurunan kontribusi pertanian kurang dari dua persen.

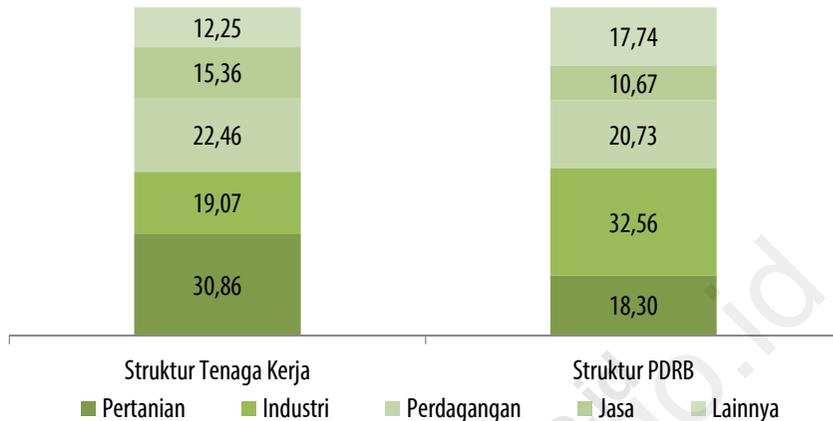
Gambar 1.1. Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2004-2013



Melihat kecilnya penurunan dalam kurun waktu yang relatif panjang (satu dekade) masih ada peluang sektor ini meningkatkan kontribusinya. Kebangkitan sektor pertanian harus mendapat dukungan berbagai pihak, tidak hanya pelaku pertanian dan pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Menurunnya peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi antara lain disebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian untuk berbagai aktivitas penduduk maupun pengembangan usaha. Jika semua pihak mendukung agar tidak terjadi konversi lahan pertanian, niscaya sektor pertanian akan mampu bangkit lagi.

Sektor pertanian yang berkembang akan menimbulkan efek domino bagi sektor lainnya. Sektor ini akan mendorong tumbuhnya sektor non pertanian terutama sektor industri karena sebagai penyedia bahan baku. Selain itu, manfaat lain yang sering terlupakan semakin banyaknya tanaman menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan udara segar.

Sektor pertanian masih merupakan sandaran sebagian besar penduduk Jawa Tengah sebagai sumber penghasilan, meskipun semakin lama semakin ditinggalkan dan beralih ke sektor lainnya. Pada tahun 2004, hampir 40 persen penduduk mengandalkan pertanian sebagai penopang hidup keluarganya. Sepuluh tahun kemudian kontribusinya berkurang menjadi sekitar 30 persen (Gambar 1.1). Ditinggalkannya sektor pertanian oleh sebagian penduduk disebabkan karena penghasilan dari sektor ini dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Mereka tergoda untuk bekerja di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan atau terpaksa karena sudah tidak memiliki lahan yang cukup untuk pertanian.

Gambar 1.2. Struktur PDRB dan Tenaga Kerja, Jawa Tengah 2013

Sumber: BPS, *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Agustus 2013 dan Tinjauan PDRB Jawa Tengah 2013*

Mendorong penduduk untuk bekerja di sektor pertanian bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, kita membutuhkan sektor pertanian untuk bangkit lagi, di sisi lain penghasilan sektor ini kurang bisa memenuhi harapan petani. Yang paling ideal, untuk membangkitkan sektor pertanian tidak mengesampingkan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan pelaku pertanian itu sendiri.

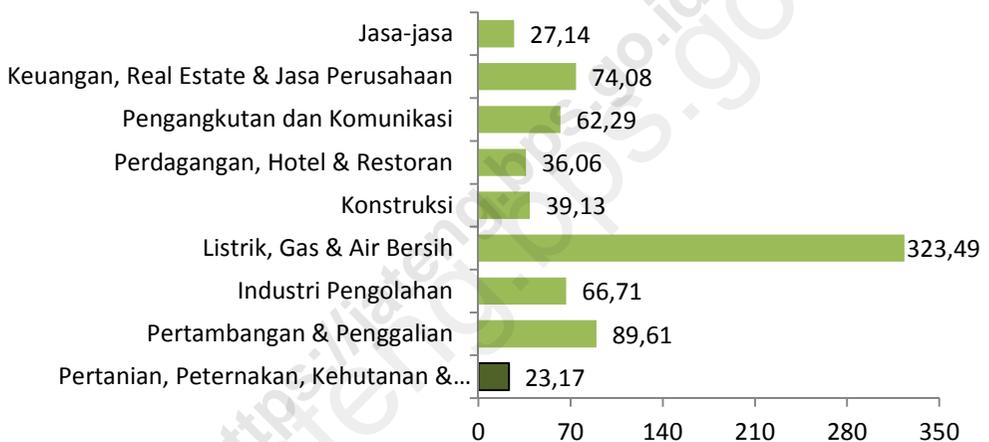
Kontribusi NTB menurut sektor di suatu daerah erat kaitannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin besar kontribusi sektor terhadap total PDRB secara umum semakin besar pendapatan yang diterima oleh pelaku di dalamnya. Dengan begitu, peluang terbukanya kesempatan kerja di sektor tersebut akan semakin besar. Karena besarnya pendapatan merupakan daya tarik utama seseorang untuk bekerja pada sektor tersebut.

Struktur tenaga kerja di Jawa Tengah menurut sektor masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 30,86 persen atau hampir sepertiga dari total tenaga kerja. Namun, di sisi lain besarnya tenaga kerja yang terlibat pada sektor ini belum mampu memberikan kontribusi yang sepadan dibandingkan sektor lain. Hal inilah akan berpotensi terjadinya migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor di luar pertanian.

Sebaran kontribusi NTB dan tenaga kerja pada sembilan sektor yang tidak seimbang akan menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas. Sektor pertanian memiliki tingkat produktivitas yang paling kecil yaitu 23,17 juta rupiah per orang per tahun (*Gambar 1.3*). Di sisi lain sektor yang penyerapan tenaga kerja relatif kecil cenderung mempunyai produktivitas yang cukup besar. Sektor listrik, gas dan air bersih (LGA) mempunyai tingkat produktivitas paling tinggi, yaitu lebih dari 323 juta rupiah per orang per tahun. Namun demikian, besarnya tingkat produktivitas pada sektor LGA kurang mampu mendorong seseorang untuk bekerja di sektor ini karena akses dan peluang sektor ini sangat terbatas.

Sektor pertanian, secara umum mempunyai sifat musiman yang lebih kental dibandingkan sektor lainnya, sehingga penggunaan jam kerja relatif lebih pendek. Di samping itu, sektor ini sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan hasil tanaman. Kondisi iklim yang optimum dapat menunjang tanaman untuk berproduksi dengan baik, sebaliknya kondisi iklim yang ekstrim dapat menurunkan produksi tanaman. Ketergantungan sektor ini pada alam membuat produktivitas tidak bisa ditentukan oleh manusia. Namun bukan hal yang tidak mungkin apabila pengelolaan pertanian yang baik akan meningkatkan hasil pertanian sehingga menghasilkan tingkat produktivitas yang lebih besar.

Gambar 1.3. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor, Jawa Tengah 2013 (Juta Rupiah/org/tahun)

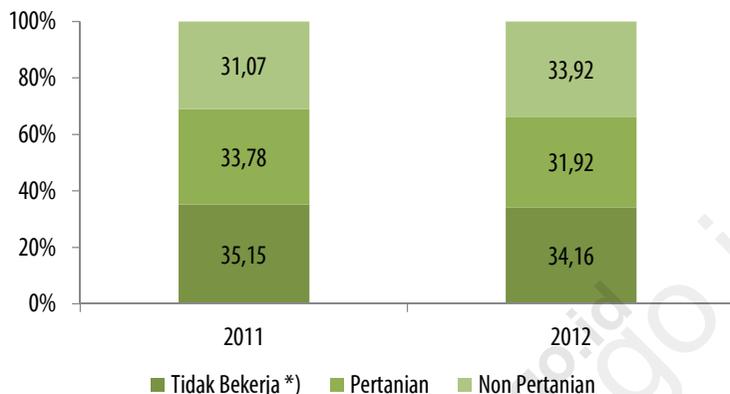


1.2. Petani Jawa Tengah Cukup Sejahtera ?

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara menurut Drenowski (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dilihat dari tiga aspek yaitu : pertama dengan melihat pada tingkat *perkembangan fisik*, seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup; kedua dengan melihat pada tingkat *mentalnya*, seperti pendidikan, pekerjaan; dan ketiga dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial.

Kemiskinan dan ketidaksejahteraan sangat terkait erat meskipun tidak persis sama. Ukuran kesejahteraan lebih kompleks dibandingkan kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Bisa berobat ke dokter bila sakit, dapat menjalankan ibadah dengan baik, merasa aman, dan mudah mengakses makanan yang cukup dan bergizi, adalah orang sejahtera. Karena itu, ketidaksejahteraan dapat disebabkan oleh alasan ekonomi atau non-ekonomi.

Gambar 1.4. Rumah Tangga Miskin Menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2011-2012



*) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Sumber : BPS, Susenas - Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2008-2012

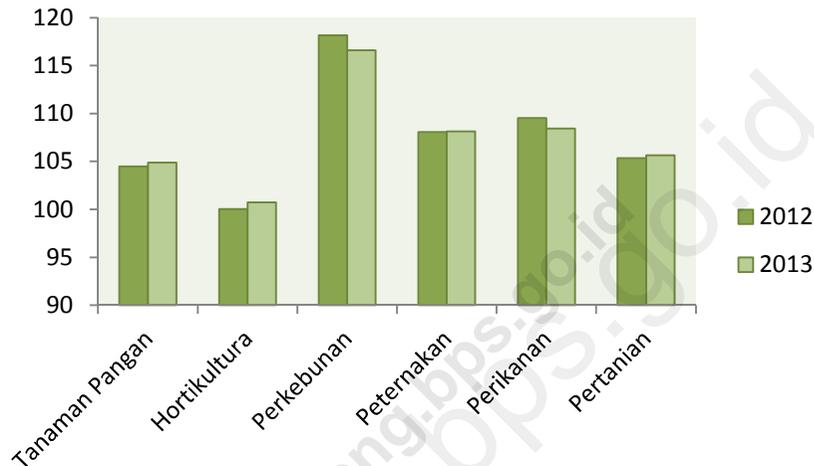
Selain itu, kemiskinan erat kaitannya dengan kehidupan pertanian. Penduduk miskin sebagian besar berada di perdesaan dengan sumber penghasilan dari sektor pertanian. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012 sebesar 31,92 persen penduduk miskin mempunyai sumber penghasilan utama dari sektor pertanian. Persentase ini sedikit menurun dibandingkan setahun sebelumnya yang jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk miskin.

Pengangguran dan kemiskinan bagaikan dua sisi mata uang yang senantiasa melekat satu sama lain. Dampak dari pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai akan menciptakan pengangguran. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mempunyai beban tanggungan yang besar akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang berpotensi menciptakan kemiskinan. Sekitar 35 persen penduduk miskin di Jawa Tengah merupakan pengangguran dan bukan angkatan kerja.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian, pemerintah pusat maupun daerah selalu memprogramkan pembangunan pertanian yang pada hakekatnya untuk menyejahterakan masyarakat petani. Namun demikian, apakah upaya pemerintah sudah membuat petani hidup sejahtera? Untuk melihat dinamika kesejahteraan petani, salah satu alat ukur yang dapat dipakai adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menggambarkan seberapa besar perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terkait dengan produk pertaniannya dengan indeks harga yang harus dibayar petani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usaha

pertaniannya. Selama tahun 2012-2013, nilai NTP mengalami sedikit kenaikan namun masih berkisar 105. Artinya, kenaikan harga-harga barang hasil pertanian masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi petani dan kebutuhan usaha pertaniannya.

Gambar 1.5. Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor, Jawa Tengah 2012-2013



Jika diamati lebih jauh komponen penyusun NTP menurut subsektor, cukup bervariasi. NTP perkebunan memiliki angka yang paling tinggi, lebih dari 115. Hal ini, mengindikasikan petani perkebunan secara umum mempunyai tingkat kesejahteraan yang paling tinggi dibanding petani lainnya. Sebaliknya, petani hortikultura secara umum mempunyai tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Namun demikian perlu diteliti lebih jauh komoditas-komoditas yang mempunyai perkembangan harga tinggi apakah dari komoditas yang diusahakan oleh sebagian besar petani atau hanya petani komoditas tertentu saja.

1.3. Sejuta Harapan Dibalik Seribu Tantangan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan antara lain dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, kesadaran masyarakat dan akses ke fasilitas pendidikan. Kondisi Jawa Tengah di hampir semua daerah akses ke fasilitas pendidikan tidak sesulit di luar pulau Jawa. Terbukti banyak sekolah dasar yang sudah ditutup ataupun digabung disebabkan kekurangan murid.

Rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah masih relatif rendah yaitu 7,43 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah rata-rata mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar atau belum mencapai SLTP. Tingkat pendidikan di perdesaan yang tidak memiliki fasilitas selengkap dan sebaik di kota tentunya mempunyai rata-rata lama sekolah yang lebih kecil. Tingkat pendidikan petani yang masih rendah merupakan tantangan yang harus segera dibenahi.

Semakin bertambahnya penduduk akan berdampak pada pemenuhan tempat tinggal dan segala fasilitas yang diperlukan. Sehingga tak dapat dihindari terjadinya konversi lahan pertanian menjadi bangunan tempat tinggal akan terus terjadi. Menurut Menteri Pertanian (Suswono), konversi lahan mencapai 100 ribu hektar setiap tahun. Lebih memprihatinkan lagi lahan pertanian produktif (IP 1200 dan IP 300) yang paling banyak dikonversi menjadi permukiman dan bangunan industri. Konversi lahan ini bisa terjadi karena komitmen Pemerintah Daerah setempat untuk melindungi lahan pertanian masih sangat lemah (Dr Setia Hadi, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, LPPM, IPB).

Masih adanya impor produk pertanian yang masuk ke Indonesia terutama Jawa Tengah menjadi tantangan lainnya pembangunan pertanian. Satu sisi kebutuhan hasil pertanian yang mesti dipenuhi di sisi lain dengan banyaknya produk pertanian impor akan mengurangi peluang dan menurunkan harga hasil pertanian lokal.

Masalah iklim dan cuaca yang tidak dapat diperkirakan dan tidak berpihak pada pertanian juga merupakan hambatan tersendiri. Namun demikian kondisi tersebut bisa diantisipasi, dengan mengelola jenis tanaman yang sesuai untuk kondisi tanah dan iklim untuk meminimalisir kerugian dari pertanian.

Melalui *Indepth Study* yang dilakukan terhadap petani tanaman pangan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, diperoleh informasi bahwa upaya pemerintah dalam pembangunan pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan pertanian. Kendala yang mereka hadapi antara lain bantuan benih melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), belum memberikan hasil produksi yang maksimal. Bantuan obat-obatan yang diberikan terkadang kurang mempan terhadap hama tanaman pangan seperti walang sangit dan wereng. Menghilangnya pupuk saat dibutuhkan petani juga turut mempersulit pengelolaan tanaman padi.

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi pengelolaan tanaman pangan terutama padi. Kekurangan air pada musim kemarau juga menjadi salah satu keluhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau diatasi dengan menyedot air tanah menggunakan pompa air. Cara ini dapat membantu memperoleh air, namun biaya operasionalnya cukup tinggi. Masih ditambah perbaikan saluran irigasi yang kurang memperhitungkan masa tanam padi sehingga petani sulit memperoleh air.

Meskipun berbagai tantangan yang mendera pertanian di Jawa Tengah namun masih ada harapan dan solusi. Semua pihak harus bersatu dan berkomitmen untuk mengupayakan agar pertanian dapat menjadi kebanggaan petani dan masyarakat Jawa Tengah. Salah satu cara untuk menahan lajunya konversi lahan (Suswono, 2014) adalah seluruh kepala daerah menerbitkan peraturan daerah yang melindungi lahan pertanian teknis agar luasnya tidak terus berkurang Solusi lain, pemerintah daerah harus berkomitmen dalam mendukung inovasi dan penerapan teknologi tinggi pertanian. Memperkenalkan inovasi teknologi pertanian agar masyarakat tani tetap antusias berkegiatan usaha tani. Mereka bisa menghemat energi dan biaya produksi, sekaligus sebagai upaya mengatasi keengganan generasi muda bekerja di sawah

Payung hukum untuk mencegah konversi lahan pertanian adalah UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Melalui UU ini, kawasan dan lahan pertanian pangan ditetapkan (jangka panjang, menengah dan tahunan) lewat perencanaan dari kabupaten/ kota, provinsi dan nasional. Semangat dasar UU ini adalah bahwa keberadaan kawasan dan lahan dilindungi, hanya bisa dikonversi untuk kepentingan umum. Itu pun dengan syarat yang berat (Pasal 44-46): didahului kajian kelayakan dan rencana alih fungsi, pembebasan kepemilikan, dan ada lahan pengganti 1-3 kali yang dikonversi plus.

Harapan masih ada, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan impor terhadap beberapa produk hortikultura melalui Permentan Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Permendag Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Produk hortikultura yang dilarang impor terdiri dari 13 jenis, yaitu kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian, bunga krisan, bunga anggrek, dan bunga heliconia. Dengan adanya peraturan tentang larangan impor tersebut dapat membantu petani memproduksi hortikultura lokal sehingga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan begitu keuntungan yang akan didapatkan akan meningkat.

Berbagai program bantuan yang telah digulirkan pemerintah baik berupa bantuan modal, alat pertanian, benih, pupuk dan lainnya harus terus dievaluasi dan diinventarisir dampaknya bagi kehidupan petani. Harapan besar disandarkan petani kepada pengambil kebijakan agar program-program yang digulirkan betul-betul berpihak pada mereka. Mampu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan petani.

2

SIAPA DAN BAGAIMANA PETANI JAWA TENGAH



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 2. SIAPA DAN BAGAIMANA PETANI JAWA TENGAH



Rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga usaha pertanian sangat rendah, hanya sekitar 1,83 juta rupiah. Kontribusi pendapatan dari usaha pertanian kurang dari 900 ribu rupiah.

Secara geografis lebih dari sepertiga luas wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan lahan sawah. Begitu juga jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan, lebih dari 30 persen tenaga kerja berkecimpung di bidang pertanian. Oleh karena itu wajar saja jika Jawa Tengah mampu menjadi produsen padi terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Walaupun jumlah pemakaian lahan dan penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, akan tetapi peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi Jawa Tengah masih di bawah sektor pengolahan dan perdagangan. Tidak sejalannya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan perannya dalam struktur ekonomi bisa disebabkan oleh banyak hal. Beberapa di antaranya berkaitan dengan masalah cuaca, teknologi, transportasi, serta yang paling utama adalah karakteristik petani itu sendiri dan lingkungannya.

Kehidupan petani terkesan jauh dari kata sejahtera. Sebagian besar merupakan petani penggarap yang memiliki upah rendah. Jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dapat menurunkan motivasi petani dan generasi muda untuk produktif di sektor pertanian. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada ketahanan pangan di masa mendatang.

2.1. Karakteristik Rumah Tangga Pertanian

Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian di Jawa Tengah selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan. Dari tahun 2003 hingga 2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) mengalami penurunan sebanyak 25,65 persen. Terdapat 1.480.182 rumah tangga yang tidak lagi menggeluti sektor ini selama sepuluh tahun terakhir. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa petani di Jawa Tengah tidak lagi mampu bertahan untuk tetap berkecimpung di sektor pertanian.

Seiring dengan menurunnya jumlah RTUP di Jawa Tengah, persentase RTUP terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 67,88 persen pada tahun 2003 menjadi hanya 47,99 persen pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan karena terjadi penambahan jumlah rumah yang bekerja di luar sektor pertanian sementara rumah tangga pertanian justru semakin berkurang.

Tabel 2.1. Karakteristik RTUP, Jawa Tengah 2003 dan 2013

No.	Karakteristik	Satuan	2003	2013
1	Jumlah RTUP	RT	5.770.801	4.290.619
2	Persentase RTUP terhadap jumlah RT di Jawa Tengah	%	67,88	47,99
3	Kepala RTUP			
	Laki-laki	%	91,10	89,33
	Perempuan	%	8,90	10,67
4.	Rata-rata jumlah anggota RT	orang	3,94	3,62
5.	Rasio ketergantungan	%	-	48,41
6	Rata-rata penguasaan lahan pertanian per RT	Ha	0,38	0,34
7	Persentase RTUP pengguna lahan yang menguasai lahan pertanian < 0,5 Ha	%	69,62	78,45
8	RTUP menurut sumber pendapatan utama		100,00	100,00
	Pertanian	%	49,06	57,50
	Bukan pertanian	%	50,94	42,48
9	Persentase RTUP menurut share pendapatan dari sektor pertanian	%	-	100,00
	Kurang dari 25%		-	45,44
	25% s/d 50%		-	23,74
	Di atas 50 %		-	30,82
10	Rata-rata pendapatan RTUP menurut sumber pendapatan utama			
	Pertanian	(000 Rp)/tahun	-	10.673,65
	Bukan pertanian	(000 Rp)/tahun	-	11.335,00
11	Rata-rata pendapatan per kapita RTUP	(000 Rp)/tahun	-	6.086,95

Keterangan : '-' data tidak tersedia

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat Jawa Tengah. Hal ini terjadi pula pada RTUP, terlihat dari tingginya persentase rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yaitu 10,67 persen. Bila dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya tercatat 8,90 persen, bisa dikatakan adanya peningkatan kesetaraan gender dan penurunan dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga perempuan terjadi umumnya pada rumah tangga yang tidak lengkap dimana perempuan tidak memiliki pasangan hidup, baik cerai hidup maupun cerai mati. Jika memiliki pasangan, biasanya pada kondisi terpaksa karena kepala rumah tangga tidak mampu bekerja sehingga posisi kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga digantikan oleh perempuan.

Banyaknya anggota rumah tangga akan berpengaruh pada biaya hidup yang harus ditanggung oleh rumah tangga. Secara umum, biaya hidup akan lebih kecil pada rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang sedikit bila dibandingkan dengan rumah tangga yang beranggotakan lebih banyak. Rata-rata anggota rumah tangga RTUP tahun 2013 tercatat 3,62 orang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2003 3,94 orang. Bisa diartikan bahwa rata-rata beban hidup rumah tangga semakin ringan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu tanpa melihat besar kecilnya pendapatan rumah tangga.

Struktur umur anggota rumah tangga akan mempengaruhi beban tanggungan usia produktif. Semakin banyak anggota rumah tangga berusia muda (sebelum usia produktif) dan tua (setelah usia produktif) maka semakin besar beban tanggungan usia produktif. Hal ini bisa dilihat dari rasio ketergantungan yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif. Berdasarkan hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus Pertanian 2013 (ST2013-SPP), rasio ketergantungan RTUP 48,41 persen, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 48 orang usia tidak produktif.

Menurunnya rata-rata lahan pertanian yang dikuasai seiring dengan meningkatnya persentase RTUP pengguna lahan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 ha atau yang disebut petani gurem. Persentase petani gurem bertambah dari 49,06 persen dari tahun 2003 menjadi 57,52 persen pada tahun 2013. Kecilnya lahan yang dimiliki petani berdampak pada keterbatasan petani dalam mengelola usaha pertaniannya. Lahan yang kecil akan menghasilkan produksi yang kecil pula. Padahal hasil produksi dari lahan dibawah 0,5 ha biasanya hanya bisa dipakai untuk dikonsumsi sendiri dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu karena produksi yang terbatas, petani hanya menjual hasil produksi pada tengkulak, atau pada pedagang pengumpul, sehingga tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi. Akhirnya, petani mengalami keterbatasan modal dalam menjalankan usaha pada masa tanam selanjutnya. Hal tersebut terus berulang dari waktu ke waktu yang mengakibatkan petani tidak berkembang.

Rata-rata pendapatan RTUP selama satu tahun pada 2013 adalah 22,01 juta yang berasal dari sektor pertanian dan bukan pertanian. Pendapatan yang bersumber dari bukan pertanian sedikit lebih banyak yaitu 11,33 juta atau sebanyak 51,50 persen. Sisanya merupakan pendapatan yang bersumber dari pertanian yaitu sebesar 10,67 juta atau sebesar 48,5 persen. Kenyataan ini

memberikan gambaran bahwa ternyata tidak sedikit anggota rumah tangga usaha pertanian bekerja di luar sektor pertanian untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya.

Rata-rata pendapatan perkapita RTUP pada tahun 2013 adalah 6.086,95 juta, sehingga rata-rata setiap anggota rumah tangga RTUP mendapatkan penghasilan sebesar 507.245,83 rupiah per bulan. Nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yaitu 574.923 rupiah (Sumber : Susenas 2013). Artinya secara rata-rata pendapatan perkapita RTUP masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rata-rata setiap bulannya.

Tabel 2.2. Karakteristik Anggota RTUP, Jawa Tengah 2003 dan 2013

No.	Karakteristik	Satuan	2013
1	Struktur pendidikan ART	%	100,00
	➤ Tidak sekolah/SD		73,48
	➤ SMP/SMA		24,58
	➤ Di atas SMA		1,94
2	Angka Partisipasi Sekolah	%	
	➤ 7-12 tahun		95,67
	➤ 13-15 tahun		90,45
	➤ 16-18 tahun		58,21
3	Persentase ART menurut kegiatan utama	%	98,26
	➤ Berusaha di sektor pertanian		34,22
	➤ Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar		30,53
	➤ Buruh/pegawai/karyawan/pekerja bebas di sektor pertanian		14,95
	➤ Buruh/pegawai/karyawan/pekerja bebas di luar sektor pertanian		18,56
4	Persentase pekerja anak (usia 10-17th) terhadap jumlah anak	%	12,07
5	Pendidikan pekerja anak	%	100,00
	➤ Tidak pernah sekolah		0,77
	➤ Masih sekolah		57,15
	➤ Tidak sekolah lagi		42,18

Karakteristik anggota RTUP dilihat dari struktur pendidikan dan angka partisipasi sekolah pada tahun 2013, menunjukkan 73,48 persen tidak sekolah atau baru tamat SD, 24,58 persen tamat SMP/SMA dan sisanya 1,94 persen tamat pendidikan setingkat di atas SMA. Tingginya persentase ART yang tidak bersekolah atau tamatan SD menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya anggota rumah tangga pertanian.

Angka partisipasi sekolah menunjukkan besarnya kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan di setiap jenjang umur pendidikan. Pada tahun 2013, anak usia 7-12 tahun yang memiliki kesempatan untuk bersekolah sebanyak 95,67 persen, anak usia 13-15 tahun memiliki kesempatan mengenyam bangku sekolah sebanyak 90,45 persen sementara usia 16-18 tahun hanya 58,21 persen. Semakin tinggi tingkatan usia, kesempatan untuk bersekolah semakin rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain semakin tinggi jenjang pendidikan biaya sekolah semakin besar, fasilitas pendidikan semakin sedikit dan tuntutan ekonomi sehingga sebagian harus bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan jenis kegiatan utama tidak semua anggota RTUP mempunyai kegiatan utama di sektor pertanian. Hanya 49,17 persen anggota RTUP bekerja di sektor pertanian. Dari persentase tersebut 34,22 persen berstatus berusaha di sektor pertanian, sementara 14,95 persen lainnya berstatus sebagai buruh/pegawai/karyawan/pekerja bebas di sektor pertanian. Anggota RTUP bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan/pekerja bebas di luar sektor pertanian sebanyak 18,56 persen dan 30,53 persen sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Besarnya pekerja keluarga mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang sifatnya hanya membantu dan tidak memperoleh pendapatan secara mandiri.

Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar biasanya adalah istri dari petani utama atau anak dan keluarga dari petani utama. Anak disini terdiri dari anak yang belum mendapatkan pekerjaan lain serta anak yang masih berusia 10-17 tahun baik yang tidak pernah sekolah, masih sekolah maupun sudah putus sekolah, mereka biasa disebut pekerja anak. Pada tahun 2013, persentase pekerja anak terhadap jumlah anak anggota RTUP sebanyak 12,07 persen. Dari persentase tersebut, 0,77 persen tidak pernah sekolah, 57,15 persen masih sekolah dan 42,18 persen sudah tidak sekolah lagi. Sungguh disayangkan sebagian besar anak-anak tersebut masih berstatus sekolah, dimana mestinya mereka memfokuskan diri pada kegiatan sekolah sesuai dengan usianya namun harus membantu orang tua bekerja.

2.2. Kapasitas SDM di Sektor Pertanian

Karakteristik sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini petani sebagai pengelola usaha pertanian berhubungan langsung dengan produktivitas hasil pertanian. Petani laki-laki dengan umur yang produktif lebih optimal dalam mengerjakan pekerjaan di sektor pertanian karena tahapan-tahapan dalam mengelola usaha pertanian membutuhkan kemampuan fisik yang kuat seperti mecangkul, menyangi rumput, pemupukan, pengairan dan pemanenan. Selain itu, faktor pendidikan juga akan mempengaruhi hasil dan kualitas karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka petani akan semakin terbuka dan memiliki akses yang luas akan informasi yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas usaha tani.

Tabel 2.3. Karakteristik Petani, Jawa Tengah 2003 dan 2013

No.	Karakteristik	Satuan	2003	2013
1	Jumlah petani*)			
	Laki-laki	Org	4.087.521	3.863.871
	Perempuan	Org	1.249.813	1.088.088
2	Rata-rata petani per RT	Org/RT	1,25	1,15
3	Rata-rata umur petani*)			
	Laki-laki	Tahun	-	50,93
	Perempuan	Tahun	-	50,49
4	Sex ratio petani	*	327	355
5	Pendidikan petani*)		100,00	100,00
	Tidak sekolah/SD	%	82,06	78,42
	SMP/SMA	%	16,11	19,68
	Di atas SMA	%	1,83	1,90

Keterangan : *) Anggota rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian
'-' Data tidak tersedia

Perkembangan jumlah petani selama sepuluh tahun terakhir sejalan dengan perkembangan jumlah RTUP. Selama sepuluh tahun terjadi penurunan jumlah petani sebesar 7,22 persen. Pada tahun 2003 jumlah petani di Jawa Tengah sebanyak 5,34 juta orang terdiri dari 4,09 juta orang laki-laki dan 1,25 juta orang perempuan. Pada tahun 2013 jumlah petani turun menjadi 4,95 juta orang terdiri dari 3,87 juta orang laki-laki dan 1,09 juta orang perempuan.

Menurunnya jumlah petani berdampak pada menurunnya rata-rata petani per rumah tangga. Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata petani per rumah tangga turun dari 1,25 pada tahun 2003 menjadi 1,15 pada tahun 2013. Anggota rumah tangga yang terlibat pada sektor pertanian semakin berkurang. Umumnya anak dari petani sebagian besar tidak tertarik lagi untuk bekerja seperti orang tuanya.

Sex ratio menunjukkan peningkatan. Sex ratio pada tahun 2003 sebesar 327. Artinya setiap 100 petani perempuan terdapat 327 petani laki-laki atau satu petani perempuan berbanding tiga petani laki-laki. Kemudian, pada tahun 2013 Sex ratio petani di Jawa Tengah sebesar 355. Setiap satu petani perempuan berbanding hampir empat petani laki-laki. Hal ini berarti berkurangnya jumlah petani perempuan jauh lebih besar dari berkurangnya jumlah petani laki-laki. Meningkatnya sex

ratio petani merupakan hal positif, karena dengan semakin banyak keterlibatan laki-laki dalam usaha pertanian diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas hasil usaha pertanian.

Peranan kaum muda di sektor pertanian relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata umur petani di Jawa Tengah berkisar 50 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kita berkunjung ke daerah perdesaan, sangat banyak dijumpai petani yang mengusahakan tanamannya adalah petani-petani tua. Banyak yang beranggapan bahwa bertani adalah suatu pekerjaan kuno dan terpinggirkan. Bertani itu identik dengan pekerjaan miskin di desa, sehingga kalau ingin hidup kaya lebih memilih berdagang atau berusaha dan bekerja di sektor lainnya. Sebagian mereka yang sukses di sektor pertanian mempunyai lahan pertanian yang relatif luas. Anggapan dan realita tersebut yang menyebabkan penduduk muda enggan terjun dan berusaha di sektor pertanian, meskipun rumah tangganya mempunyai lahan pertanian.

Berdasarkan tingkat pendidikan, perkembangan persentase petani dengan pendidikan di atas SMP cukup menggembirakan. Pada tahun 2003 persentase petani yang tamat SMP/SMA sebesar 16,11 persen yang kemudian naik menjadi 19,68 persen pada tahun 2013. Begitu juga dengan petani yang tamat SMA keatas, selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan dari 1,83 persen pada tahun 2003 menjadi 1,90 pada tahun 2013. Sementara itu, persentase petani yang tidak pernah sekolah atau hanya tamat SD turun dari 82,06 persen pada tahun 2003 menjadi 78,43 pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani di Jawa Tengah sudah mulai terbuka akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan memajukan usaha mereka khususnya di sektor pertanian. Masih tingginya persentase petani yang tidak sekolah atau baru tamat SD berkaitan dengan umur petani. Kebanyakan petani memang sudah tua atau berumur 60 tahun keatas yang mana dahulu mereka memiliki akses yang sangat terbatas pada pendidikan dan sekarang sudah tidak mampu lagi jika harus melanjutkan pendidikannya.

<http://jateng.bps.go.id>

3

LAHAN PERTANIAN, ISU HANGAT YANG DIANGGAP DINGIN



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 3. LAHAN PERTANIAN, ISU HANGAT YANG DIANGGAP DINGIN



Lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian tidak terlalu luas sehingga jumlah petani gurem masih cukup besar di Jawa Tengah

Lahan dan petani merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Mengupas perihal lahan tidak terlepas dari pembahasan penggunaan dan penguasaan lahan. Penggunaan lahan terbagi dalam penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan bergantung pada beberapa faktor antara lain faktor fisik/kondisi, faktor ekonomi, dan faktor intitusi. Faktor fisik atau kondisi bersinggungan dengan keadaan tanah, kelembaban, kandungan unsur hara, iklim, dan kecukupan air. Faktor ekonomi lebih cenderung pada keuntungan pasar, dan keadaan perekonomian dan transportasi. Sedangkan untuk faktor institusi memiliki kecenderungan pada keadaan politik, sosial dan administrasi. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan lahan oleh masyarakat.

Laju pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berpengaruh pada mutasi penggunaan lahan. Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian. Faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian jika dikaitkan dengan faktor penggunaan lahan diantaranya lahan untuk kegiatan sektor industri, pemukiman penduduk, fasilitas umum, lingkungan perkantoran, dan infrastruktur jalan. Dampak dari alih fungsi lahan terhadap sektor pertanian diantaranya berpengaruh terhadap produksi pertanian, penurunan penguasaan dan pengelolaan lahan garapan oleh petani yang berakibat penurunan pendapatan petani,

dan penurunan fungsi sosial masyarakat dalam bentuk degradasi tradisi/budaya pertanian. Alih fungsi lahan juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang bersinggungan langsung terhadap kerawanan sosial, politik dan ekonomi serta stabilitas keamanan nasional. Oleh sebab itu kenapa permasalahan lahan pertanian setidaknya merupakan permasalahan yang kompleks akan tetapi pengelolaan dan penanganannya masih belum maksimal.

3.1. Petani Jawa Tengah, Tuan Tanah Atau Petani Gurem?

Luas lahan pertanian secara umum di Jawa Tengah semakin hari semakin berkurang. Banyaknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian menjadi faktor utama dalam pengurangan lahan pertanian. Sehingga penguasaan lahan pertanian untuk usaha pertanian oleh para petani semakin berkurang luasannya. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST2013) rumah tangga usaha pertanian dibandingkan tahun 2003 mengalami penurunan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun 2013 di Jawa Tengah mencapai 4,29 juta rumah tangga turun 1,48 juta rumah tangga atau sebesar 25,65 persen dibanding tahun 2003 (5,77 rumahtangga). Namun demikian jika dilihat dari sudut pandang rata-rata luasan lahan yang dikuasai dan diusahakan untuk pertanian oleh rumah tangga usaha pertanian semakin kecil. Pada tahun 2013 rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar lebih banyak dibanding tahun 2003. Keadaan ini tercermin dari struktur penguasaan lahan pertanian di tahun 2013 cenderung persentase kelompok rumah tangga yang mengusahakan lahan di bawah 0,5 hektar masih cukup besar.

Kita ketahui bersama bahwa terdapat hubungan yang nyata antara luasan lahan terhadap produksi yang dihasilkan. Jika rumah tangga usaha pertanian mengusahakan lahan pertanian yang cukup luas maka akan berbanding lurus dengan produksinya. Pada keadaan normal yaitu cuaca, dan iklim mendukung pertanian, gangguan organisme pengganggu tanaman tidak signifikan dan harga pasar sesuai dengan keadaan pasar normal maka dengan produksi pertanian yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani. Keadaan seperti itu pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi signifikan dalam pertumbuhan sektor pertanian khususnya untuk tanaman pangan. Salah satu informasi untuk melihat sejauh mana para petani di Jawa Tengah memberikan andil dalam pembangunan di sektor pertanian dapat dilihat dari struktur penguasaan lahan dalam usaha pertaniannya.

Tabel 3.1. Struktur Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Luas Penguasaan Lahan, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
Tidak Menguasai	10,75	5,21	6,23
< 0,25 Ha	52,8	47,99	48,88
0,25 – 0,49 Ha	21,67	25,37	24,69
0,5 – 0,99 Ha	10,41	15,24	14,35
1,00 – 2,49 Ha	3,85	5,43	5,14
>2,49 Ha	0,51	0,76	0,72

Berdasarkan hasil ST2013-SPP, struktur rumah tangga usaha pertanian ditinjau dari penguasaan lahan pertanian terlihat bahwa sebesar 48,88 persen rumah tangga menguasai lahan pertanian dengan luasan kurang dari seperempat hektar (kurang dari 0,25 ha). Rumah tangga yang menguasai menguasai lahan pertanian 0,25 sampai dengan 0,49 hektar sebanyak 24,69 persen dan rumah tangga yang tidak menguasai lahan sebesar 6,23 persen. Rumah tangga usaha pertanian yang tercakup dalam kelompok tidak menguasai lahan di antaranya rumah tangga yang mengusahakan pemungutan hasil hutan, rumah tangga usaha penangkapan di perairan umum dan usaha jasa pertanian.

Persentase rumah tangga usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian 0,5 sampai dengan 0,99 hektar sebesar 14,35 persen. Rumah tangga yang menguasai lahan seluas 1 sampai dengan 2,49 hektar sebanyak 5,14 persen dan yang menguasai luas lahan lebih dari 2,49 hektar sebesar 0,72 persen. Dengan melihat struktur rumah tangga usaha pertanian menurut penguasaan lahan pertanian terlihat bahwa rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah lebih cenderung mengelompok dalam penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar dengan persentase 73,57 persen. Mereka inilah dimasukkan ke dalam kelompok petani gurem.

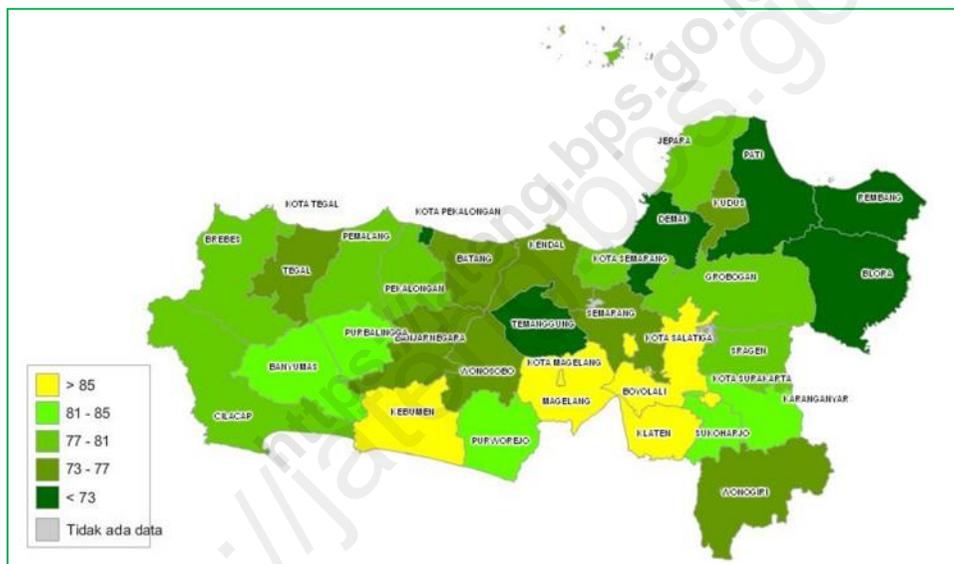
Struktur rumah tangga usaha pertanian jika dilihat dari daerah perkotaan dan perdesaan, keadaannya secara umum tidak jauh berbeda. Komposisi terbesar dari rumah tangga yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Persentase rumah tangga pertanian dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar di daerah perkotaan sebesar 74,47 persen. Dari jumlah tersebut, 21,67 persen menguasai luasan lahan 0,25 sampai dengan 0,49 hektar, dan 53,8 persen menguasai luasan lahan kurang dari 0,25 hektar.

Sementara itu, daerah perdesaan persentase rumah tangga usaha pertanian yang menguasai kurang dari 0,5 hektar sebesar 73,36 persen atau lebih rendah dibanding dengan daerah perkotaan. Persentase rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan 0,25 sampai dengan 0,49 hektar

sebesar 25,37 persen atau lebih besar dibanding perkotaan, dan yang menguasai kurang dari 0,25 hektar sebesar 47,99 hektar atau lebih rendah dari daerah perkotaan.

Rata-rata penguasaan lahan pertanian daerah perdesaan jauh lebih besar dari perkotaan dipengaruhi oleh keadaan dimana daerah perdesaan lahan pertanian masih lebih luas keberadaannya dibandingkan dengan daerah perkotaan. Namun di daerah perdesaan jumlah rumah tangga usaha pertanian juga lebih banyak dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Keadaan ini menyebabkan luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian yang relatif kecil sehingga petani gurem masih cukup tinggi di Jawa Tengah.

Gambar 3.1. Persentase RTUP yang Menguasai Lahan 0,5 Ha (Petani Gurem), Jawa Tengah 2013



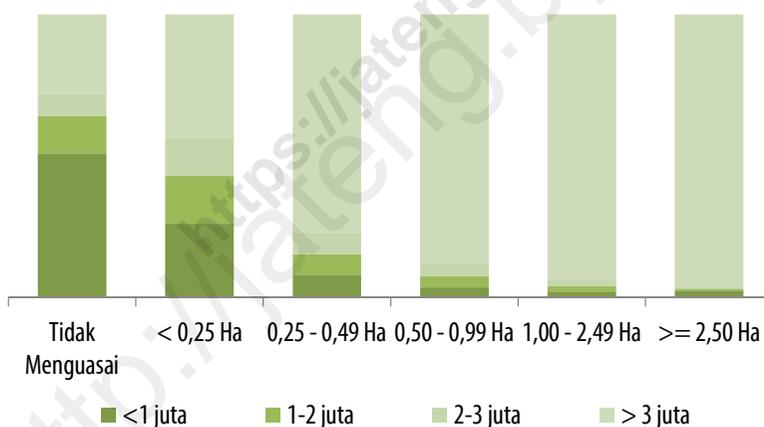
3.2. Penguasaan Lahan Pertanian

Pendapatan dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam melihat tingkat kesejahteraan. Pendapatan petani di Indonesia secara umum masih relatif rendah, hal ini juga menggambarkan kesejahteraan petani masih rendah bahkan bisa dikatakan petani kita masih terjat dalam lilitan kemiskinan. Faktor kepemilikan lahan pertanian dan tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor utama dalam mendukung keadaan petani sulit terentaskan dari kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan ditengarai masih berpusat di sektor pertanian adalah penguasaan lahan pertanian oleh petani yang kian sempit. Skala usaha yang kecil mengakibatkan pendapatan dari kegiatan usaha tani tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun kegiatan usaha tani yang dijalankan sebetulnya cukup menguntungkan. Alhasil, kesejahteraan pun begitu sulit direngkuh.

Pendapatan yang diterima petani berhubungan langsung dengan penguasaan lahan pertanian. Semakin luas lahan yang dikuasai dan diusahakan maka semakin tinggi pendapatan yang akan diperoleh para petani. Ditinjau dari hubungan tersebut, di Jawa Tengah terlihat bahwa semakin luas lahan pertanian yang dikuasai dan diusahakan oleh rumah tangga usaha pertanian, semakin besar pendapatan rumah tangga usaha pertanian.

Persentase rumah tangga usaha pertanian menurut luas lahan yang dikuasai dan pendapatan per tahun terlihat bahwa pada tahun 2013, sebesar 60,11 persen rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah berada pada kelompok yang memiliki pendapatan lebih dari 3 juta rupiah. Kelompok berikutnya adalah pendapatan kurang dari 1 juta rupiah sebesar 18,04 persen. Sementara yang merupakan bagian terkecil adalah rumah tangga usaha pertanian yang mempunyai pendapatan 2 sampai dengan 3 juta rupiah. Jika dilihat lebih jauh lagi, struktur rumah tangga usaha pertanian pada kelompok pendapatan akan lebih terlihat jelas bahwasemakin sempit luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga maka semakin rendah pendapatan yang diperolehnya.

Gambar 3.2. Persentase RTUP Menurut Lahan yang Dikuasai dan Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013



Jika diamati menurut luasan penguasaan lahan pertanian, pada kelompok pengeluaran kurang dari 1 juta rupiah, 1 sampai dengan 2 juta rupiah dan kelompok pendapatan 2 sampai dengan 3 juta akan semakin sedikit dijumpai pada rumah tangga yang lahan pertaniannya semakin luas. Sebaliknya semakin luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian maka persentase rumah tangga dikelompok pendapatan tiga juta rupiah atau lebih semakin besar.

Pendapatan petani dari usaha pertanian khususnya untuk petani gurem masih sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kehidupannya. Di Jawa Tengah masih banyak rumah tangga usaha pertanian mengelola lahannya dengan sistem bagi hasil ataupun sewa. Sistem pengelolaan yang demikian menyebabkan pendapatan hasil usaha sebagian harus dikeluarkan untuk membayar bagi hasil atau sewa kepada pemilik lahan. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan yang

diterima oleh rumah tangga usaha pertanian. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga usaha pertanian sebagian besar hanya cukup untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, sedangkan untuk keperluan lainnya seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan atau biaya hidup sekunder lainnya masih sangat kurang. Dengan pendapatan dari usaha yang relatif rendah tersebut menyebabkan petani belum bisa mengandalkan dari usaha pertaniannya saja. Tidak sedikit para petani di Jawa Tengah menambah penghasilannya dengan bekerja sebagai buruh di pertanian atau bekerja di luar sektor pertanian.

3.3. Mutasi Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian dalam perkembangannya semakin banyak yang beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian. Perkembangan ini berdampak semakin berkurangnya lahan pertanian yang dapat diusahakan untuk kegiatan pertanian, dan semakin berkurangnya penguasaan lahan pertanian oleh petani. Berkurangnya luas lahan pertanian yang diusahakan berpengaruh terhadap jumlah produksi dan pendapatan petani itu sendiri. Bahasan lain berkaitan dengan kondisi lahan pertanian adalah mutasi lahan yang semakin hari tidak terbendung. Jika mutasi lahan pertanian tersebut masih dalam fungsi lahan yang sama, maka tidak akan berdampak pada produksi sektor pertanian. Namun yang disayangkan jika mutasi lahan pertanian dengan alih fungsi lahan menjadi fungsi selain pertanian. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian dan produksi serta pengurangan penguasaan lahan untuk usaha pertanian.

Cakupan dalam ulasan pembahasan mutasi lahan pertanian ini hanya pada rumah tangga usaha pertanian yang memiliki lahan pada saat pengumpulan data. Untuk batasan waktu dalam melakukan mutasi lahan adalah selama 5 tahun yang lalu (tahun 2008 -2013). Sehingga bisa dikatakan ulasan ini hanya mencakup rumah tangga usaha pertanian yang masih memiliki lahan dan pernah melakukan mutasi lahan selama lima tahun terakhir. Mutasi lahan ditinjau dari jenisnya dibedakan mutasi lahan dengan cara dijual, dan dihibahkan. Selama lima tahun yang lalu seberapa besar kejadian mutasi dilakukan oleh rumah tangga usaha pertanian yang memiliki lahan pada saat pencacahan.

Tabel 3.2. Persentase RTUP yang Melakukan Mutasi Lahan Menurut Jenis Mutasi dan Luas Lahan yang Dimiliki, Jawa Tengah 2013

Luas Lahan yang Dimiliki	Jenis Mutasi Lahan		
	Dijual	Dihibahkan	Dijual dan Dihibahkan
< 0,25 Ha	63,67	34,14	2,19
0,25 - 0,49 Ha	66,16	31,51	2,33
0,50 - 0,99 Ha	57,31	40,33	2,36
1,00 - 2,49 Ha	68,05	28,27	3,68
>= 2,50 Ha	82,60	17,40	0,00
Jumlah	63,60	34,06	2,34

Hasil ST2013-SPP menggambarkan mutasi lahan dengan cara menjual lahan lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan cara menghibahkan. Terlihat dari persentase rumah tangga usaha pertanian yang memiliki lahan dan selama lima tahun terakhir telah menjual sebagian lahannya sebesar 63,60 persen, dan sebesar 34,06 persen rumah tangga usaha pertanian pernah menghibahkan sebagian lahannya. Untuk persentase rumah tangga usaha pertanian yang pernah menjual dan sekaligus juga pernah menghibahkan sebagian lahannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 2,34 persen.

Mutasi lahan oleh RTUP jika diulas dari lahan yang dimiliki pada tahun 2013 terlihat bahwa kecenderungan menjual lahan yang dimiliki pada kelompok RTUP yang memiliki lahan 1 hektar ke atas lebih tinggi jika dibandingkan RTUP yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar. Sebaliknya, mutasi lahan dengan cara menghibahkan lahan yang dimiliki, kelompok RTUP yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar lebih tinggi dibandingkan yang memiliki lahan 1 hektar keatas.

Pembagian harta warisan dalam hal ini lahan yang dimiliki, menyebabkan lahan yang sebelumnya dimiliki cukup luas harus dibagikan kepada ahli waris menjadi lahan yang lebih kecil. Dampak dari pembagian warisan lahan tersebut diantaranya semakin bertambahnya rumah tangga yang memiliki lahan dengan luasan lahan yang lebih kecil. Keadaan ini menggambarkan bahwa selama lima tahun terakhir RTUP telah banyak yang bertransformasi dari RTUP yang memiliki luasan cukup besar berubah menjadi RTUP yang memiliki luasan lahan relatif kecil.

Mutasi lahan yang dimiliki RTUP dapat ditinjau dari jenis lahan. Jenis lahan dibagi menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Selama kurun waktu lima

tahun, persentase RTUP yang pernah menjual dan atau menghibahkan lahan sawah sebesar 40,81 persen, untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 38,71 persen, dan yang pernah menjual dan atau menghibahkan lahan bukan pertanian sebesar 20,48 persen.

Tabel 3.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lahan yang Dijual/Dihibahkan dan Penggunaan Utama Lahan, Jawa Tengah 2013

Penggunaan Utama	Jenis Lahan yang Dijual/Dihibahkan		
	Lahan Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
Tempat Tinggal	8,41	19,86	71,74
Usaha Pertanian	54,88	42,91	2,21
Usaha di Luar Pertanian	25,61	52,30	22,08
Bukan Untuk Usaha	21,09	39,23	39,68
Tidak Tahu	21,26	57,41	21,32
Jumlah	40,81	38,71	20,48

Apabila dilihat menurut penggunaan utama lahan terlihat bahwa persentase RTUP yang pernah menjual atau menghibahkan lahan untuk tempat tinggal terbesar berasal dari lahan bukan pertanian sebesar 71,74 persen, lahan pertanian bukan sawah 19,86 persen, dan lahan sawah 8,41 persen digunakan untuk tempat tinggal. Pada lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, persentase RTUP yang pernah menjual atau menghibahkan lahan terbesar berasal dari lahan sawah sebesar 54,88 persen, diikuti lahan pertanian bukan sawah 42,91 persen, dan 2,21 persen lahan bukan pertanian. Usaha pertanian ini meliputi lahan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kandang untuk peternakan, kolam untuk perikanan dan juga untuk usaha budidaya tanaman kehutanan.

Hal yang mengkhawatirkan dari mutasi lahan adalah besarnya persentase RTUP yang pernah menjual dan atau menghibahkan lahan pertaniannya baik lahan sawah maupun bukan sawah digunakan untuk usaha di luar sektor pertanian. Persentase RTUP yang pernah menjual dan atau menghibahkan lahan pertanian bukan sawah yang dimilikinya untuk usaha bukan pertanian sebesar 52,30 persen dan dari jenis lahan sawah 25,61 persen. Keadaan ini mengindikasikan bahwa lahan pertanian di Jawa Tengah yang telah dijual dan atau dihibahkan oleh RTUP selama lima tahun terakhir dan dipergunakan untuk usaha diluar sektor pertanian sangat besar. Bisa dikatakan konvesi

lahan yang digunakan untuk usaha pertanian menjadi lahan yang digunakan untuk usaha bukan pertanian sangat besar.

Dilihat dari alasan utama RTUP menjual atau menghibahkan lahan yang dimilikinya di antaranya karena faktor kebutuhan ekonomi, dipergunakan untuk proyek pemerintah, dan faktor RTUP tidak mampu untuk mengelola lahannya. Persentase RTUP yang pernah menjual dan menghibahkan lahannya karena alasan kebutuhan ekonomi mencapai 59,77 persen, sedangkan untuk faktor ketidakmampuan untuk mengelola lahan 4,64 persen, karena digunakan untuk program pembangunan pemerintah 2,92 persen, sisanya karena faktor lainnya.

Jika dilihat dari sumber pendapatan utama, persentase RTUP yang menjual lahan karena terdesak faktor ekonomi dijumpai RTUP yang pendapatan utamanya dari sektor pertanian lebih tinggi dari sektor non pertanian yaitu 62,02 persen berbanding 52,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa RTUP yang sumber pendapatannya dari sektor pertanian lebih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan yang sumber pendapatan utamanya non pertanian.

Tabel 3.4. Persentase RTUP Menurut Alasan Utama RTUP Menjual Lahan dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Alasan Utama			
	Kebutuhan Ekonomi	Untuk Proyek Pemerintah	Tidak Mampu Mengelola	Lainnya
SEKTOR PERTANIAN	62,02	2,53	4,32	31,13
Tanaman Padi dan Palawija	62,93	3,24	3,44	30,39
Hortikultura	55,28	1,27	3,00	40,46
Perkebunan	62,35	1,55	4,58	31,53
Peternakan	75,75	0,78	12,58	10,89
Perikanan	26,59	0,77	15,70	56,94
Kehutanan	65,19	0,00	5,27	29,54
Jasa Pertanian	39,53	0,00	0,00	60,47
SEKTOR NON PERTANIAN	52,86	3,66	4,79	38,69
Lainnya	62,46	4,97	9,13	23,45
Jumlah	59,77	2,92	4,64	32,68

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pergeseran atau mutasi lahan pertanian ke bukan pertanian perlu dilihat bukan saja berdasarkan dampaknya kepada produksi pertanian saja, tetapi perspektif yang lebih luas. Dampak yang lebih luas yang mungkin terjadi adalah pengaruhnya kestabilan ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh kerawanan pangan, perubahan sosial yang merugikan, menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dampak dari kehilangan lahan pertanian

produktif adalah kehilangan hasil pertanian secara permanen, sehingga apabila kondisi ini tidak terkendali maka dipastikan kelangsungan dan peningkatan produksi akan terganggu. Pada akhirnya hal ini akan mengancam kestabilan pangan.

Untuk mengurangi alih fungsi lahan yang lebih luas, Pemerintah Jawa Tengah perlu melakukan strategi dan kebijakan mengenai pengendalian konversi lahan sawah. Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu diterapkan dengan pendekatan holistik. Hal ini dipandang penting karena permasalahan mutasi lahan sangat kompleks dan menyangkut berbagai kepentingan.

<https://jateng.bps.go.id>

4

SUMBER DAYA PRODUKTIF BUKAN TAK TERJANGKAU



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 4. SUMBER DAYA PRODUKTIF BUKAN TAK TERJANGKAU



Sumber bantuan yang diberikan kepada petani di Jawa Tengah sebagian besar berasal dari pemerintah sedangkan yang berasal dari non pemerintah masih relatif kecil

Sektor pertanian merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang mempunyai peran penting. Upaya mewujudkan pembangunan nasional bidang pertanian di masa mendatang adalah sebanyak mungkin mengatasi masalah dan kendala yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan secara tuntas sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Satu hal yang sangat kritis adalah meningkatnya produksi pertanian selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan.

Persoalan utama yang dihadapi oleh sebagian besar petani selain kepemilikan lahan adalah, minimnya modal, keterbatasan sarana produksi yang digunakan, serta akses terhadap kelembagaan yang perlu mendapatkan prioritas berkaitan dengan upaya meningkatkan usaha tani. Tiga hal penting tersebut kemudian menjadi landasan bahwa kesejahteraan petani tidak akan pernah bisa tercapai sehingga sebagian besar masyarakat petani masih identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Para petani sebagian besar memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh produksi dari sektor pertanian yang rendah pula. Produksi yang rendah ini disebabkan lahan usaha pertaniannya yang sempit dan dikelola dengan modal yang minim, sarana yang sederhana serta kurangnya akses terhadap kelembagaan di sektor pertanian

4.1. Akses Terhadap Permodalan

Seringkali dijumpai adanya pemilik modal besar yang mampu mengusahakan lahan pertaniannya dengan baik tanpa adanya bantuan kredit dari pihak lain. Golongan pemilik modal yang kuat ini sering ditemukan pada petani besar. Sebaliknya, tidak demikian halnya pada petani kecil. Golongan petani yang diklasifikasikan sebagai petani yang tidak bermodal kuat yaitu petani kecil, petani miskin. Karena itulah mereka memerlukan kredit usaha tani agar mereka mampu mengelola usaha taninya dengan baik.

Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal terutama bagi petani kecil atau petani miskin, hal ini dapat ditunjukkan dari hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (ST2013-SPP). Persentase petani di Jawa Tengah yang memperoleh bantuan kredit sebagian besar pada petani dengan kelompok pendapatan lebih 3 juta rupiah yang yaitu sebesar 83,23 persen. Petani dengan kelompok pendapatan kurang dari 3 juta rupiah yang memperoleh bantuan kredit hanya 16,77 persen. Hal ini terjadi pada semua sub sektor pertanian artinya masih adanya kesulitan akses kredit bagi petani yang berpendapatan rendah. Pihak pemberi kredit pada umumnya tidak mau ambil risiko. Oleh karena itu, petani belum menjadi pilihan yang tepat bagi mereka untuk menyalurkan kredit.

Tabel 4.1 Persentase Petani yang Memperoleh Bantuan Kredit Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kelompok Pendapatan, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Kelompok Pendapatan			
	<1 juta	1-2 juta	2-3 juta	>3 juta
Sektor Pertanian	6,48	4,62	5,68	83,23
Tanaman Padi dan Palawija	6,31	5,51	6,83	81,35
Hortikultura	6,36	3,63	5,20	84,81
Perkebunan	7,17	1,50	2,36	88,96
Kehutanan	18,55	0,00	5,73	75,72
Peternakan/Unggas	7,02	3,14	3,21	86,62
Perikanan	3,31	7,79	3,78	85,12
Jasa Pertanian	1,63	2,56	4,77	91,04
Sektor <i>non</i> Pertanian	22,48	10,74	10,87	55,91

Hasil ST2013-SPP juga memperlihatkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi petani Jawa Tengah dalam mengajukan kredit. Sebagian besar (49,38 persen) petani mengalami kesulitan dalam hal proses administrasi kredit yang rumit, sementara itu 36,66 persen karena tidak memiliki agunan. Sementara petani yang mengalami kesulitan akibat lokasi terpencil sebesar 5,14 persen dan lainnya (selain ketiga kesulitan di atas) sebesar 8,82 persen. Pola kesulitan tersebut hampir terjadi pada seluruh sumber pendapatan utama pada sub sektor pertanian, kecuali pada petani perikanan. Pada sub sektor perikanan, kesulitan yang paling besar adalah akibat tidak memiliki agunan.

Perbandingan petani di Jawa Tengah menurut sumber pendapatan yang mengalami kesulitan dalam hal proses administrasi kredit yang rumit, dapat dilihat bahwa petani pada sub sektor kehutanan merupakan petani yang mengalami proses administrasi kredit paling rumit dengan persentase sebesar 68,10 persen. Sementara persentase paling rendah adalah petani pada sub sektor perikanan (37,89 persen). Dilihat dari kesulitan pengajuan kredit dengan alasan tidak memiliki agunan maka persentase paling besar adalah petani pada sub sektor perikanan yaitu sebesar 45,34 persen dan yang paling kecil adalah petani pada sub sektor kehutanan yaitu sebesar 13,55 persen. Sedangkan petani yang mengalami kesulitan pengajuan kredit akibat lokasi wilayahnya terpencil, persentase paling besar adalah petani pada sub sektor kehutanan dan perkebunan masing-masing sebesar 18,35 persen dan 17,87 persen. Petani diluar kedua sub sektor tersebut yang mengalami kesulitan pengajuan kredit dengan alasan lokasi terpencil relatif kecil, di bawah 5 persen.

Karena masih banyaknya kesulitan pengajuan kredit yang dirasakan oleh petani, sebaiknya untuk membiayai usaha tani perlu dirancang mekanisme pengajuan kredit secara mudah. Sistem penyaluran kredit ini dirancang sedemikian rupa agar dapat diakses secara mudah oleh petani, misalnya tanpa agunan dan prosedur lebih disederhanakan. Bila tidak ada pinjaman yang berupa kredit usaha tani ini, maka kebanyakan petani terutama petani kecil dan petani miskin sering menjual harta bendanya, atau meminjam pada pihak lain untuk membiayai usaha taninya. Sebagian lagi segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayaran setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjatuh pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan petani.

Harapan sebagian besar petani, pemerintah semestinya lebih bisa berperan aktif untuk menjamin petani dalam pengajuan kredit. Tanpa jaminan yang kuat, kecil kemungkinan pihak pemberi kredit bersedia memberikan kredit kepada petani kecil atau petani miskin yang sebagian besar tidak memiliki lahan. Selama ini untuk proses kredit petani dimintai jaminan berupa sertifikat atau akta tanah. Dalam banyak kasus, jaminan itu tidak bisa dipenuhi petani lantaran banyak dari mereka yang tidak memiliki lahan garapan sendiri.

Tabel 4.2 Persentase Petani Menurut Kesulitan Pengajuan Kredit dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Kesulitan Pengajuan Kredit			
	Lokasi Terpencil	Tidak Memiliki Agunan	Proses Administrasi Kredit Rumit	Lainnya
Sektor Pertanian	5,14	36,66	49,38	8,82
Tanaman Padi dan Palawija	3,28	40,50	48,13	8,09
Hortikultura	4,57	33,10	54,92	7,42
Perkebunan	17,87	25,13	39,61	17,38
Kehutanan	18,35	13,55	68,10	0,00
Peternakan/Unggas	2,05	35,90	52,24	9,80
Perikanan	4,10	45,34	37,89	12,67
Jasa Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Sektor <i>non</i> Pertanian	6,17	27,12	52,80	13,92

Hasil ST2013-SPP juga menunjukkan bahwa sumber bantuan yang diberikan kepada petani di Jawa Tengah sebagian besar berasal dari pemerintah yaitu sebesar 32,84 persen sedangkan yang berasal dari non pemerintah masih relatif kecil yaitu 1,81 persen. Ini berarti aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber bantuan baik dari pemerintah maupun pihak swasta masih sangat terbatas. Kendala yang sering muncul mengapa petani terbatas memperoleh bantuan adalah banyak petani yang belum memahami benar tatacara mendapatkan dana bantuan baik dari pemerintah maupun *non* pemerintah akibat kurangnya informasi yang didapat oleh petani.

ST2013-SPP menunjukkan bahwa di Jawa Tengah petani pada sub sektor perikanan dan hortikultura merupakan petani yang paling kecil mendapatkan bantuan yang bersumber dari pemerintah yaitu masing-masing sebesar 12,15 persen dan 17,59 persen. Sementara petani pada sub sektor kehutanan dan petani tanaman padi dan palawija mendapat bantuan yang bersumber dari pemerintah relatif lebih besar masing-masing sebesar 38,39 persen dan 37,62 persen.

Tabel 4.3 Persentase Petani Menurut Sumber Bantuan dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Pemerintah	Non Pemerintah
Sektor Pertanian	32,84	1,81
Tanaman Padi dan Palawija	37,62	1,82
Hortikultura	17,59	1,47
Perkebunan	29,85	2,23
Kehutanan	38,39	2,97
Peternakan/Unggas	25,04	1,61
Perikanan	12,15	0,51
Jasa Pertanian	25,80	4,00
Sektor <i>non</i> Pertanian	26,22	1,40

4.2. Akses Terhadap Kelembagaan

Pembangunan pertanian nasional mencatat bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama petani kecil, pemerintah telah menerapkan berbagai sistem kelembagaan dan kemitraan dikarenakan tingkat kesejahteraan petani terus menurun sejalan dengan persoalan-persoalan klasik yang dialaminya. Tingkat keuntungan kegiatan usaha tani selama ini lebih banyak dinikmati oleh para pedagang dan pelaku usaha tani lainnya di hilir. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan pertanian yang mampu memberikan kekuatan bagi petani agar mempunyai posisi tawar yang tinggi. Kelembagaan pertanian dalam hal ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usaha tani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Di Jawa Tengah, petani yang sudah dapat mengakses kelembagaan pertanian masih relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil ST2013-SPP yang menunjukkan bahwa petani di Jawa Tengah yang menjadi anggota kelompok tani hanya sebesar 36,86 persen, sementara yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian sebesar 29,46 persen, dan yang memanfaatkan fasilitas koperasi masih sangat kecil, hanya sebesar 4,81 persen. Artinya masih banyak petani yang belum terlibat dan aktif dalam kelembagaan pertanian di Jawa Tengah.

Penyebab dari ketidakmerataan dan ketidakadilan akses pelayanan usaha tani kepada penggerak usaha tani (*access to services*) sebagai akibat kurang diperhatikannya rangsangan bagi penggerak usaha tani tersebut dalam tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (*social capital*). Kurangnya rangsangan menyebabkan tidak adanya rasa percaya diri (*self reliances*) pada petani akibat kondisi

yang dihadapi. Sebaiknya, untuk menghasilkan output seperti yang diharapkan, petani berhak mendapat pengetahuan atau rangsangan yang lebih besar terhadap tumbuhnya lembaga-lembaga yang merupakan salah satu jalan usaha tani dapat berkembang dan berjalan dengan baik (Fadholi, 1981).

Dalam pembangunan masyarakat pertanian sangatlah diperlukan penyuluh pertanian yang mempunyai peran sebagai konsultan pemandu, fasilitator dan mediator bagi petani. Dalam perspektif jangka panjang para penyuluh pertanian tidak lagi merupakan aparatur pemerintah, akan tetapi menjadi milik petani dan lembaganya. Penyuluh memberikan jalan kepada petani untuk mendapatkan kebutuhan informasi tentang cara bertani atau teknologi baru untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraannya. Selain itu, penyuluh juga memberikan pendidikan dan bimbingan yang berkelanjutan kepada petani.

Pentingnya interaksi sosial baik antara petani dan petani, petani dan kelembagaan, serta petani dan masyarakat, dapat meningkatkan kualitas SDM petani. Jika akses kelembagaan dalam berusaha tani kurang mencukupi maka perkembangan usaha tani dan petani yang menjalankan kurang maksimal karena ruang lingkup interaksi sosialnya sempit.

Tabel 4.4 Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Kelembagaan dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Kelembagaan		
	Mengikuti Penyuluhan Pertanian	Menjadi Anggota Kelompok Tani	Memfaatkan Fasilitas Koperasi
Sektor Pertanian	29,46	36,86	4,81
Tanaman Padi dan Palawija	30,80	40,37	5,20
Hortikultura	32,77	30,97	3,77
Perkebunan	24,87	28,95	3,35
Kehutanan	22,89	28,86	5,91
Peternakan/Unggas	23,06	29,90	4,00
Perikanan	17,32	29,57	5,84
Jasa Pertanian	23,04	26,13	3,65
Sektor <i>non</i> Pertanian	20,81	27,51	3,67

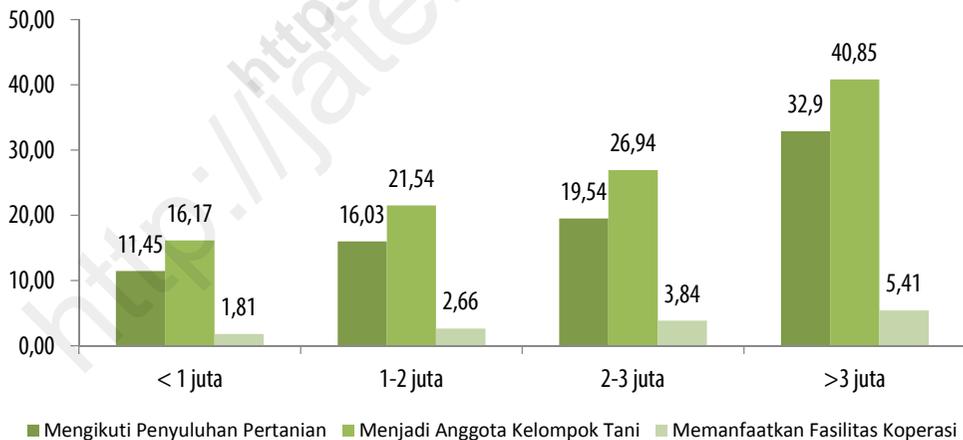
ST2013-SPP juga menunjukkan bahwa petani yang mengikuti penyuluhan berdasarkan kelompok pendapatan, semakin kecil pendapatan petani justru semakin kecil pula dalam mengikuti penyuluhan pertanian. Hal ini dapat dilihat bahwa petani yang berpendapatan kurang dari 1 juta

rupiah, mengikuti penyuluhan pertanian hanya sebesar 11,45 persen sedangkan petani yang berpendapatan lebih dari 3 juta rupiah yang mengikuti penyuluhan pertanian sebesar 32,90 persen.

Seperti halnya petani yang mengikuti penyuluhan pertanian, petani yang menjadi anggota kelompok tani berdasarkan kelompok pendapatan juga menunjukkan semakin kecil pendapatan petani semakin kecil juga dalam keikutsertaan menjadi anggota kelompok tani. Petani yang berpendapatan kurang dari 1 juta rupiah yang menjadi anggota kelompok tani sebesar 16,17 persen, sementara petani yang berpendapatan lebih dari 3 juta rupiah sebesar 40,85 persen. Hal ini mungkin disebabkan petani kecil merasa ada ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam pelayanan usaha taninya antara petani kaya dan petani miskin sehingga petani kecil yang identik dengan pendapatan rendah kurang minat untuk menjadi anggota kelompok tani.

Petani Jawa Tengah yang memanfaatkan fasilitas koperasi relatif sedikit baik petani berpendapatan rendah maupun petani yang berpendapatan tinggi. Hal ini kemungkinan karena semakin berkurangnya jumlah koperasi yang ada dan kurangnya sosialisasi dari koperasi itu sendiri. Hanya 1,81 persen petani yang berpendapatan kurang dari 1 juta rupiah yang memanfaatkan fasilitas koperasi, demikian juga petani yang berpendapatan lebih dari 3 juta rupiah hanya 5,41 persen.

Gambar 4.1 Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Kelembagaan dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013



4.3. Akses Terhadap Sarana Produksi

Sarana produksi dalam usaha tani sangat membantu dan mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Sarana produksi di sini mencakup cara memperoleh saprodi, pendistribusian hasil pertanian ke wilayah-wilayah tujuan pemasaran hasil tersebut. Tanpa adanya sarana produksi yang memadai maka biayaproduksi akan semakin mahal, pengangkutan dan distribusi akan mengalami kesulitan.

Secara umum petani di Jawa Tengah tidak terlalu sulit untuk mengakses sarana produksi. Hal ini dapat dilihat dari hasil ST2013-SPP bahwa petani Jawa Tengah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi sebesar 8,22 persen sedangkan petani yang mengalami kesulitan dalam hal menjual hasil pertanian hanya sebesar 4,88 persen.

Apabila dilihat petani menurut sub sektor maka petani padi dan palawija merupakan petani yang mengalami kesulitan terkecil dalam hal memperoleh sarana produksi yaitu sebesar 7,53 persen. Sementara petani hortikultura merupakan petani yang paling banyak mengalami kesulitan dalam hal memperoleh sarana produksi mencapai 11,07 persen. Apabila dilihat berdasarkan kesulitan dalam menjual hasil pertanian maka petani perkebunan yang paling merasa banyak mengalami kesulitan yaitu sebesar 9,15 persen, sedangkan yang terkecil mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertanian adalah petani pada sub sektor kehutanan hanya sebesar 2,70 persen.

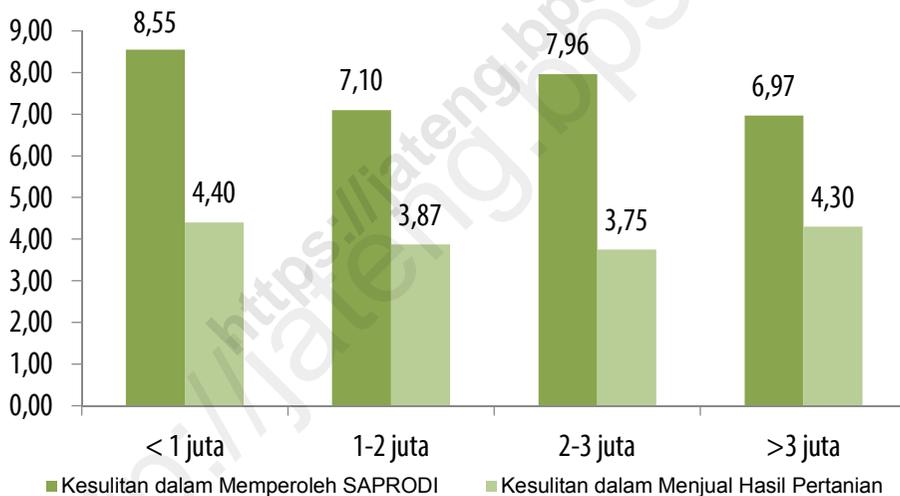
Tabel 4.5 Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Sarana Produksi, Penjualan Hasil Pertanian dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Akses terhadap SAPRODI	
	Kesulitan dalam Memperoleh Sarana Produksi	Kesulitan dalam Menjual Hasil Pertanian
Sektor Pertanian	8,22	4,88
Tanaman Padi dan Palawija	7,53	3,67
Hortikultura	11,07	8,97
Perkebunan	9,11	9,15
Kehutanan	8,17	2,70
Peternakan/Unggas	7,99	5,24
Perikanan	9,16	5,90
Jasa Pertanian	9,52	1,60
Sektor <i>non</i> Pertanian	6,37	3,37

Dilihat berdasarkan kelompok pendapatan petani yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi, hasil ST2013-SPP memperlihatkan bahwa petani di Jawa Tengah yang berpendapatan kurang dari 1 juta rupiah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi sebesar 8,55 persen. Petani berpendapatan 1 juta sampai 2 juta mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi sebesar 7,10 persen, sedangkan petani yang berpendapatan 3 juta rupiah lebih yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi sebesar 6,97 persen.

Sementara itu apabila dilihat berdasarkan kelompok pendapatan petani yang mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertanian, ST2013-SPP menunjukkan bahwa petani di Jawa Tengah relatif tidak mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, hanya 4 persen yang mengalami kesulitan pemasaran.

Gambar 4.2. Persentase Petani Menurut Akses Terhadap Sarana Produksi, Penjualan Hasil Pertanian dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013



Harga hasil produksi usaha tani berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh. Semakin besar hasil produksi dan semakin tinggi harganya maka keuntungan dari usaha tani pun semakin tinggi pula. Namun harga saprodi juga mempengaruhi penerimaan hasil secara keseluruhan. Harga saprodi merupakan komponen utama dalam berusaha tani.

Sebagai contoh program populis berupa subsidi pupuk kepada petani, faktanya pemerintah tidak mampu melakukan pengawasan terhadap sistem distribusinya sehingga jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak. Bahkan, pupuk dengan harga murah yang seharusnya dinikmati oleh petani justru dijadikan komoditas yang diperdagangkan oleh para distributor nakal sehingga harga menjadi mahal. Akibatnya, para petani tetap menjerit akibat mahalnya harga pupuk.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil ST2013-SPP bahwa petani di Jawa Tengah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi sebagian besar (49,73 persen) karena alasan harganya mahal, sedangkan akibat tidak tersedianya sarana produksi sebesar 23,26 persen dan akibat lokasi yang terpencil relatif kecil hanya 12,15 persen.

Harapan petani kepada pemerintah adalah agar pemerintah bisa memberikan sarana produksi seperti pupuk, pestisida dan bibit murah yang berkualitas. Selama ini petani mengalami kesulitan dalam memenuhi sarana produksi karena harganya di pasar mahal. Sarana produksi murah namun berkualitas sangat diperlukan para petani untuk meningkatkan jumlah produksi serta menumbuhkan semangat dalam pengembangan pertaniannya.

Tabel 4.6. Persentase Petani Menurut Alasan Kesulitan Memperoleh Sarana Produksi dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Alasan Utama Mengalami Kesulitan			
	Lokasi Terpencil	Tidak Tersedia	Mahal	Lainnya
Sektor Pertanian	12,15	23,26	49,73	14,86
Tanaman Padi dan Palawija	12,56	23,86	46,69	16,89
Hortikultura	7,47	20,28	61,48	10,77
Perkebunan	12,63	28,44	50,68	8,25
Kehutanan	31,07	15,48	39,24	14,21
Peternakan/Unggas	14,87	21,89	52,22	11,03
Perikanan	8,87	23,74	46,90	20,50
Jasa Pertanian	5,09	25,29	39,16	30,47
Sektor <i>non</i> Pertanian	11,71	28,65	45,25	14,39

Pembangunan pertanian tidak hanya berhenti sampai proses produksi, pemasaran produk pertanian menjadi pekerjaan dan tugas berikutnya yang tidak mudah. Pemasaran merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha pertanian karena pemasaran merupakan tindakan ekonomi yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan petani. Produksi yang baik akan menjadi sia-sia apabila harga pasar rendah. Karena itu tingginya produksi tidak mutlak memberikan hasil atau keuntungan tinggi tanpa disertai pemasaran yang baik dan efisien (Kotler: 34)

Berdasarkan hasil ST2013-SPP terlihat bahwa sebagian besar (86,30 persen) petani di Jawa Tengah mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil usaha taninya yang diakibatkan harga hasil usaha taninya yang rendah. Sedangkan alasan kesulitan memasarkan karena akses ke pasar sulit, biaya transportasi mahal dan pasar tidak tersedia tidak terlalu dirasakan oleh para petani di Jawa Tengah (masing-masing hanya sebesar 2,33 persen, 5,88 persen dan 1,05 persen).

Tabel 4.7. Persentase Petani Menurut Alasan Kesulitan Menjual Hasil Pertanian dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Alasan Utama Mengalami Kesulitan				
	Akses ke Pasar Sulit	Biaya Transportasi Mahal	Pasar Tidak Tersedia	Harga Rendah	Lainnya
Sektor Pertanian	2,33	5,88	1,05	86,30	4,44
Tanaman Padi dan Palawija	2,37	7,30	1,29	83,88	5,15
Hortikultura	1,55	3,25	0,08	92,32	2,80
Perkebunan	1,28	1,74	0,75	94,19	2,03
Kehutanan	13,30	5,27	11,22	70,20	0,00
Peternakan/Unggas	0,61	12,78	0,57	82,17	3,88
Perikanan	12,39	5,12	2,55	62,08	17,86
Jasa Pertanian	0,00	0,00	0,00	63,56	36,44
Sektor <i>non</i> Pertanian	2,59	8,42	2,13	83,14	3,72

Apabila dilihat petani menurut sub sektor, petani di Jawa Tengah yang paling merasakan harga yang rendah dari hasil usaha taninya adalah petani perkebunan dan petani hortikultura masing-masing sebesar 94,19 persen dan 92,32 persen. Sementara petani pada sub sektor perikanan yang paling kecil mengalami kesulitan pemasaran akibat harga yang rendah yaitu sebesar 62,08 persen.

Berdasarkan kenyataan itulah, diperlukan penanganan masalah pemasaran yang tepat. Dengan mekanisme pemasaran yang baik diharapkan dapat menimbulkan gairah petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Dengan meningkatnya hasil produksi dapat meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya dan kesejahteraan rumah tangga petani akan terwujud.

<http://jateng.bps.go.id>

5

BAGAIMANA AGAR PETANI BISA KAYA



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 5. BAGAIMANA AGAR PETANI BISA KAYA



Faktor pendidikan diduga mempunyai kaitan dengan pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian, semakin tinggi tingkat pendidikan secara tidak langsung semakin tinggi pendapatan rumah tangga sektor pertanian

Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha pendayagunaan sumber daya alam untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan taraf hidup penduduk agar menjadi lebih layak. Salah satu usaha yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan penduduk terutama yang berusaha di bidang pertanian, karena sebagian besar penduduk Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian.

5.1. Determinan Pendapatan Rumah Tangga Pertanian

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah/gaji, modal akan memperoleh balas jasa dalam bentuk bunga modal, serta keahlian termasuk para enterprenuer akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba (Sadono Sukirno, 1995). Pendapatan rumah tangga pada dasarnya bersumber dari dua sektor utama, yaitu dari sektor pertanian dan sektor di luar pertanian.

Pendapatan rumah tangga pada sektor pertanian merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha pada sektor pertanian. Masyarakat pertanian di pedesaan pada umumnya masih tergolong miskin dan mayoritas hanya mengandalkan tenaga kerja sebagai sumberdaya utama proses produksi.

Aspek ketenagakerjaan diharapkan dapat memberi peluang bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya (bukan sekedar subsistem belaka), terutama para buruh tani. Perbedaan penghasilan usaha tani di samping karena luasan lahan usaha juga dipengaruhi tingkat kesuburan, teknologi dan akses sarana produksi yang dipakai, serta akses yang baik terhadap pusat industri dan perdagangan.

Berdasarkan berbagai kajian pustaka (lampiran), maka beberapa variabel yang diduga merupakan variabel-variabel penentu variasi pendapatan RTUP adalah:

1. Angka ketergantungan
2. Pendidikan petani
3. Jenis kelamin petani
4. Wilayah tempat tinggal petani
5. Penggunaan lahan
6. Sumber pembiayaan
7. Bantuan/hibah
8. Pemanfaatan koperasi
9. Akses sarana produksi
10. Penyuluhan
11. Kelompok tani
12. Pemasaran hasil pertanian

Salah satu tujuan dari Survei Pendapatan Petani (SPP) adalah untuk mengetahui variasi dan pola sebaran pendapatan rumah tangga yang berusaha pada sektor pertanian (RTUP). Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor penentu dari variasi pendapatan rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian. Metode statistik yang dapat digunakan untuk mengkaji hal tersebut adalah model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linear Regression*).

Analisis regresi bertujuan untuk mempelajari bentuk/pola hubungan antara sebuah variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya, melalui suatu persamaan matematis. Model regresi linier sederhana (*simple linear regression*) mempelajari pola hubungan linier antara dua variabel, sedangkan model regresi linier berganda (*multiple linear regression model*) mempelajari pola hubungan linier dari beberapa variabel.

Bentuk umum model regresi linier berganda adalah:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

$$j = 1, 2, \dots, k$$

keterangan:

Y_i : variabel tak bebas (*response/dependent variable*)

X_{ij} : variabel bebas (*predictor/independent variable*) ke- j

ε_i : suku error

β_0 : parameter intersep

β_j : parameter koefisien regresi dari variabel bebas ke- j

Model (1) di atas menunjukkan juga pengaruh dari k variabel bebas X sebagai determinan terhadap variabel tidak bebas Y .

Asumsi-asumsi yang mendasari model tersebut adalah:

1. $E(\varepsilon_i|0) = 0$
2. $\text{var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ (*homoscedastic*)
3. $\text{covar}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, i \neq j$ (*non autocorrelation*)
4. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$
5. Tidak ada kolinieritas/multikolinieritas

Dibawah asumsi $E(\varepsilon_i|0) = 0$, fungsi regresi untuk model regresi (1) adalah

$$E(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} \quad (2)$$

Parameter koefisien regresi β_j pada fungsi regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai perubahan rata-rata nilai Y $E(Y_i)$ yang disebabkan oleh berubahnya nilai X_{ij} sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Model Regresi dengan *Dummy Variable*

Model regresi (1), dapat juga diterapkan pada kasus dimana variabel bebasnya berupa data kualitatif/kategorik. Contoh kasus dengan variabel bebas kualitatif adalah penelitian tentang apakah jenis kelamin (laki-laki, perempuan), rata-rata waktu belajar perminggu, dan IQ berpengaruh terhadap prestasi akademik seorang siswa.

Pada contoh di atas, mengandung variabel bebas yang bersifat kategorik. Sementara itu, model regresi (1) mensyaratkan bahwa variabel bebas maupun tak bebas bersifat kuantitatif, sehingga pada kasus di atas variabel bebas kategorik/kualitatif harus dikuantifikasikan terlebih dahulu menggunakan "*dummy variable*". Variabel *dummy* bernilai 0 dan 1, dan banyaknya variabel *dummy* adalah $k - 1$ (k = banyaknya kategori). Sebagai contoh pada kasus pertama, mengandung variabel bebas jenis kelamin yang bersifat kategorik, yaitu laki-laki dan perempuan. Variabel tersebut terdiri atas dua kategori, sehingga cukup sebuah variabel *dummy* yang digunakan untuk mewakili variabel tersebut.

Misalkan variabel *dummy* untuk jenis kelamin menjadi:

D = 1, jika laki-laki

0, jika perempuan (kategori referensi)

Interpretasi dari koefisien variabel *dummy* berbeda dengan variabel bebas kuantitatif. Dengan memasukkan variabel bebas kategorik pada dasarnya membandingkan nilai rata-rata Y antar kategori yang ada. Dengan demikian interpretasi koefisien variabel *dummy* juga membandingkan antara kategori tertentu dengan kategori referensinya (dengan asumsi variabel bebas yang lain pada kondisi yang sama/konstan).

Estimasi Parameter Model Regresi

Salah satu metode estimasi parameter yang paling populer adalah *Ordinary Least Squares* (OLS). Jika asumsi-asumsi yang disyaratkan terpenuhi, estimator OLS akan memiliki sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), yaitu estimator tersebut bersifat linier, tak bias, dan memiliki varian terkecil diantara estimator linier dan tak bias yang lain. Selanjutnya pencarian estimasi koefisien regresi dapat diperoleh melalui aljabar matriks, namun dalam pekerjaan kali ini estimasi koefisien regresi menggunakan bantuan *software* statistik (SPSS).

Berdasarkan hasil estimasi parameter koefisien regresi, maka persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1X_{i1} + b_2X_{i2} + \dots + b_kX_{ik} \quad (3)$$

Dimana b_j merupakan estimator dari β_j , yang menyatakan (estimasi) perubahan nilai Y jika variabel bebas ke- j berubah satu satuan, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan/pada kondisi yang sama.

Pengujian Hipotesis

Dalam regresi linier berganda, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Uji Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui/menguji apakah model regresi dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, atau apakah minimal ada 1 dari k variabel bebas yang signifikan di dalam model.

Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

(model yang diajukan tidak dapat menjelaskan hubungan antar variabel)

$H1$: minimal ada satu $\beta_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, k$
 (minimal ada satu variabel bebas yang signifikan/model dapat menjelaskan hubungan antar variabel)

Pengujian hipotesis di atas dapat dilakukan menggunakan tabel ANOVA sebagai berikut:

Sumber keragaman (Sources of variation)	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean squares	F_{hitung}
Regresi	SSReg	k	MSReg	MSReg/MSE
Error	SSE	n-k-1	MSE	
Total	SST	n-1		

Hipotesis nol akan ditolak pada tingkat signifikansi α , jika:

$$F_{hitung} > F_{1-\alpha, k, n-k-1}$$

Apabila H_0 ditolak, maka dapat dikatakan bahwa minimal ada satu variabel bebas yang signifikan/model dapat menjelaskan hubungan antar variabel.

2. Uji Parsial

Uji parsial ini digunakan untuk menguji apakah variabel bebas tertentu signifikan di dalam model (apakah signifikan mempengaruhi variabel tak bebas).

Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah:

$$H_0 : \beta_j = 0$$

(variabel bebas ke- j tidak signifikan mempengaruhi variabel tak bebas)

$$H_0 : \beta_j \neq 0$$

(variabel bebas ke- j signifikan mempengaruhi variabel tak bebas)

Statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis di atas adalah:

$$t_{hitung} = \frac{b_j}{s(b_j)} \sim t_{n-k-1}$$

dengan $s(b_j)$ merupakan *standard error* dari b_j

Pengujian terhadap hipotesis diatas akan tolak H_0 jika

$$t_{hitung} > t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-k-1}$$

yang berarti bahwa pada tingkat signifikansi α , variabel bebas ke- j (X_j) signifikan mempengaruhi variabel tak bebas (Y).

3. Uji Sekuensial (Sequential Test)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji satu persatu secara berurutan apakah variabel bebas tertentu signifikan di dalam model. Pengujian seperti ini biasa diterapkan dalam metode pemilihan model terbaik seperti *Forward Selection*, *Backward Elimination*, dan *Stepwise Regression*.

Kemampuan Prediksi Model

Untuk mengukur seberapa baik (kehandalan) model dapat menjelaskan hubungan antara variabel tak bebas (Y) dan semua variabel bebas digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien ini mengukur besarnya kontribusi variabel bebas yang ada di dalam model dalam menjelaskan keragaman nilai variabel tak bebas (Y). Koefisien determinasi (R^2) dapat dihitung dengan rumus:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Permasalahannya, setiap penambahan variabel bebas ke dalam model akan selalu meningkatkan nilai koefisien determinasi, sehingga dalam Regresi Linier Berganda sebaiknya digunakan R^2 yang disesuaikan (*adjusted R2*):

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} \left(\frac{n-1}{n-k-1} \right)$$

Model Pendapatan RTUP

Untuk mengetahui variabel-variabel penentu yang berpengaruh terhadap pendapatan RTUP maka model regresi yang digunakan dalam analisis pendapatan RTUP adalah:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + 3\beta_3 X_{i3} + \beta_4 D_{i4} + \beta_5 D_{i5} + \beta_6 D_{i6} + \beta_7 D_{i7} + \beta_8 D_{i8} + 9D_{i9} + \beta_{10} D_{i10} + \beta_{11} D_{i11} + \beta_{12} D_{i12} + \varepsilon_i$$

dengan variabel bebasnya adalah:

- X1 = *Dependency Ratio* yaitu Jumlah ART 15-64 tahun yang bekerja dibagi jumlah ART total
- X2 = Persentase Petani yang berpendidikan di atas SMP
- X3 = Persentase petani laki-laki
- X4 = Daerah tempat tinggal
 D4 = 1, jika urban
 0, jika rural
- X5 = Penggunaan lahan (pengguna lahan atau bukan pengguna lahan)
 D5 = 1, jika petani pengguna lahan
 0, jika petani bukan pengguna lahan
- X6 = Sumber pembiayaan (hanya modal sendiri atau lainnya)
 D6 = 1, jika hanya modal sendiri
 0, jika selain hanya modal sendiri
- X7 = Bantuan/hibah
 D71 = 1, jika mendapat bantuan modal
 0, lainnya
 D72 = 1, jika mendapat bantuan non modal
 0, lainnya
 D73 = 1, jika mendapatkan bantuan modal dan non modal
 0, lainnya
- X8 = Akses saprodi
 D8 = 1, jika akses saprodi sulit
 0, jika akses saprodi mudah
- X9 = Penyuluhan
 D9 = 1, jika mendapat penyuluhan
 0, jika tidak mendapat penyuluhan
- X10 = Kelompok Tani
 D10 = 1, jika anggota kelompok tani
 0, jika bukan anggota kelompok tani
- X11 = Pemanfaatan Koperasi
 D11 = 1, jika memanfaatkan koperasi
 0, jika tidak memanfaatkan koperasi
- X12 = Pemasaran Hasil Pertanian
 D12 = 1, jika pemasaran tidak mudah
 0, jika pemasaran mudah
- Y_i = Pendapatan Rumah Tangga dari Sektor Pertanian

Data yang digunakan sebagian besar merupakan *dummy* variabel, sedangkan data pendapatan rumah tangga merupakan data yang berskala rasio dengan satuan ribuan rupiah. Untuk mendapatkan data normal maka pendapatan rumah tangga dinormalkan dengan logaritma natural ($\ln Y_i$). Oleh karena itu interpretasi dari nilai koefisien untuk masing-masing variabel adalah bentuk eksponensial dari nilai koefisien tersebut.

Uji Simultan

Selanjutnya dilakukan uji parameter secara simultan, uji parameter dilakukan untuk mengetahui apakah model yang dibentuk signifikan dan variabel-variabel bebas/*independent* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat/*dependent*. Uji simultan dilakukan menggunakan uji F, yaitu dengan menguji apakah ke-12 variabel yang dimasukkan dalam model pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga.

Hipotesis

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, berarti variabel X_1, X_2, \dots, X_{12} tidak berpengaruh terhadap Y

H1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, berarti variabel X_1, X_2, \dots, X_{12} berpengaruh terhadap Y

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha=0,05$) maka diperoleh pengujian model sebagai berikut:

Tabel 5.1. Uji Simultan Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,309 ^a	,096	,095	1,3378	,096	316,33	14	4191,4	,000	1,576

a. Predictors: (Constant), D12, D71, X1, D4, X3, D6, X2, D73, D5, D11, D72, D8, D9, D10

b. Dependent Variable: Yi

Dari tabel 5.1 terlihat dengan derajat bebas 12 memberikan nilai F sebesar 448,922 dan nilai signifikansi 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti bahwa variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian.

Ujia Parsial

Uji parsial dilakukan terhadap masing-masing variabel bebas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian. Uji ini menggunakan uji t.

Tabel 5.2. Uji Parsial Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc	VIF
1 (Constant)	7,939	,027		296,121	,000		
X1	-,002	,003	-,003	-,563	,573	,999	1,001
X2	,001	,000	,042	8,951	,000	,987	1,014
X3	,005	,000	,071	15,234	,000	,995	1,005
D4	,026	,016	,008	1,605	,108	,973	1,028
D5	,079	,014	,027	5,793	,000	,974	1,027
D6	-,358	,019	-,086	-18,416	,000	,979	1,022
D71	,185	,022	,040	8,316	,000	,927	1,079
D72	,287	,021	,065	13,613	,000	,951	1,052
D73	,301	,027	,054	10,966	,000	,895	1,117
D8	-,072	,025	-,013	-2,820	,005	,962	1,040
D9	,366	,019	,114	19,014	,000	,604	1,656
D10	,416	,018	,139	22,782	,000	,584	1,713
D11	,174	,033	,026	5,351	,000	,942	1,062
D12	,085	,032	,012	2,631	,009	,963	1,038

a. Dependent Variable: Yi

Tabel 5.2 merupakan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model. Dengan taraf kepercayaan 95 persen ($\alpha=0,05$) terlihat bahwa nilai signifikansi variabel X1 dan D4 adalah 0,573 dan 0,108, nilai signifikansi kedua variabel tersebut, yaitu variabel Dependency Ratio dan variabel daerah tempat tinggal lebih dari $\alpha=0,05$ oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian.

Variabel lain, yaitu X2, X3, D5, D6, D71, D72, D73, D8, D9, D10, D11, D11 mempunyai nilai signifikansi kurang dari $\alpha=0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio petani yang berpendidikan SMP, rasio petani laki-laki, penggunaan lahan, sumber pembiayaan, bantuan/hibah dalam bentuk modal, bantuan dalam bentuk non modal, bantuan dalam bentuk modal dan non modal, akses saprodi, penyuluhan, keanggotaan dalam kelompok tani, pemanfaatan koperasi dan kesulitan pemasaran hasil signifikan secara statistik dan variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian.

Berdasarkan hasil uji simultan terhadap model dan uji parsial terhadap variabel-variabel yang dimasukkan dalam model di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln Y_i = & 7,939 + 0,002X_{i2} + 0,005X_{i3} + 0,079D_{i5} - 0,358D_{i6} + 0,185D_{i71} + 0,287D_{i72} \\ & + 0,301D_{i73} - 0,072D_{i8} + 0,366D_{i9} + 0,416D_{i10} + 0,174D_{i11} \\ & + 0,085D_{i12} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Pengaruh Pendidikan Rumah Tangga Pertanian

Pendidikan diduga mempunyai kaitan dengan pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian, yang mana semakin tinggi tingkat pendidikan secara tidak langsung semakin tinggi pendapatan rumah tangga sektor pertanian. Variabel digunakan untuk menggambarkan pendidikan rumah tangga petani adalah persentase petani yang berpendidikan SMP ke atas.

Nilai koefisien variabel adalah sebesar 0,002, angka ini dapat diinterpretasikan bahwakenaikan persentase petani yang berpendidikan SMP ke atas menaikkan pendapatan rumah tangga petani sebesar 1.002 rupiah. Dengan demikian meningkatkan pendidikan petani sampai SMP berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan meskipun tidak signifikan. Di duga jika peningkatan pendidikan petani ke jenjang yang lebih tinggi lagi sampai SMA bahkan perguruan tinggi akan meningkatkan secara signifikan pendapatan petani.

Pengaruh Jenis Kelamin Petani

Dalam rumah tangga memungkinkan adanya lebih dari satu petani, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk mengetahui perbedaan petani laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian maka variabel persentase petani laki-laki digunakan untuk mengetahui perbedaan rumah tangga dengan petani laki-laki-laki dengan petani perempuan.

Nilai koefisien dari variabel persentase petani laki-laki adalah 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan persentase petani laki-laki menyebabkan kenaikan pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian sebanyak 1.005 rupiah.

Pengaruh Variabel penggunaan lahan

Dari hasil regresi berganda menunjukkan bahwa variabel penggunaan lahan signifikan secara statistik mempengaruhi pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian dengan nilai koefisien sebesar 0,079. Nilai koefisien sebesar 0,079 dapat diinterpretasikan perbedaan pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian antara pengguna lahan dan bukan pengguna lahan adalah sebesar 1.082 rupiah. Artinya pendapatan rumah tangga pengguna lahan lebih besar 1.082 rupiah dibandingkan yang bukan pengguna lahan.

Pengaruh variabel sumber pembiayaan

Variabel sumber pembiayaan signifikan mempengaruhi pendapatan rumah tangga sektor pertanian dengan nilai koefisien sebesar -0,358 yang berarti bahwa perbedaan pendapatan rumah tangga yang menggunakan modal sendiri dan rumah tangga yang menggunakan selain modal sendiri adalah sebesar 1.430. Rumah tangga yang menggunakan modal sendiri cenderung

mempunyai pendapatan dari sektor pertanian 1.430 rupiah lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang menggunakan modal selain modal sendiri.

Petani yang menggunakan modal hanya selain modal sendiri mempunyai kecenderungan untuk meminjam baik dari bank ataupun dari non bank. Petani yang demikian mempunyai kecenderungan lebih tertantang dalam mengelola usahanya karena dituntut untuk dapat mengembalikan pinjaman.

Pengaruh variabel Bantuan/Hibah

Variabel bantuan/hibah dibagi menjadi 3 variabel *dummy*, yaitu rumah tangga yang mendapat bantuan modal sebagai variabel *dummy* pertama, rumah tangga yang mendapat bantuan non modal sebagai variabel *dummy* kedua dan rumah tangga yang mendapat bantuan modal dan non modal sebagai variabel *dummy* ketiga.

Pada variabel *dummy* pertama signifikan mempengaruhi pendapatan rumah tangga dengan nilai koefisien sebesar 0,185. Berarti pada rumah tangga yang memperoleh bantuan modal akan memperoleh pendapatan lebih besar sebesar 1200 rupiah dibandingkan rumah tangga yang tidak memperoleh bantuan apapun.

Pada variabel *dummy* kedua signifikan secara statistik dan mempunyai koefisien sebesar 0,287. Interpretasi dari nilai ini adalah bahwa rumah tangga yang mendapatkan bantuan non modal mempunyai pendapatan lebih besar sebesar 1.332 rupiah dibandingkan rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan apapun.

Pada variabel *dummy* ketiga yaitu rumah tangga yang mendapatkan bantuan modal dan non modal signifikan secara statistik dengan nilai koefisien sebesar 0,301 yang berarti bahwa rumah tangga yang mendapatkan bantuan modal dan non modal mempunyai pendapatan di sektor pertanian lebih besar 1.350 rupiah dibandingkan rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan apapun.

Dari tiga variabel *dummy* diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan baik modal maupun bukan modal akan menambah pendapatan rumah tangga petani. Pemberian bantuan modal sekaligus bukan modal makin menambah jumlah pendapatan petani lebih besar dibandingkan bantuan hanya modal saja atau hanya non modal saja.

Pengaruh Variabel Akses Sarana dan Prasarana Produksi (saprodi)

Pada variabel akses saprodi yang dikategorikan menjadi dua yaitu rumah tangga yang mempunyai kesulitan akses saprodi (kategori = 1) dan rumah tangga yang tidak mempunyai kesulitan akses saprodi (kategori =0). Variabel ini signifikan secara statistik dengan nilai koefisien sebesar -0.072, yang berarti ada perbedaan pendapatan rumah tangga antara rumah tangga yang mempunyai kesulitan akses saprodi dengan rumah tangga yang tidak mempunyai kesulitan akses saprodi. Yang mana pendapatan rumah tangga yang mempunyai kesulitan akses saprodi lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang tidak mempunyai kesulitan akses saprodi.

Pengaruh variabel penyuluhan

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa variabel penyuluhan secara statistik signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,366 yang berarti ada perbedaan antara rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan dengan rumah tangga yang tidak mendapatkan penyuluhan. Rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan cenderung mempunyai pendapatan lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tidak mendapatkan penyuluhan.

Pengaruh variabel kelompok tani

Variabel kelompok tani signifikan secara statistik dengan nilai koefisien sebesar 0,416 yang berarti ada perbedaan pendapatan rumah tangga antara rumah tangga petani yang menjadi anggota kelompok tani (poktan) dengan rumah tangga yang tidak menjadi anggota poktan. Nilai + dapat diinterpretasikan bahwa rumah tangga yang menjadi anggota poktan cenderung mempunyai pendapatan lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tidak menjadi anggota poktan.

Pengaruh variabel pemanfaatan koperasi

Variabel pemanfaatan koperasi mempengaruhi pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian dengan nilai koefisien sebesar 0,174. Dapat diartikan bahwa rumah tangga yang memanfaatkan koperasi mempunyai pendapatan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tidak memanfaatkan koperasi.

Pemasaran hasil pertanian

Variabel pemasaran pertanian dikategorikan menjadi 2, yaitu rumah tangga yang mempunyai kesulitan pemasaran (kategori = 1) dan rumah tangga yang tidak mempunyai kesulitan pemasaran (kategori = 0). Variabel ini signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,085 yang berarti bahwa rumah tangga yang kesulitan dalam hal pemasaran justru mempunyai pendapatan lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tidak mempunyai kesulitan dalam hal pemasaran. Kesulitan menjual hasil pertanian umumnya dialami oleh petani yang masih menunggu harga agar lebih tinggi.

Koefisien Determinasi

Pada Tabel 5.1 terlihat bahwa dari hasil regresi model tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R_2) sebesar 0,095, yang berarti bahwa model yang dibangun dengan menggunakan 10 variabel diatas dapat menjelaskan variasi pendapatan rumah tangga pertanian sebesar 9,6 persen dan selebihnya variasi dari pendapatan rumah tangga petani dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh nilai dari penjualan hasil pertaniannya, baik berupa pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan. Nilai penjualan hasil pertanian sangat rentan terhadap harga pasar, yang mana persentase perubahan harga pasar terhadap komoditas pertanian sangat bervariasi

demikian juga persentase perubahannya. Pengaruh musim, harga pasar hasil pertanian, serta harga sarana produksi seperti pupuk, pestisida yang terkadang tidak mendapat pengawasan sangat mempengaruhi penerimaan total petani dari hasil pertaniannya.

5.2. Implikasi kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap model pendapatan rumah tangga petani di atas dapat diketahui bahwa variabel pendidikan, jenis kelamin, penggunaan lahan, sumber pembiayaan, bantuan/hibah, akses saprodi, penyuluhan, keanggotaan dalam kelompok tani, pemanfaatan koperasi, dan pemasaran hasil pertanian mempengaruhi pendapatan rumah tangga sari sektor pertanian.

Secara demografis, petani dengan pendidikan tinggi dan berjenis kelamin laki-laki mempunyai kecenderungan mempunyai pendapatan lebih tinggi. Oleh karena itu perlu adanya prioritas dalam kebijakan yang dibuat khususnya untuk petani dengan pendidikan rendah dan petani perempuan.

Petani pengguna lahan, petani yang mendapatkan bantuan, petani yang mendapatkan penyuluhan, petani yang menjadi anggota kelompok tani dan petani yang memanfaatkan koperasi cenderung mempunyai pendapatan yang lebih besar. Sehingga perlu upaya untuk mengaktifkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertanian dan menunjang pertanian seperti kelompok tani, koperasi tani, bank tani, dan sebagainya sehingga petani mempunyai akses terhadap informasi dan meminimalisir hambatan dan kerugian.

Rumah tangga yang mempunyai kesulitan terhadap sarana prasarana produksi cenderung mempunyai pendapatan lebih rendah oleh karena perlu ada identifikasi hambatan sarana dan prasarana produksi sehingga bantuan atau hibah dapat disalurkan dalam bentuk sarana dan prasarana produksi. Kebijakan subsidi pupuk, subsidi bahan bakar khusus bagi nelayan, serta subsidi benih mempunyai peran yang strategis dalam peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Dilihat nilai koefisien determinasi yang rendah yang mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang sangat menentukan variasi pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian. Dari hasil *indept study* diperoleh informasi bahwa faktor utama yang sangat mempengaruhi penghasilan petani adalah stabilitas harga hasil pertanian dan sarana produksi serta stabilitas ketersediaan sarana prasarana produksi seperti pupuk bagi petani pangan dan bahan bakar bagi nelayan. Penetapan harga di tingkat penjual terhadap bahan-bahan dan barang-barang yang merupakan sarana dan prasarana produksi sangat diharapkan oleh petani, demikian juga terjaminnya stok pupuk dan pestisida pada saat dibutuhkan.

Pengaturan terhadap pedagang pengumpul serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang hasil pertanian sangat penting sehingga kerugian petani akibat anjloknya harga hasil pertanian dapat ditekan. Rendahnya harga hasil pertanian dapat disebabkan karena panjangnya rantai perdagangan untuk sampai ke tangan konsumen. Untuk memperpendek rantai

tersebut dapat dibentuk pos-pos seperti koperasi yang dapat digunakan untuk menjual hasil pertanian, dengan harga yang menguntungkan petani.

Terlepas dari besarnya skala usaha pertanian yang dimiliki, petani pada umumnya merupakan usaha yang relatif kecil dibandingkan dengan partner dagangnya, sehingga petani pada umumnya memiliki posisi rebut tawar yang lemah. Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar ini bahkan dapat berkembang menjadi kekuatan penyeimbang dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani. Selain itu, karakter sektor pertanian yang secara geographis tersebar menyebabkan hanya sedikit kalangan petani yang berlokasi dekat dengan pasar. Hal ini juga menyebabkan rendahnya kemampuan petani menjangkau berbagai alternatif pembeli.

6

RUMAH TANGGA PERTANIAN DAN ANCAMAN KEMISKINAN



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 6. RUMAH TANGGA PERTANIAN DAN ANCAMAN KEMISKINAN



Berdasarkan hasil ST2013-SPP, persentase RTUP yang mempunyai pendapatan utama dari sektor pertanian lebih miskin multidimensi dibandingkan dengan yang mempunyai pendapatan utama dari sektor non pertanian

6.1. Tanaman Pangan Sang Primadona

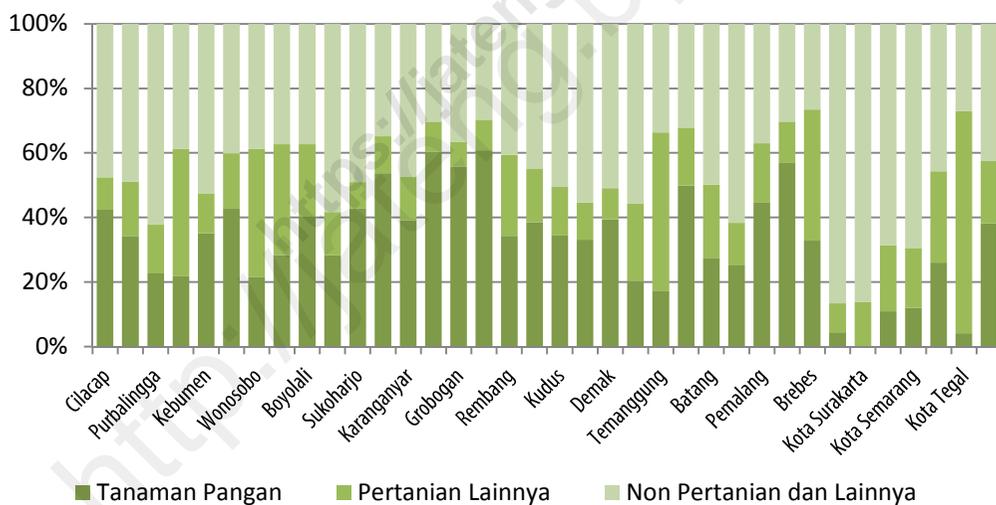
Jawa Tengah, sebagaimana halnya provinsi lain di Indonesia merupakan daerah agraris. Kesuburan tanah, lahan pertanian yang masih luas, sederhana dan mudah dalam pengerjaan menjadikan sektor pertanian secara turun temurun menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk di daerah pedesaan.

Sektor Pertanian di Jawa Tengah merupakan salah satu sektor andalan, dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap perekonomian Jawa Tengah yaitu sebesar 18,3 persen pada tahun 2013. Kontribusi tersebut didominasi hampir 70 persen dari tanaman pangan. Tanaman pangan menjadi primadona bagi para petani dengan memiliki persentase tertinggi sumber pendapatan utama rumah tangga usaha pertanian sebesar 38,22 persen (ST2013-SPP). Harga jual yang relatif stabil dan mudahnya pemasaran, serta digunakan sebagai konsumsi rumah tangga sehari-hari menjadi daya tarik para petani untuk mengusahakan tanaman pangan. Sektor tanaman hortikultura menjadi sektor terfavorit kedua setelah tanaman pangan dengan memiliki persentase sumber pendapatan utama rumah tangga usaha pertanian sebesar 7,47 persen.

Petani dengan lahan cukup luas cenderung untuk mengusahakan tanaman perkebunan. Hasil panen yang kontinu dengan harga jual yang stabil menjadi keunggulan sektor ini. Persentase sumber pendapatan utama petani terkecil adalah jasa pertanian. Modal awal dalam pengadaan alat pertanian sebagai sarana jasa pertanian yang cukup tinggi, permintaan pasar menjadikan sektor ini memiliki persentase sumber pendapatan utama rumah tangga usaha pertanian terkecil. Menarik untuk dikaji ulang bahwa persentase rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama non pertanian malah menempati persentase tertinggi sebesar 38,66 persen. Petani dengan lahan kecil, ataupun melakukan usaha pertanian dengan sistem bagi hasil merasakan hasil yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga ini disiasi petani bekerja pada lapangan usaha sektor non pertanian, ataupun dibantu bekerja oleh anggota rumah tangganya (istri dan anak) ternyata memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan usaha di sektor pertanian.

Dominasi rumah tangga usaha tanaman pangan dijumpai di hampir semua wilayah Jawa Tengah, kecuali kabupaten/kota yang berkarakteristikan industri dan perdagangan seperti perkotaan.

Gambar 6.1. Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013



Petani di Jawa Tengah tidak bisa dikatakan hidup serba kecukupan apabila mengandalkan dari usaha pertanian saja. Hasil ST2013-SPP memperlihatkan RTUP yang pendapatan utama dari usaha pertanian sebagian hanya cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan tidak sedikit yang mengaku kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa, kurang dari 1 persen RTUP yang merasa tingkat kecukupan dari usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah sangat berlebih. Hal ini terjadi pada semua RTUP baik yang berpendapatan utama dari sektor pertanian maupun non pertanian. Dari sisi kecukupan ini, rumah tangga yang pendapatan utama dari usaha tanaman pangan termasuk yang paling tinggi dibandingkan usaha pertanian lainnya maupun non pertanian.

Sebagian besar RTUP merasa pendapatannya cukup kecuali yang pendapatannya utamanya dari sector non pertanian dan lainnya. Persentase yang merasa cukup berkisar antara 52 persen sampai 62 persen, terbesar dialami oleh RTUP yang pendapatan utama dari usaha hortikultura, sebaliknya yang pendapatan utama dari jasa pertanian mempunyai persentase paling sedikit.

RTUP yang merasa pendapatannya kurang dan sangat kurang paling besar dialami rumah tangga yang pendapatan utama dari jasa pertanian dan berikutnya dari usaha peternakan mencapai 43,40 persen dan 41,57 persen. Sementara usaha hortikultura masih merupakan usaha yang paling handal dibandingkan usaha pertanian lainnya, dimana hanya 30,22 persen RTUP yang merasa kurang atau sangat kurang.

Tabel 6.1. Persentase RTUP Menurut Kecukupan Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan	Tingkat Kecukupan				
	Sangat Berlebih	Lebih Dari Cukup	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sektor Pertanian	0,28	4,51	59,43	32,15	3,62
Tanaman Pangan	0,31	4,21	59,68	32,15	3,64
Hortikultura	0,27	6,26	62,25	29,30	1,92
Perkebunan	0,21	3,88	58,29	33,42	4,20
Peternakan	0,21	3,94	54,28	36,37	5,20
Perikanan	0,08	6,04	61,67	29,35	2,86
Kehutanan	0,28	5,76	56,74	32,06	5,17
Jasa Pertanian	0,00	3,65	52,94	36,37	7,03
Non Pertanian	0,29	3,40	37,34	48,47	10,51
Lainnya	0,39	4,14	34,24	46,87	14,35

Berapapun besar kecilnya persentase tingkat kecukupan yang dialami RTUP, yang jelas masih cukup banyak hasil pertanian belum bisa memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangganya. Berdasarkan *indepth interview* yang dilakukan terhadap RTUP di beberapa kabupaten, meskipun secara matematis hasil pendapatan dari sector pertanian tidak mencukupi kebutuhan mereka, namun mereka merasa tidak kurang. Sambil menunggu musim panen tiba mereka akan

mencari pekerjaan srabutan dan sebagian kebutuhan makanan tidak membelinya tapi diambil dari pekarangan atau saling memberi dengan tetangga. Kondisi ini kemungkinan juga dirasakan oleh sebagian besar RTUP di Jawa dimana kehidupan kekerabatan yang masih kental dan jarak antara tetangga dan sanak saudara berdekatan sehingga membuat 'kondisi aman'. Seperti pepatah Jawa '*mangan ora mangan ngumpul*' artinya meskipun tidak bisa makan atau hidup cukup namun dengan hidup berdekatan akan merasa nyaman.

6.2. Tingkat dan Intensitas Kemiskinan Petani

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan didasarkan pada data kemiskinan baik secara makro maupun mikro. Untuk mengukur kemiskinan, BPS selama ini menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran konsumsi.

Selain pengukuran kemiskinan berdasarkan konsumsi, ada pengukuran kemiskinan dari sisi lain. Untuk memperkaya kajian kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin bisa menggunakan angka Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) IKM adalah indikator yang mengukur kekurangan (*deprivation*) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dimensi pendidikan ditentukan oleh 2 indikator yaitu (1). tidak memiliki anggota keluarga telah menyelesaikan pendidikan SMP dan (2). memiliki minimal satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah. Dimensi kesehatan juga terdiri dari 2 indikator yaitu (1). memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kurang gizi dan (2). memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia. Dimensi standar hidup terdiri dari 6 indikator yaitu (1). tidak memiliki listrik; (2). tidak memiliki akses air minum; (3). tidak memiliki akses sanitasi yang memadai; (4). menggunakan bahan bakar memasak dari arang dan kayu bakar; (5). memiliki rumah dengan lantai tanah; dan (6). tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu dari barang berikut: sepeda, perahu, radio, kulkas atau televisi.

Setiap orang diberi skor sesuai dengan kekurangan rumahtangganya menurut 10 indikator yang membentuknya dan yang tidak mengalami kekurangan diberi skor 0. Skor maksimum adalah 100 persen sehingga masing-masing dimensi memiliki penimbang yang sama, yaitu 33,3 persen. Dimensi pendidikan dan kesehatan masing-masing memiliki dua indikator, sehingga setiap komponen memiliki penimbang sebesar 16,7 persen. Sementara dimensi standar hidup memiliki 6 indikator atau setiap indikator memiliki penimbang sebesar 5,6 persen .

Untuk mengidentifikasi kemiskinan rumahtangga secara multidimensi, skor dari 10 komponen indikator untuk setiap rumah tangga dijumlahkan. Sebuah *cut off point* sebesar 33,3 persen yang setara dengan sepertiga dari indikator tertimbang digunakan untuk membedakan antara rumah tangga yang miskin dan tidak miskin secara multidimensi.

- Jika $c \leq 33,3$ %, maka rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga tidak dianggap miskin multidimensi
- Jika $c > 33$ %, maka rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga dianggap miskin multidimensi.
- Jika $c > 50$ %, maka rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga dianggap sangat miskin multidimensi
- Jika $20 \% \leq c < 33,3$ %, maka rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga dianggap rentan miskin multidimensi

Tabel 6.2. Indikator Kemiskinan Multidimensi RTUP, Jawa Tengah, 2013

Indikator Kemiskinan	Persentase
RTUP Miskin	19,88
Penduduk Miskin	15,95
Intensitas Kemiskinan	37,29
IKM	5,95

Hasil ST2013-SPP menunjukkan dari sisi rumah tangga, RTUP yang terkategori miskin multidimensi sebesar 19,88 persen. Sedangkan dari sisi penduduk dalam RTUP, penduduk dalam RTUP yang terkategori miskin hanya 15,95 persen, artinya rata-rata jumlah anggota rumah tangga dari RTUP yang miskin lebih besar daripada yang tidak miskin (Tabel 6.2).

Jika diamati menurut sumber pendapatan utama, persentase RTUP yang mempunyai pendapatan utama dari sektor pertanian lebih miskin multidimensi dibandingkan dengan yang mempunyai pendapatan utama dari sektor non pertanian. Hal ini ditunjukkan persentase miskin multidimensi sumber pendapatan utama sektor pertanian sebesar 26,53 persen dibandingkan non pertanian sebesar 11,59 persen. Bisa dipahami, RTUP yang sumber pendapatan utama non pertanian mempunyai pendapatan ganda sehingga jauh lebih bisa mencukupi dibandingkan dengan RTUP yang mengandalkan dari pertanian.

Melihat lebih jauh sumber pendapatan utama dari sektor pertanian, RTUP paling miskin multidimensi dari usaha kehutanan disusul perkebunan masing-masing 33,30 persen kemudian 30,87 persen. Kedua usaha ini merupakan usaha pertanian yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk memetik hasilnya. Sementara RTUP yang pendapatannya dari usaha perikanan paling sedikit kemiskinan multidimensinya, hanya sebesar 9,20 persen (Tabel 6.3).

Tabel 6.3. Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan	Kategori Kemiskinan (C)			
	< 20%	20% - 33,3%	33,4-50%	>50%
Sektor Pertanian	50,72	28,76	25,56	0,96
Tanaman Pangan	47,62	27,53	24,02	0,83
Hortikultura	49,52	27,51	21,94	1,03
Perkebunan	45,78	23,35	29,48	1,38
Kehutanan	40,47	26,23	32,12	1,18
Peternakan/Unggas	44,29	28,99	25,65	1,07
Perikanan	67,88	22,91	8,88	0,32
Jasa Pertanian	55,10	21,71	22,69	0,50
Non Pertanian	68,17	20,24	11,11	0,48
Lainnya	51,77	21,83	26,04	0,35

Meskipun kemiskinan multidimensi tidak secara langsung menggunakan pendapatan sebagai dasar penghitungan namun besar kecilnya pendapatan akan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan hidup. Secara umum semakin besar pendapatan rumah tangga akan semakin banyak kebutuhan hidup seperti konsumsi, pendidikan dan kesehatan yang bisa terpenuhi. Semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi semakin jauh dari kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, kemiskinan multidimensi banyak dijumpai pada RTUP yang mempunyai pendapatan kurang dari 1 juta sebulan. Pada kelompok pendapatan ini persentase kemiskinan multidimensi paling besar yaitu 35,82 persen. Sebaliknya RTUP yang mempunyai pendapatan lebih dari 3 juta hanya 2,26 persen yang tergolong miskin dimensi, bahkan lebih dari 85 persen masuk dalam kelompok tidak miskin (Tabel 6.4).

Tabel 6.4. Persentase RTUP Menurut Kelompok Pendapatan dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, Jawa Tengah 2013

Kategori Pendapatan	Kategori Kemiskinan (C)			
	< 20%	20% - 33,3%	33,4-50%	>50%
< 1 juta	34,21	29,96	34,75	1,07
1 - 2 juta	56,72	25,92	16,57	0,79
2 - 3 juta	73,61	19,06	7,01	0,32
> 3 juta	85,91	11,83	2,12	0,14

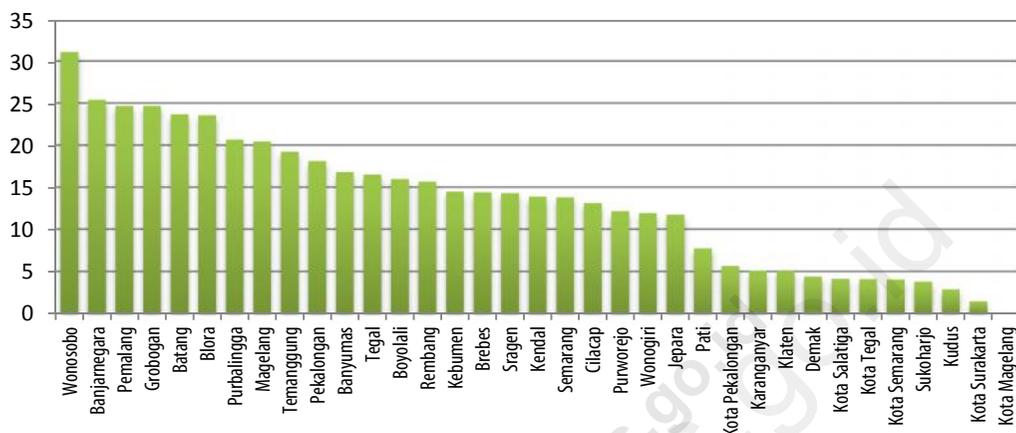
Sejalan dengan kategori pendapatan, luas lahan pertanian yang dikuasai juga mempengaruhi kemiskinan multidimensi. Semakin luas lahan pertanian yang dikuasai maka semakin sedikit rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin secara multidimensi. Tabel 6.5 menunjukkan bahwa RTUP yang menguasai lahan pertanian lebih dari 2,5 hektar hanya 5,29 persen rumah tangga yang tergolong miskin multidimensi. Sedangkan RTUP yang menguasai lahan pertanian 0,25 sampai dengan 0,49 hektar terdapat rumah tangga miskin multidimensi yang paling besar mencapai 22,77 persen. Sebaliknya RTUP yang tidak menguasai lahan persentase rumah tangga miskin multidimensi justru lebih kecil dibandingkan yang menguasai lahan 0,25 sampai dengan 0,49 hektar. Rumah tangga ini juga berusaha di bidang pertanian namun tidak menggunakan lahan dalam usahanya seperti jasa pertanian, perikanan tangkap dan pemungutan hasil hutan.

Tabel 6.5. Persentase RTUP Menurut Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, Jawa Tengah 2013

Kategori Lahan	Kategori Miskin Multidimensi			
	< 20%	20% - 33,3%	33,4-50%	>50%
Tidak Menguasai	53,88	24,59	20,81	0,71
< 0,25 Ha	52,66	24,57	22,00	0,77
0,25 - 0,49 Ha	56,60	24,50	18,27	0,63
0,50 - 0,99 Ha	60,95	23,91	14,40	0,74
1,00 - 2,49 Ha	67,34	22,26	9,74	0,65
> 2,5 Ha	80,80	13,90	4,83	0,46

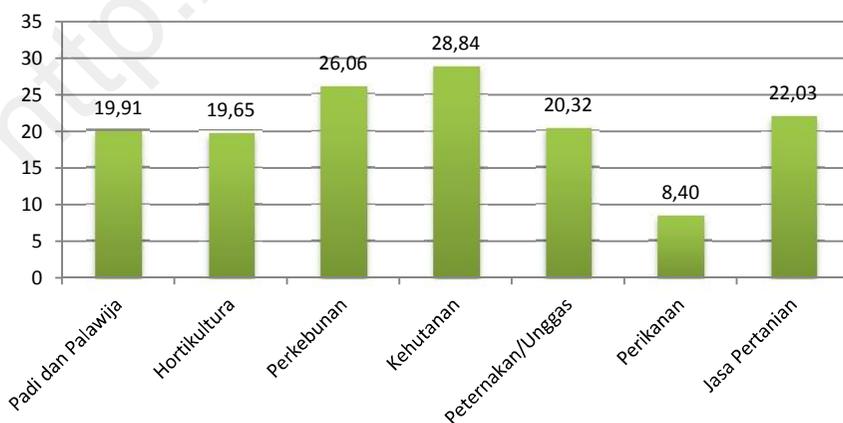
Berdasarkan hasil ST2013-SPP daerah yang paling banyak persentase penduduk miskin terdapat di wilayah bagian tengah seperti Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, Grobogan dan Batang. Wilayah ini dikenal juga dengan daerah paling banyak masyarakatnya yang menggantungkan hidup dari pertanian. Sementara, wilayah Jawa Tengah bagian timur, pantura dan perkotaan relatif mempunyai persentase penduduk miskin yang sedikit. Wilayah pantura sebagian besar RTUP berusaha pada perikanan tangkap dan budidaya di mana pada pembahasan sebelumnya RTUP yang berusaha di perikanan relatif kecil mengalami kemiskinan multidimensi sehingga persentase penduduk miskin multidimensi juga relatif sedikit. Sementara wilayah perkotaan selain tidak banyak RTUP, juga dimensi kesehatan dan pendidikan sudah relatif baik dibandingkan daerah pedesaan.

Gambar 6.2. Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013



Sejalan dengan kondisi RTUP miskin multidimensi, persentase penduduk miskin multidimensi mempunyai gambaran yang sama. Artinya, rata-rata anggota rumah tangga dilihat dari sumber pendapatan utama menurut subsektor relatif sama. Penduduk miskin yang tinggal dalam rumah tangga dengan pendapatan utama dari usaha kehutanan yang paling banyak miskinnya mencapai 28,84 persen, disusul perkebunan sebesar 26,06 persen. Sementara persentase penduduk miskin paling sedikit dijumpai pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan utama dari usaha perikanan (Gambar 6.3).

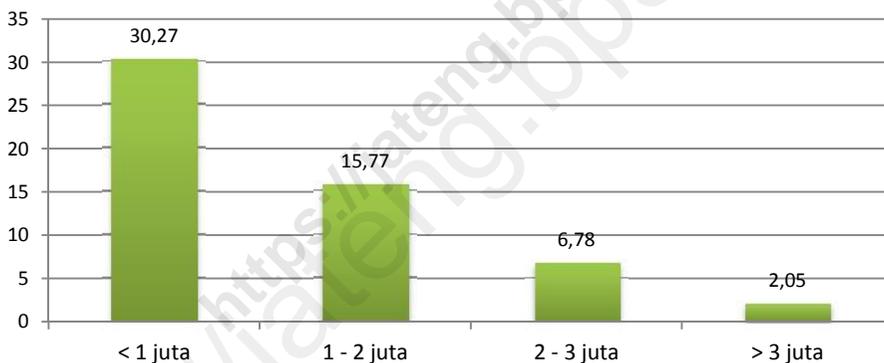
Gambar 6.3. Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013



Gambaran persentase penduduk miskin dirinci menurut kelompok pendapatan rumah tangga sejalan dengan gambaran rumah tangganya. Persentase penduduk miskin Multidimensi banyak berasal dari rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari 1 juta. Sebaliknya, penduduk miskin multidimensi yang berasal dari rumah tangga berpendapatan lebih dari 3 juta secara persentase paling kecil bahkan kurang dari seperlimabelas dibandingkan yang berpendapatan lebih dari 1 juta.

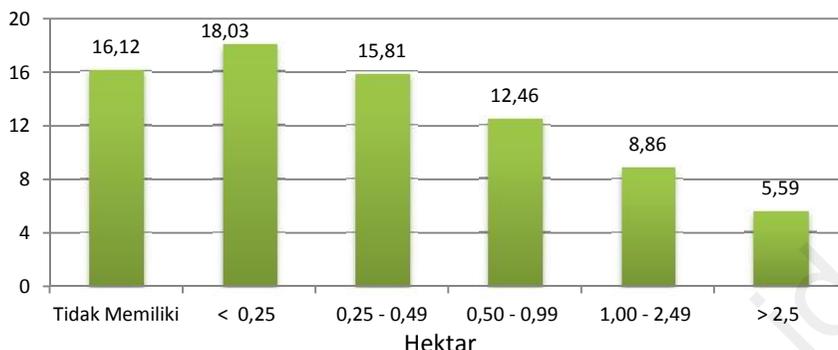
RTUP miskin multidimensi pada umumnya mempunyai anggota rumah tangga (anak) lebih banyak dari yang tidak miskin. Namun hal tersebut nampaknya tidak sepenuhnya benar untuk kemiskinan RTUP. Hal ini tergambar pada proporsi antara penduduk miskin dengan rumah tangga miskin menurut kelompok pendapatan. Semakin besar pendapatan maka proporsi penduduk miskin dengan rumah tangga miskin semakin besar. Artinya, RTUP miskin multidimensi yang berasal dari kelompok pendapatan paling kecil mempunyai rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang relatif kecil pula.

Gambar 6.4. Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013



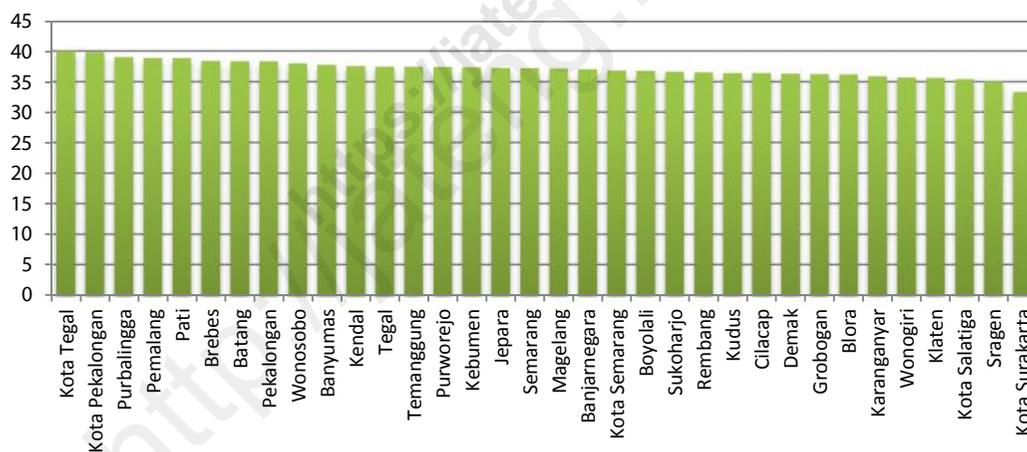
Sementara itu gambaran penduduk miskin multidimensi dilihat dari penguasaan lahan pertanian, nampak bahwa RTUP yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,25 Ha mempunyai persentase penduduk miskin multidimensi paling besar, mencapai 18,03 persen. Semakin luas lahan pertanian yang dikuasai RTUP maka semakin sedikit penduduk miskin multidimensi. Namun, berbeda dengan RTUP yang tidak menguasai lahan pertanian, justru persentase penduduk miskinnya lebih kecil dari yang menguasai lahan pertanian 0,25 Ha. Kondisi ini sama dengan RTUP yang miskin multidimensi (Gambar 6.5).

Gambar 6.5. Persentase Penduduk Miskin Multidimensi Menurut Luas Lahan yang Dikuasai RTUP, Jawa Tengah 2013



Selain banyaknya rumah tangga yang masuk dalam kelompok miskin, masalah kemiskinan multidimensi juga dihadapkan dengan intensitas kemiskinan atau rata-rata kekurangan dari orang miskin. Apabila diamati disparitas intensitas kemiskinan multidimensi menurut kabupaten/kota tidak banyak bervariasi atau hampir sama berkisar antara 33-40 persen.

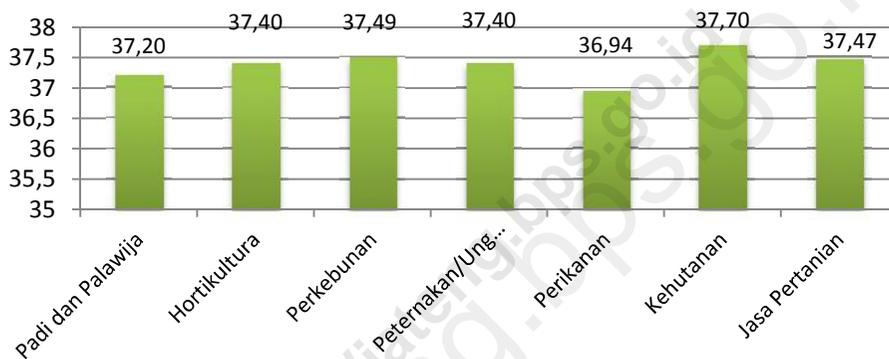
Gambar 6.6. Rata-rata Kekurangan RTUP Miskin Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013



Daerah yang persentase RTUP maupun penduduk miskin multidimensi kecil tidak berarti intensitasnya kecil pula. Gambar 6.6 memperlihatkan bahwa Kota Tegal dan Kota Pekalongan meskipun persentase penduduk miskinnya kecil namun mempunyai intensitas kemiskinan yang paling besar berturut-turut 40,06 persen dan 39,81 persen. Artinya, rata-rata penduduk miskin Kota Tegal dan Kota Pekalongan mengalami kekurangan terhadap dimensi kemiskinan sebesar 40,06 persen dan 39,81 persen dari indikator yang digunakan. Sebaliknya, Kabupaten Wonosobo yang mempunyai RTUP maupun penduduk miskin yang paling besar namun intensitas kemiskinan kurang dari 38 persen.

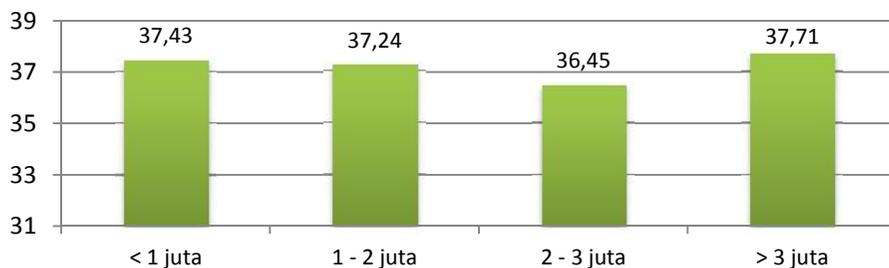
Bila dilihat menurut sumber pendapatan utama RTUP, intensitas kemiskinan multidimensi sejalan dengan persentase RTUP maupun penduduk miskinnya. Intensitas kemiskinan tertinggi dijumpai pada RTUP yang pendapatan utama dari usaha kehutanan 37,70 persen. Ini menunjukkan bahwa RTUP yang pendapatan utama dari usaha kehutanan mengalami kekurangan multidimensi terbanyak. Sementara, intensitas kemiskinan multidimensi paling sedikit berasal dari RTUP yang pendapatannya dari usaha perikanan 36,94 persen. Meskipun demikian secara umum, intensitas kemiskinan multidimensi menurut pendapatan utama antara subsektor pertanian tidak jauh berbeda.

Gambar 6.7. Rata-rata Kekurangan RTUP Miskin Multidimensi Menurut Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013



Rata-rata kekurangan RTUP miskin multidimensi dilihat dari sisi tingkat pendapatan rumah tangga, menunjukkan fakta yang cukup menarik. Dimana, rata-rata kekurangan RTUP miskin tertinggi dialami oleh rumah tangga yang pendapatannya kurang dari 3 juta. Meskipun kelompok pendapatan ini memiliki persentase RTUP maupun penduduk miskin multidimensi yang paling sedikit. Sementara rata-rata kekurangan RTUP miskin yang paling kecil justru terdapat pada kelompok pendapatan rumah tangga 2 sampai dengan 3 juta. Namun secara umum rata-rata kekurangan RTUP miskin menurut kelompok pendapatan relatif sama berkisar antara 36 sampai dengan 37 persen.

Gambar 6.8. Rata-rata Kekurangan RTUP Miskin Multidimensi Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013



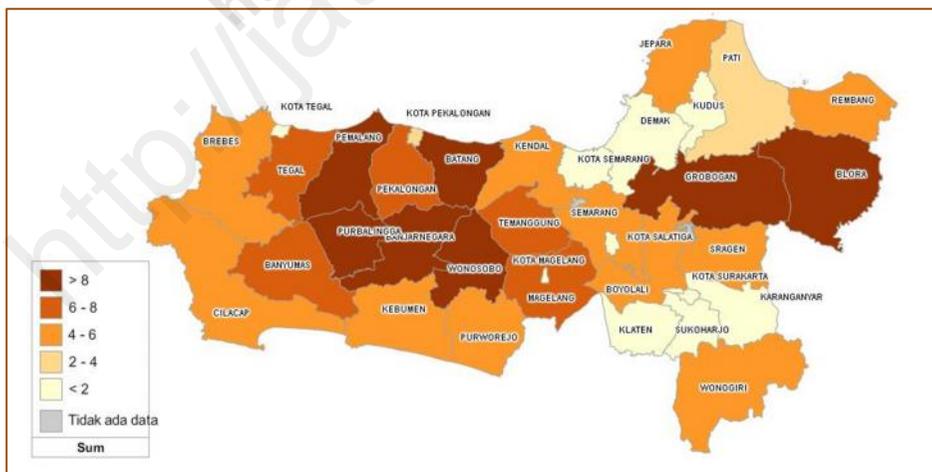
6.3. Kemiskinan Multidimensi Rumah Tangga Pertanian

Dengan menggunakan pengukuran kemiskinan multidimensi selain diperoleh persentase RTUP miskin, persentase penduduk miskin dan rata-rata kekurangan kemiskinan diperoleh juga gambaran kemiskinan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan hidup layak. Semakin besar nilai indeksnya maka semakin besar penduduk yang mengalami kemiskinan dari tiga dimensi tersebut.

Sebaran kemiskinan multidimensi kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan hasil ST2013-SPP dapat dilihat pada Gambar 6.9. Daerah sepanjang pantura mulai dari Kabupaten Brebes sampai Rembang memiliki variasi tingkat kemiskinan multidimensi yang bervariasi. Daerah dengan kemiskinan yang tinggi terlihat pada petadengen warna gelap. Wilayah tersebut terbentang membentuk huruf U yaitu Kabupaten Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Batang dan Wonosobo dan di wilayah timur meliputi Kabupaten Grobogan dan Blora. Di sisi lain, wilayah perkotaan dan Kabupaten Demak, Kudus, Klaten, Sukoharjo dan Karanganyar merupakan daerah dengan kemiskinan multidimensi yang paling kecil.

Dengan memetakan kemiskinan multidimensi, harapannya akan diperoleh kantong-kantong kemiskinan multidimensi. Dengan catatan kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut lebih disebabkan karena kekurangan multidimensi meliputi kekurangan pendidikan layak, kekurangan kesehatan layak dan kekurangan standar hidup layak. Dengan demikian program dan kebijakan mengurangi kemiskinan bisa dilakukan sesuai dengan kondisi sosial dan kultural daerah tersebut, sehingga diharapkan akan lebih efektif dan tepat sasaran.

Gambar 6.9. Peta Kemiskinan Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013



7

KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 7. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN



Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah adalah 85,85 yang berarti Provinsi Jawa Tengah mempunyai ketahanan pangan yang tinggi

Ketahanan pangan merupakan suatu faktor utama dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan rumah tangga mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi ketersediaan pangan, dimensi keterjangkauan/akses pangan, serta dimensi pemanfaatan pangan. Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah dilakukan pendekatan dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Pada bab ini akan mengulas tentang indeks ketahanan pangan Jawa Tengah menggunakan data ST2013-SPP. Karena keterbatasan variabel data, indeks ketahanan pangan didekati dengan melakukan skoring pada jawaban-jawaban dalam kuesioner. Skor ketahanan pangan selanjutnya dipetakan menurut kabupaten/kota dan dikaitkan dengan sumber pendapatan utama, pendapatan dari sektor pertanian, dan luas lahan yang dikuasai RTUP.

7.1. Kekhawatiran Akan Kekurangan Pangan

Kekurangan pangan dalam rumah tangga sebagian besar diduga terjadi karena minimnya pendapatan rumah tangga sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan makanannya. Sumber pendapatan RTUP berasal dari beberapa sektor sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni oleh anggota rumah tangganya. Sebagian RTUP bahkan tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhannya pada hasil dari sektor pertanian saja.

Tabel 7.1 memperlihatkan persentase rumah tangga usaha pertanian menurut dimensi ketersediaan pangan. Dimensi ketersediaan pangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu Tidak Mempunyai Cukup Persediaan Pangan, Mengalami Kekurangan Pangan, dan Merasa Takut Kekurangan Pangan. Pada rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya adalah sektor pertanian terdapat 12,05 persen rumah tangga yang merasa takut kekurangan pangan, rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan sebanyak 2,9 persen dan ada sebesar 17,29 persen yang tidak mempunyai cukup persediaan pangan.

Persentase rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan terbesar adalah rumah tangga yang berusaha pada jasa pertanian, yaitu 5,06 persen dan subsektor perikanan, yaitu 5,02 persen. Sementara itu pada subsektor perkebunan jumlah rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan adalah paling kecil, yaitu 1,91 persen. Persentase rumah tangga yang tidak mempunyai cukup persediaan pangan terbesar adalah rumah tangga yang berusaha di subsektor kehutanan, yaitu 23,78 persen. Meskipun persentase kecukupan rumah tangga terhadap ketersediaan pangan rendah, dan ketakutan kekurangan pangan cukup tinggi, namun mereka tidak terlalu mengalami kekurangan pangan, ditunjukkan dengan persentase sebesar 3,28 persen.

Tabel 7.1. Persentase RTUP Menurut Dimensi Ketersediaan Pangan, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Dimensi Ketersediaan Pangan		
	Tidak Mempunyai Cukup Persediaan Pangan	Mengalami Kekurangan Pangan	Merasa Takut Kekurangan Pangan
Sektor Pertanian	17,29	2,90	12,05
Padi dan Palawija	16,10	2,85	12,01
Hortikultura	22,20	2,51	11,11
Perkebunan	17,31	1,91	11,78
Peternakan	18,29	3,96	12,55
Perikanan	14,35	5,02	15,68
Kehutanan	23,78	3,28	14,44
Jasa Pertanian	15,38	5,06	9,89
Sektor Non Pertanian	18,99	1,88	8,90
Lainnya	21,11	2,61	9,40
Jumlah	17,80	2,64	11,21

Rumah tangga yang menggantungkan sumber pendapatan utama di sektor non pertanian mempunyai ketersediaan pangan yang relatif baik. Persentase rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan dan persentase yang merasa takut kekurangan pangan lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang sumber pendapatannya di sektor pertanian, yaitu 1,88 persen dan 8,90 persen. Meskipun mereka tidak terlalu mengalami kekurangan pangan dan tidak takut kekurangan pangan, namun mereka relatif tidak mempunyai cukup persediaan pangan, 18,99 persen.

Kecenderungan RTUP yang berpendapatan utama sektor non pertanian tidak memiliki cukup persediaan pangan dikarenakan pendapatan atau upah dari pekerjaan non pertanian relatif lebih cepat diterima/dinikmati dibandingkan pendapatan dari pertanian.

Salah satu faktor tingginya tingkat ketersediaan pangan pada RTUP adalah kebiasaan RTUP untuk menyisihkan sebagian hasil pertaniannya untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangganya hingga waktu panen yang akan datang. Sebagian RTUP menjual seluruh hasilnya dan membeli kebutuhan pokok sebagai persediaan pangan untuk beberapa waktu (musim). Pola stok bahan pokok demikian menyebabkan tingkat ketersediaan pangan dalam rumah tangga relatif tinggi. Di sisi lain, rumah tangga yang pendapatan utama dari subsektor perikanan dan jasa pertanian perlu perhatian lebih, mengingat persentase rumah tangga yang kekurangan pangan relatif tinggi.

7.2. Petani Jawa Tengah Mampu Menjangkau dan Memanfaatkan Pangan

Dimensi kedua dari ketahanan pangan adalah dimensi keterjangkauan atau akses pangan. Akses pangan merupakan akses sumber daya individu atau rumah tangga untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudahan akses terhadap pangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pangan yang tidak diproduksi di daerah setempat, kesulitan menjangkau lokasi pembelian, serta kesulitan rumah tangga yang disebabkan harga pembelian yang tinggi.

Tabel 7.2 memperlihatkan persentase rumah tangga usaha pertanian menurut dimensi keterjangkauan pangan. Persentase RTUP yang sumber pendapatan utama dari pertanian mempunyai kesulitan akses pangan yang dikarenakan pangan tidak diproduksi di kecamatan setempat sebanyak 7,83 persen, kesulitan menjangkau lokasi pembelian sebesar 1,02 persen, dan harga pembelian yang tinggi sebesar 14,08 persen.

Tabel 7.2. Persentase RTUP Menurut Dimensi Keterjangkauan Pangan, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Dimensi Keterjangkauan Pangan		
	Pangan Tidak Diproduksi di Kecamatan	Kesulitan Menjangkau Lokasi Pembelian	Harga Pembelian Tinggi
Sektor Pertanian	7,83	1,02	14,08
Padi dan Palawija	6,32	0,73	12,60
Hortikultura	10,34	1,12	15,67
Perkebunan	13,05	2,12	17,28
Pternakan	7,92	1,58	14,50
Perikanan	17,85	2,26	24,38
Kehutanan	9,01	1,84	22,61
Jasa Pertanian	9,22	1,05	18,64
Sektor Non Pertanian	8,47	1,08	16,94
Lainnya	9,60	0,80	15,54
Jumlah	8,03	1,03	14,82

Rendahnya persentase rumah tangga yang kesulitan menjangkau lokasi mengindikasikan sudah baiknya sarana dan prasarana transportasi. Sehingga meskipun sebagian besar pangan tidak diproduksi di kecamatan setempat, pemenuhan kebutuhan pangan masih dapat dengan mudah diakses. Sementara itu persentase rumah tangga yang mengalami kesulitan akses karena faktor harga pembelian yang tinggi lebih kecil dibandingkan dengan RTUP yang bersumber non pertanian. Mengindikasikan bahwa kemampuan rumah tangga pertanian dari sisi daya beli relatif cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan nilai tukar petani yang di atas 100. Namun demikian masih dibutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah setempat untuk meningkatkan nilai tukar petani demi terjangkaunya akses terhadap pangan.

RTUP yang sumber pendapatan utama dari usaha perikanan mengalami keterjangkauan pangan yang paling sulit. Dari aspek pangan tidak diproduksi di kecamatan setempat, kesulitan menjangkau lokasi pembelian dan harga pembelian tinggi memiliki persentase yang paling besar, yaitu 17,85 persen, 2,26 persen, dan 24,38 persen. RTUP yang berusaha di perikanan biasanya hidup di daerah pesisir untuk perikanan tangkap dan tambak sehingga wajar mengalami kesulitan keterjangkauan pangan.

Dimensi ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Penggunaan atas bahan pangan yang cukup, air bersih, sanitasi, dan pemeliharaan kesehatan merupakan aspek-aspek dalam dimensi memanfaatkan pangan. Dari hasil SPP2013 ada 4 hal yang berkaitan dengan pemanfaatan pangan oleh RTUP, yaitu keberadaan balita yang kurang gizi, keberadaan balita yang meninggal karena sakit, penggunaan sumber air minum dari air sungai, hujan, dan lainnya, serta penggunaan sumber air utama memasak dari dari sungai, hujan dan lainnya.

Tabel 7.3 terlihat bahwa di Jawa Tengah, persentase RTUP yang terdapat balita kurang gizi sebanyak 0,34 persen, persentase rumah tangga yang mengalami kematian balita sebanyak 0,27 persen, yang menggunakan air sungai/hujan/lainnya untuk minum dan untuk memasak adalah 1,54 persen dan 1,70 persen.

Persentase rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya sektor pertanian yang terdapat balita kurang gizi sebanyak 0,30 persen, sementara itu pada rumah tangga non pertanian lebih besar, yaitu 0,43 persen. Pada rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya adalah sektor pertanian, terdapat 0,27 persen yang mengalami balita meninggal karena sakit, sementara pada rumah tangga sektor non pertanian lebih kecil, yaitu 0,25 persen.

Tabel 7.3. Persentase RTUP Menurut Dimensi Pemanfaatan Pangan, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Pemanfaatan Pangan			
	Ada Balita yang Kurang Gizi	Ada Balita yang Meninggal Karena Sakit	Sumber Air Minum dari Air Sungai/Hujan/Lainnya	Sumber Air Utama Masak Dari Air Sungai/Hujan/Lainnya
Sektor Pertanian	0,30	0,27	1,69	1,87
Padi dan Palawija	0,30	0,29	1,45	1,69
Hortikultura	0,17	0,21	2,73	2,62
Perkebunan	0,39	0,35	1,54	1,57
Peternakan	0,42	0,18	1,79	2,07
Perikanan	0,40	0,07	2,41	2,75
Kehutanan	0,48	0,47	2,26	2,35
Jasa Pertanian	0,02	0,00	0,77	1,04
Sektor Non Pertanian	0,43	0,25	1,14	1,23
Lainnya	0,40	0,31	1,28	1,32
Jumlah	0,34	0,27	1,54	1,70

Pada rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya sektor pertanian terdapat 1,69 persen rumah tangga yang sumber air minumannya dari air sungai, hujan dan lainnya, lebih tinggi dari pada rumah tangga yang pendapatan utamanya non pertanian (1,14 persen). Demikian juga penggunaan air sungai/hujan/lainnya untuk memasak pada rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya pertanian lebih tinggi dari pada yang pendapatan utama non pertanian, yaitu 1,87 persen disbanding 1,23 persen.

Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa pada rumah tangga dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian relatif lebih mempunyai kecukupan gizi, ini dilihat dari lebih kecilnya persentase balita yang kurang gizi. Akan tetapi dari faktor sanitasi dan pemeliharaan kesehatan pada rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya sektor pertanian cenderung lebih rendah, ini terlihat dari lebih tingginya persentase balita yang meninggal dan lebih tingginya penggunaan air sungai, air hujan dan lainnya sebagai sumber air minum dan memasak.

Pengamatan lebih jauh menurut subsektor, terlihat bahwa RTUP yang mempunyai pendapatan utama dari jasa pertanian lebih memahami bagaimana pemanfaatan pangan. Hal ini ditunjukkan dari keempat aspek pemanfaatan pangan mempunyai nilai paling kecil.

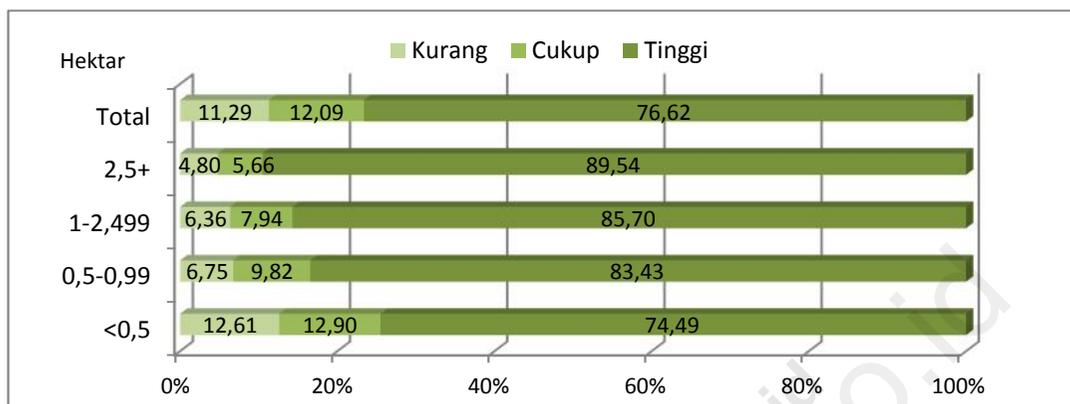
mengindikasikan bahwa RTUP yang sumber pendapatan utamanya sektor pertanian cenderung mempunyai ketahanan pangan tinggi terutama pada subsektor padi dan palawija.

Tabel 7.4. Persentase RTUP Menurut Kategori Ketahanan Pangan, Jawa Tengah 2013

Sumber Pendapatan Utama	Kategori Ketahanan Pangan		
	Kurang Tahan	Tahan pangan Cukup	Tahan Pangan Tinggi
Sektor Pertanian	10,56	12,31	77,13
Padi dan Palawija	9,22	11,08	79,70
Hortikultura	9,80	16,12	74,08
Perkebunan	16,56	14,37	69,07
Peternakan	17,82	15,07	67,11
Perikanan	13,66	10,31	76,03
Kehutanan	13,75	21,56	64,69
Jasa Pertanian	15,67	14,97	69,36
Sektor Non Pertanian	12,24	11,68	76,08
Lainnya	12,70	13,02	74,28
Jumlah	11,29	12,09	76,62

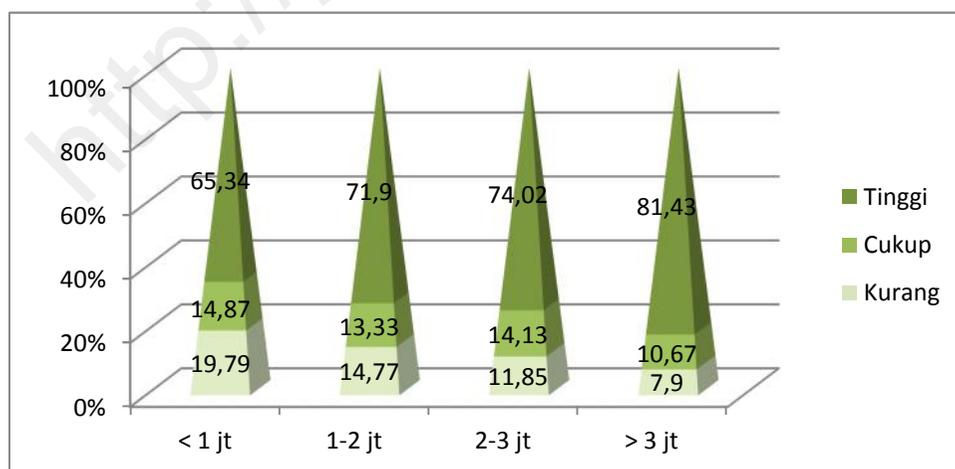
Tingkat penguasaan lahan oleh RTUP berbeda-beda tergantung pada kemampuan masing-masing rumah tangga tersebut. Sebagian besar RTUP di Jawa Tengah mempunyai lahan kurang dari setengah hektar, yaitu sekitar 78 persen. [Gambar 7.2](#) memperlihatkan persentase RTUP menurut luas lahan yang dikuasai dan kategori ketahanan pangan Jawa Tengah. Pada rumah tangga yang menguasai 2,5 hektar atau lebih, terdapat 4,80 persen rumah tangga yang tingkat ketahanan pangannya kurang. Persentase ini semakin meningkat seiring dengan semakin sempitnya lahan yang dikuasai. Hingga pada rumah tangga yang hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar terdapat 12,61 persen rumah tangga yang tingkat ketahanan pangan kurang. Ini mengindikasikan bahwa persentase rumah tangga yang mempunyai penguasaan lahan lebih luas cenderung mempunyai ketahanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang penguasaan lahan sempit.

Gambar 7.2. Persentase RTUP menurut Luas Lahan yang Dikuasai dan Kategori Ketahanan Pangan, Jawa Tengah 2013



Gambar 7.3 memperlihatkan persentase RTUP menurut luas lahan yang dikuasai dan kategori ketahanan pangan. Terdapat 11,29 persen rumah tangga pertanian di Jawa Tengah yang dikategorikan mempunyai ketahanan pangan kurang, 12,09 persen yang mempunyai ketahanan pangan cukup dan 76,62 persen yang mempunyai ketahanan pangan tinggi. Jika dilihat dari golongan pendapatan masing-masing rumah tangga petani, petani dengan pendapatan kurang dari 1 juta ada 19,79 persen yang kurang tahan pangan, sementara untuk rumah tangga petani yang pendapatannya antara 1 sampai dengan 2 juta ada 14,77 persen yang kurang tahan pangan. Dan pada rumah tangga dengan pendapatan 3 juta atau lebih, hanya 7,90 rumah tangga yang kurang tahan pangan. Demikian sebaliknya pada kategori rumah tangga dengan ketahanan pangan tinggi terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga semakin tinggi pula persentase rumah tangga yang mempunyai ketahanan pangan tinggi.

Gambar 7.3. Persentase RTUP Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Kategori Ketahanan Pangan, Jawa Tengah 2013



8

KESIMPULAN



<http://jateng.bps.go.id>

BAB 8. KESIMPULAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang turut memegang peranan cukup besar bagi perekonomian Jawa Tengah. Sektor ini, menyumbang lebih dari 18 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan berada pada urutan kedua penyumbang terbesar setelah sektor industri pengolahan. Meskipun sektor pertanian belum mampu memberikan kesejahteraan seperti yang diharapkan oleh petani namun sektor ini menjadi sandaran hidup sebagian besar masyarakat Jawa Tengah, lebih dari 30 persen tenaga kerja bekerja di sektor ini.

Ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat besar, hampir seluruh kegiatan perekonomian kita berpusat di sektor ini, maka pembangunan sektor pertanian sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Melalui Sensus Pertanian 2013 disajikan gambaran pertanian yang dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan pertanian ke depan. Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian telah dilaksanakan kegiatan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (ST2013-SPP) yang merupakan kelanjutan kegiatan ST2013.

Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian adalah masih rendahnya tingkat pendidikan petani. Lebih dari 78 persen petani berpendidikan hanya sampai dengan jenjang Sekolah Dasar, persentase ini menurun 5 persen jika dibandingkan tahun 2003. Mereka yang bekerja pada sektor pertanian adalah mereka yang “tidak mampu bersaing” di sektor non pertanian. Dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit bagi petani untuk menyerap pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan produktivitas usaha pertaniannya termasuk jika harus berhubungan dengan teknologi informasi.

Selain masih rendahnya pendidikan petani, usaha pertanian juga dihadapkan dengan persoalan pengelolanya. Sebagian besar usaha pertanian dilakukan oleh petani tua. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata umur petani di Jawa Tengah berkisar 50 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kondisi fisik yang sudah tidak sekuat pada saat usia muda menyebabkan usaha pertanian tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Selain itu, petani tua cenderung sulit untuk menerima perubahan teknologi dan inovasi terkait usaha pertaniannya.

Sementara itu, usaha pertanian yang dilakukan oleh RTUP rata-rata berskala kecil. Dari sisi lahan, lebih dari 78 RTUP merupakan petani gurem atau rata-rata menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Dari sisi pekerja, rata-rata yang mengelola usaha pertanian hanya 1 orang dari 3-4 anggota rumah tangga. Rata-rata usaha pertanian ini dibantu tenaga kerja tidak dibayar atau pekerja keluarga. Sebanyak 30 persen anggota rumah tangga mereka merupakan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar di bidang pertanian.

Berbagai permasalahan yang dihadapi usaha pertanian berdampak pada produktivitas sektor pertanian. Produktivitas sektor pertanian yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, kinerja usaha pertanian juga jauh dari kata kemakmuran. Hal ini tercermin dari rata-rata seluruh pendapatan RTUP sekitar 1,83 juta per bulan yang diperoleh dari pertanian hanya sebesar 889,47 ribu per bulan dan selebihnya dari non pertanian. Ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pertanian sangat kecil, sehingga RTUP masih harus mencari penghasilan tambahan di luar pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Permasalahan lain usaha pertanian adalah masalah kepemilikan dan mutasi lahan. Berdasarkan ST2013-SPP dari RTUP yang memiliki lahan dan melakukan mutasi lahan dengan cara menjual sebagian besar didorong oleh faktor ekonomi sekitar 62 persen. Hal ini menunjukkan ada ketidak berdayaan RTUP untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga terpaksa harus menjual lahannya.

Untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan, maka akses RTUP terhadap sumber daya modal harus dibuka secara luas. Dari ST2013-SPP, RTUP yang memperoleh fasilitas kredit sebagian besar mempunyai pendapatan lebih dari 3 juta perbulan, sementara yang berpendapatan sampai 3 juta hanya sekitar 17 persen. Meskipun pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal bagi usaha pertanian, namun petani kurang memanfaatkan fasilitas tersebut. Dengan alasan tidak memiliki agunan dan proses administrasi kredit yang rumit sehingga mereka lebih banyak memakai modal sendiri. Yang dikhawatirkan adalah jika para petani lebih cenderung menggunakan modal pinjaman dari tengkulak atau rentenir dengan bunga cenderung tinggi.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah masalah masih minimnya RTUP terhadap akses kelembagaan. Kurang dari 30 persen RTUP yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian dan sekitar 37 persen yang menjadi anggota kelompok tani bahkan kurang dari 5 persen yang memanfaatkan fasilitas koperasi. Yang juga perlu digaris bawahi tentang akses kelembagaan adalah apakah RTUP kurang memanfaatkan atau ketiadaan lembaga tersebut di wilayah RTUP tinggal.

Tantangan kemiskinan pada RTUP tidak hanya pada banyaknya petani yang miskin secara ekonomi namun miskin lebih luas lagi miskin dari dimensi pendidikan, kesehatan dan hidup layak. Kemiskinan banyak dimensi bisa juga diukur dari angka Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). RTUP yang pendapatan utamanya dari sektor pertanian cenderung lebih rentan miskin dibandingkan yang berpendapatan utama dari non pertanian. Bahkan, RTUP yang pendapatan utamanya dari sektor pertanian memiliki kemiskinan multidimensi lebih dari dua kali lipat dibandingkan RTUP yang berpendapatan utama dari non pertanian.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan multidimensional adalah pendapatan rumah tangga dan luas lahan pertanian yang dikelola. Semakin besar pendapatan dan semakin luas lahan pertanian yang dikelola maka semakin sedikit RTUP mengalami kemiskinan multidimensi.

Ketahanan pangan suatu wilayah dapat diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Nilai IKP Jawa Tengah berada pada kelompok yang nilainya tinggi dibandingkan di luar Jawa. Artinya wilayah Jawa Tengah mempunyai ketahanan pangan yang baik. IKP berhubungan dengan ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan. Sementara, sebagian tanaman pangan dihasilkan di Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah hal ini yang menyebabkan ketahanan pangan provinsi ini cukup tinggi.

Ketahanan pangan di seluruh wilayah Jawa Tengah secara umum sudah terwujud, dengan diperolehnya nilai IKP yang tinggi. Namun demikian yang masih harus diwujudkan adalah ketahanan pangan berkelanjutan agar kebutuhan pangan untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya akan terus terpenuhi. Serta predikat Jawa Tengah sebagai umbung padi dan penyangga pangan nasional akan tetap disandang. Diperlukan kerjasama dari semua pihak dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar semua harapan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA



<https://jateng.bps.go.id>
<http://jateng.bps.go.id>

Daftar Pustaka

1. BPS Provinsi Jawa Tengah. "Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012".
2. BPS Provinsi Jawa Tengah. "Tinjauan PDRB Jawa Tengah 2013".
3. BPS Provinsi Jawa Tengah. Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah 2013".
4. Dr. Setia Hadi, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, LPPM, IPB. Konversi Lahan dan Petani Gurem.
5. Dr. Ir. Lukman M Baga, MA.Ec, Pengajar Program Pasca Sarjana: Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Kelembagaan Petani.
6. <http://jatengprov.go.id/id/video/kartu-bbm-nelayan-diresmikan-tak-hanya-berijaminan-solar>. Diunduh 4 November 2014.
7. <https://gemaniiasbarat.wordpress.com/2010/01/17/kriteria-dan-batasan-orang-miskin-di-indonesia>. Diunduh 5 november 2014.
8. <http://bappedajateng.info/dok-perencanaan/4-undangan/64-rancangan-rpjmd-jawa-tengah-2013-2018.html>. Diunduh 11 November 2014
9. <http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-konsep-tentang-kesejahteraan.html>. Diunduh 6 November 2014.
10. <http://forda-mof.org/files>/Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Penyadap Pinus di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah (*Socio-economic Characteristics Affecting Household Income of Pine Gum Taper: Case study in Somagede, Kebumen, and Central Java*). Diunduh tanggal 3 November 2014.
11. http://forda-mof.org/files/aktor-faktor_yang_mempengaruhi_petani_penyadap_pinus.pdf. *Factors that Influence Farmers to Tap Pine in KHDTK Gombong*. Diunduh 3 November 2014
12. Eka Hardiana, Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2009. Analisis Jalur Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
13. <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Ketahanan-Pangan-Rumah-Tangga-Petani-Penghasil-Beras-Organik.pdf>. Jurnal Gizi dan Pangan, November 2007. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Penghasil Beras Organik. (*Household Food Security of Farmers who Yielding Organic Rice*). Diunduh 3 November 2014.

<http://jateng.bps.go.id>

LAMPIRAN



<http://jateng.bps.go.id>

Lampiran 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2003 dan 2013

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RumahTangga)	
	2003	2013
(1)	(2)	(3)
Kab. Cilacap	337.205	253.449
Kab. Banyumas	270.632	202.578
Kab. Purbalingga	161.578	125.314
Kab. Banjarnegara	180.550	156.652
Kab. Kebumen	254.552	215.624
Kab. Purworejo	170.780	143.750
Kab. Wonosobo	151.763	142.593
Kab. Magelang	230.515	191.211
Kab. Boyolali	207.497	170.529
Kab. Klaten	220.525	125.617
Kab. Sukoharjo	121.214	68.170
Kab. Wonogiri	233.496	202.143
Kab. Karanganyar	152.168	104.739
Kab. Sragen	193.095	142.187
Kab. Grobogan	316.691	264.144
Kab. Blora	196.192	170.299
Kab. Rembang	126.432	108.399
Kab. Pati	266.991	189.987
Kab. Kudus	106.874	51.359
Kab. Jepara	198.132	113.050
Kab. Demak	199.825	131.474
Kab. Semarang	167.354	130.385
Kab. Temanggung	135.777	123.246
Kab. Kendal	164.010	109.637
Kab. Batang	121.153	92.179
Kab. Pekalongan	131.847	77.230
Kab. Pemalang	203.480	134.231
Kab. Tegal	179.536	105.854
Kab. Brebes	283.531	214.227
Kota Magelang	2.465	1.114
Kota Surakarta	2.660	1.104
Kota Salatiga	13.592	5.977
Kota Semarang	44.616	17.638
Kota Pekalongan	8.111	1.834
Kota Tegal	15.962	2.695
Jawa Tengah	5.770.801	4.290.619

Sumber: Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Lampiran 2. Persentase RTUP Pengguna Lahan yang Menguasai Lahan Pertanian Kurang Dari 0,5 Ha Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian (persen)
(1)	(2)
Kab. Cilacap	80,16
Kab. Banyumas	84,39
Kab. Purbalingga	83,44
Kab. Banjarnegara	75,22
Kab. Kebumen	90,24
Kab. Purworejo	82,13
Kab. Wonosobo	76,45
Kab. Magelang	87,09
Kab. Boyolali	85,38
Kab. Klaten	88,37
Kab. Sukoharjo	81,08
Kab. Wonogiri	75,42
Kab. Karanganyar	82,84
Kab. Sragen	80,44
Kab. Grobogan	80,68
Kab. Blora	66,42
Kab. Rembang	60,27
Kab. Pati	65,67
Kab. Kudus	75,19
Kab. Jepara	77,81
Kab. Demak	72,37
Kab. Semarang	75,78
Kab. Temanggung	67,10
Kab. Kendal	75,16
Kab. Batang	76,11
Kab. Pekalongan	78,83
Kab. Pemasang	80,47
Kab. Tegal	73,03
Kab. Brebes	79,47
Kota Magelang	97,76
Kota Surakarta	100,00
Kota Salatiga	91,37
Kota Semarang	77,89
Kota Pekalongan	61,65
Kota Tegal	78,39
Jawa Tengah	78,45

Lampiran 3. Persentase Kepala Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Rumah Tangga Usaha Pertanian (Persen)	
	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Kab. Cilacap	90,05	9,95
Kab. Banyumas	89,70	10,30
Kab. Purbalingga	91,49	8,51
Kab. Banjarnegara	92,91	7,09
Kab. Kebumen	87,72	12,28
Kab. Purworejo	85,53	14,47
Kab. Wonosobo	91,43	8,57
Kab. Magelang	90,31	9,69
Kab. Boyolali	88,95	11,05
Kab. Klaten	90,18	9,82
Kab. Sukoharjo	88,68	11,32
Kab. Wonogiri	87,38	12,62
Kab. Karanganyar	91,37	8,63
Kab. Sragen	87,83	12,17
Kab. Grobogan	86,22	13,78
Kab. Blora	91,11	8,89
Kab. Rembang	89,51	10,49
Kab. Pati	84,77	15,23
Kab. Kudus	89,71	10,29
Kab. Jepara	90,32	9,68
Kab. Demak	87,98	12,02
Kab. Semarang	89,32	10,68
Kab. Temanggung	92,90	7,10
Kab. Kendal	88,86	11,14
Kab. Batang	89,01	10,99
Kab. Pekalongan	88,86	11,14
Kab. Pemasang	90,59	9,41
Kab. Tegal	89,14	10,86
Kab. Brebes	91,97	8,03
Kota Magelang	91,13	8,87
Kota Surakarta	94,44	5,56
Kota Salatiga	91,56	8,44
Kota Semarang	92,38	7,62
Kota Pekalongan	91,30	8,70
Kota Tegal	94,09	5,91
Jawa Tengah	89,33	10,67

**Lampiran 4. Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Usaha Pertanian
Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata ART
(1)	(2)
Kab. Cilacap	3,69
Kab. Banyumas	3,58
Kab. Purbalingga	4,10
Kab. Banjarnegara	3,90
Kab. Kebumen	3,63
Kab. Purworejo	3,30
Kab. Wonosobo	3,55
Kab. Magelang	3,79
Kab. Boyolali	3,45
Kab. Klaten	3,47
Kab. Sukoharjo	3,65
Kab. Wonogiri	3,47
Kab. Karanganyar	3,88
Kab. Sragen	3,27
Kab. Grobogan	3,18
Kab. Blora	3,41
Kab. Rembang	3,49
Kab. Pati	3,36
Kab. Kudus	4,13
Kab. Jepara	3,70
Kab. Demak	3,62
Kab. Semarang	3,79
Kab. Temanggung	3,86
Kab. Kendal	3,52
Kab. Batang	3,76
Kab. Pekalongan	4,22
Kab. Pemasang	3,89
Kab. Tegal	3,79
Kab. Brebes	3,64
Kota Magelang	3,84
Kota Surakarta	3,78
Kota Salatiga	3,97
Kota Semarang	3,88
Kota Pekalongan	4,61
Kota Tegal	3,93
Jawa Tengah	3,62

**Lampiran 5. Rasio Ketergantungan RTUP Menurut Kabupaten/Kota,
Jawa Tengah 2013**

Kabupaten/Kota	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)
Kab. Cilacap	49,94
Kab. Banyumas	51,62
Kab. Purbalingga	50,76
Kab. Banjarnegara	47,88
Kab. Kebumen	55,28
Kab. Purworejo	52,64
Kab. Wonosobo	52,14
Kab. Magelang	46,59
Kab. Boyolali	48,38
Kab. Klaten	49,42
Kab. Sukoharjo	53,49
Kab. Wonogiri	51,66
Kab. Karanganyar	47,26
Kab. Sragen	50,75
Kab. Grobogan	46,97
Kab. Blora	48,31
Kab. Rembang	41,08
Kab. Pati	44,05
Kab. Kudus	40,02
Kab. Jepara	47,20
Kab. Demak	40,92
Kab. Semarang	46,56
Kab. Temanggung	45,94
Kab. Kendal	45,24
Kab. Batang	44,32
Kab. Pekalongan	48,42
Kab. Pemasang	54,12
Kab. Tegal	52,94
Kab. Brebes	45,82
Kota Magelang	51,75
Kota Surakarta	34,65
Kota Salatiga	41,82
Kota Semarang	36,41
Kota Pekalongan	37,37
Kota Tegal	41,86
Jawa Tengah	48,41

Lampiran 6. Persentase ART Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Pendidikan ART		
	Tidak Sekolah/SD	SMP/SMA	Di Atas SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	74,85	23,41	1,74
Kab. Banyumas	72,61	25,26	2,13
Kab. Purbalingga	76,06	21,51	2,43
Kab. Banjarnegara	79,06	19,42	1,52
Kab. Kebumen	72,53	25,66	1,81
Kab. Purworejo	63,79	32,93	3,29
Kab. Wonosobo	83,54	15,15	1,31
Kab. Magelang	71,13	26,87	2,00
Kab. Boyolali	68,17	29,26	2,57
Kab. Klaten	60,41	35,48	4,11
Kab. Sukoharjo	65,11	31,52	3,37
Kab. Wonogiri	73,93	24,32	1,75
Kab. Karanganyar	67,35	29,62	3,03
Kab. Sragen	73,19	24,69	2,12
Kab. Grobogan	75,47	23,17	1,37
Kab. Blora	78,48	20,05	1,47
Kab. Rembang	72,27	26,44	1,29
Kab. Pati	71,99	26,44	1,57
Kab. Kudus	63,94	33,46	2,60
Kab. Jepara	68,52	29,74	1,74
Kab. Demak	68,39	29,57	2,04
Kab. Semarang	70,19	27,61	2,21
Kab. Temanggung	76,09	22,84	1,08
Kab. Kendal	70,93	26,78	2,29
Kab. Batang	77,78	20,68	1,54
Kab. Pekalongan	80,17	17,92	1,91
Kab. Pemasang	84,12	14,67	1,21
Kab. Tegal	78,74	19,89	1,36
Kab. Brebes	79,19	19,43	1,39
Kota Magelang	45,18	53,07	1,75
Kota Surakarta	64,71	28,68	6,62
Kota Salatiga	61,15	34,86	3,99
Kota Semarang	61,15	35,11	3,74
Kota Pekalongan	76,26	22,64	1,10
Kota Tegal	76,61	20,49	2,90
Jawa Tengah	73,48	24,58	1,94

Lampiran 7. Persentase ART Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Utama, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Kegiatan Utama			
	Berusaha di Sektor Pertanian	Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	Buruh/Pegawai/Karyawan/ Pekerja Bebas di Sektor Pertanian	Buruh/Pegawai/Karyawan/ Pekerja Bebas di Luar Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	32,86	27,73	14,71	15,66
Kab. Banyumas	33,07	24,44	10,27	17,98
Kab. Purbalingga	29,26	20,51	12,38	24,9
Kab. Banjarnegara	39,64	42,25	12,97	17,29
Kab. Kebumen	40,23	38,82	14,48	17,43
Kab. Purworejo	35,41	31,31	15,87	14,77
Kab. Wonosobo	33,85	30,37	15,82	15,96
Kab. Magelang	33,04	36,91	11,86	18,74
Kab. Boyolali	32,52	30,54	12,34	22,05
Kab. Klaten	34,64	28,83	8,08	23,77
Kab. Sukoharjo	31,64	30,36	10,67	24,92
Kab. Wonogiri	34,15	40,73	12,87	15,41
Kab. Karanganyar	32,74	27,73	13,81	21,18
Kab. Sragen	34,95	27,79	20,55	16,06
Kab. Grobogan	40,73	37,91	17,75	18,93
Kab. Blora	36,12	38,36	21,07	15,91
Kab. Rembang	34,54	32,19	20,83	17,49
Kab. Pati	35,38	21,24	19,19	17,44
Kab. Kudus	29,27	18,95	10,91	34,29
Kab. Jepara	30,85	21,87	12,15	28,44
Kab. Demak	29,83	21,16	14,86	22,89
Kab. Semarang	35,8	26,18	11,59	25,35
Kab. Temanggung	30,22	41,96	11,22	15,09
Kab. Kendal	34,8	33,97	20,35	18,96
Kab. Batang	37,58	25,66	12,38	16,42
Kab. Pekalongan	33,15	31,41	16,05	21,8
Kab. Pemalang	30,96	23,27	11,53	12,63
Kab. Tegal	36,22	30,78	20,58	11,93
Kab. Brebes	31,49	27,41	23,94	13,22
Kota Magelang	30,6	4,47	1,93	34,22
Kota Surakarta	29,51	27,87	0	38,52
Kota Salatiga	33,23	14,59	2,96	34,89
Kota Semarang	32,69	15,07	5,05	32,57
Kota Pekalongan	25,59	8,59	3,54	26,94
Kota Tegal	27,22	16,67	6,89	13,44
Jawa Tengah	34,22	30,53	14,95	18,56

Lampiran 8. Jumlah Petani Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Petani	
	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Kab. Cilacap	229.404	51.811
Kab. Banyumas	182.251	45.367
Kab. Purbalingga	116.762	25.614
Kab. Banjarnegara	159.024	58.596
Kab. Kebumen	193.384	90.759
Kab. Purworejo	125.556	36.398
Kab. Wonosobo	135.193	25.745
Kab. Magelang	179.296	52.263
Kab. Boyolali	150.086	30.899
Kab. Klaten	113.126	24.978
Kab. Sukoharjo	58.412	16.323
Kab. Wonogiri	175.951	55.012
Kab. Karanganyar	97.971	26.715
Kab. Sragen	122.722	33.278
Kab. Grobogan	222.685	86.597
Kab. Blora	154.422	44.312
Kab. Rembang	97.698	24.225
Kab. Pati	162.072	47.907
Kab. Kudus	45.909	11.365
Kab. Jepara	100.956	18.711
Kab. Demak	112.565	24.039
Kab. Semarang	118.947	46.425
Kab. Temanggung	116.230	19.513
Kab. Kendal	98.072	22.443
Kab. Batang	86.634	32.468
Kab. Pekalongan	70.276	25.036
Kab. Pemasang	118.720	34.328
Kab. Tegal	94.214	37.522
Kab. Brebes	196.932	32.165
Kota Magelang	1.066	124
Kota Surakarta	1.023	93
Kota Salatiga	5.690	2.032
Kota Semarang	16.344	4.632
Kota Pekalongan	1.781	195
Kota Tegal	2.497	198
Jawa Tengah	3.863.871	1.088.088

Lampiran 9. Jumlah RTUP Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Pendapatan ART, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Sumber Pendapatan ART				
	Usaha Pertanian Saja	Usaha Pertanian dan Buruh Pertanian	Usaha di Luar Pertanian	Buruh di Luar Pertanian	Usaha di Luar Pertanian dan Buruh di Luar Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	33.353	24.276	92.051	165.315	60.909
Kab. Banyumas	28.133	12.801	84.505	134.976	57.110
Kab. Purbalingga	8.939	7.869	50.508	97.898	39.476
Kab. Banjarnegara	22.647	12.364	47.551	109.670	34.632
Kab. Kebumen	28.567	15.209	93.244	139.126	59.666
Kab. Purworejo	26.845	12.669	53.810	83.602	32.890
Kab. Wonosobo	17.966	13.450	55.874	92.566	36.822
Kab. Magelang	27.867	15.400	57.734	129.002	38.214
Kab. Boyolali	32.857	16.893	37.348	107.168	23.479
Kab. Klaten	21.569	7.838	44.261	80.662	28.524
Kab. Sukoharjo	12.310	4.415	18.649	46.149	13.259
Kab. Wonogiri	46.843	21.894	52.456	111.569	29.891
Kab. Karanganyar	13.193	8.980	33.867	72.216	22.961
Kab. Sragen	25.850	24.032	39.725	76.150	23.498
Kab. Grobogan	47.761	29.338	67.470	160.395	40.003
Kab. Blora	25.256	19.835	36.154	110.077	20.922
Kab. Rembang	12.068	15.685	27.184	70.601	17.023
Kab. Pati	23.215	28.122	57.821	118.624	37.078
Kab. Kudus	2.993	3.245	15.923	41.001	11.699
Kab. Jepara	12.742	9.301	28.151	84.078	20.791
Kab. Demak	17.517	14.200	35.877	89.104	24.896
Kab. Semarang	16.215	5.838	41.825	95.690	28.374
Kab. Temanggung	9.054	4.256	75.980	83.779	49.666
Kab. Kendal	14.216	13.541	32.995	70.374	21.778
Kab. Batang	8.461	9.560	40.581	60.905	27.009
Kab. Pekalongan	5.307	6.346	31.450	57.912	23.370
Kab. Pemasang	24.014	12.955	32.361	84.831	19.592
Kab. Tegal	14.368	18.874	33.992	60.919	22.052
Kab. Brebes	26.696	31.838	56.150	134.221	34.025
Kota Magelang	125	25	546	841	421
Kota Surakarta	62	0	558	992	496
Kota Salatiga	598	113	1.997	4.898	1.506
Kota Semarang	1.989	534	5.322	13.512	3.912
Kota Pekalongan	117	13	546	1.508	390
Kota Tegal	407	99	1.012	1.760	671
Jawa Tengah	610.120	421.808	1.385.478	2.792.091	907.005

**Lampiran 10. Rata-rata Pendapatan RTUP
Menurut Kabupaten dan Sumber Pendapatan Utama, Jawa Tengah 2013**

Kabupaten/Kota	Sumber Pendapatan Utama	
	Pertanian	Bukan Pertanian
(1)	(2)	(3)
Kab. Cilacap	8.285,62	12.181,34
Kab. Banyumas	9.128,46	12.554,50
Kab. Purbalingga	6.754,31	16.443,06
Kab. Banjarnegara	11.359,88	8.897,76
Kab. Kebumen	7.585,51	11.686,63
Kab. Purworejo	10.813,46	11.546,21
Kab. Wonosobo	11.059,37	10.288,75
Kab. Magelang	12.280,69	8.893,78
Kab. Boyolali	11.668,54	10.660,93
Kab. Klaten	7.340,86	16.785,88
Kab. Sukoharjo	12.027,26	14.471,17
Kab. Wonogiri	10.159,95	8.840,20
Kab. Karanganyar	12.084,43	14.413,35
Kab. Sragen	11.674,83	8.721,56
Kab. Grobogan	8.631,96	7.665,80
Kab. Blora	10.676,88	7.711,92
Kab. Rembang	14.998,44	11.261,59
Kab. Pati	13.087,85	13.048,03
Kab. Kudus	13.988,73	19.223,59
Kab. Jepara	10.362,35	15.504,45
Kab. Demak	9.563,25	14.385,44
Kab. Semarang	11.010,15	16.572,18
Kab. Temanggung	13.354,41	8.507,22
Kab. Kendal	13.961,13	9.401,20
Kab. Batang	10.356,94	15.631,60
Kab. Pekalongan	8.736,93	17.190,44
Kab. Pemasang	8.451,14	7.853,42
Kab. Tegal	12.911,74	7.299,18
Kab. Brebes	13.909,47	7.298,87
Kota Magelang	3.181,72	35.225,53
Kota Surakarta	5.081,56	24.597,47
Kota Salatiga	8.712,08	21.651,99
Kota Semarang	9.560,31	24.714,52
Kota Pekalongan	14.446,62	10.988,12
Kota Tegal	22.824,96	10.574,91
Jawa Tengah	10.673,65	11.335,00

**Lampiran 11. Persentase RTUP Menurut Kabupaten/Kota,
Sumber Pendapatan Utama dan Status Pekerjaan, Jawa Tengah 2013**

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Sumber Pendapatan Utama						
	Pertanian			Bukan Pertanian			
	Berusaha	Bekerja	Berusaha dan Bekerja	Berusaha	Bekerja	Berusaha dan Bekerja	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Cilacap	44,47	7,75	0	20	23	0	5
Kab. Banyumas	45,60	5,49	0	18,59	25,26	0	5,07
Kab. Purbalingga	29,27	8,35	0,18	22,26	35,18	0,04	4,72
Kab. Banjarnegara	52,11	9,09	0,04	11,21	23,55	0,16	3,84
Kab. Kebumen	42,65	4,39	0,26	22,13	24,05	0	6,53
Kab. Purworejo	53,87	5,86	0,13	14,43	20,37	0	5,35
Kab. Wonosobo	49,36	11,73	0,22	15,33	19,75	0	3,61
Kab. Magelang	56,19	6,31	0,25	12,21	22,65	0	2,38
Kab. Boyolali	56,40	6,02	0,27	10,89	24,6	0	1,82
Kab. Klaten	36,07	5,62	0	18,28	35,76	0,05	4,23
Kab. Sukoharjo	44,60	6,43	0	13,5	28,17	0	7,3
Kab. Wonogiri	61,67	3,47	0	11,33	18,29	0	5,23
Kab. Karanganyar	43,42	8,72	0,4	16,66	26,89	0	3,9
Kab. Sragen	62,67	6,74	0,28	11,71	14,76	0	3,84
Kab. Grobogan	60,25	3,05	0,16	10,82	23,52	0	2,19
Kab. Blora	64,89	4,89	0,52	7,53	20,45	0	1,72
Kab. Rembang	46,50	12,73	0,26	13,57	24,33	0	2,62
Kab. Pati	44,22	10,65	0,17	14,94	22,55	0	7,48
Kab. Kudus	39,43	10,04	0	14,12	35,57	0	0,84
Kab. Jepara	34,51	10,01	0,14	11,39	42,87	0	1,08
Kab. Demak	43,42	5,36	0,28	12,06	35,61	0	3,26
Kab. Semarang	37,80	6,28	0,19	13,77	36,07	0	5,88
Kab. Temanggung	61,91	4,27	0,15	14	16,36	0	3,3
Kab. Kendal	59,44	8,33	0,08	11,89	17,06	0	3,21
Kab. Batang	36,50	13,46	0,21	18,99	27,77	0	3,07
Kab. Pekalongan	25,99	12,35	0	22,22	34,79	0	4,65
Kab. Pemalang	52,48	10,53	0	13,74	19,67	0	3,58
Kab. Tegal	57,35	12,07	0,31	14,76	13,57	0	1,94
Kab. Brebes	58,28	14,94	0,23	11,28	14,3	0	0,98
Kota Magelang	11,20	2,24	0	22,31	50,81	0	13,44
Kota Surakarta	13,89	0,00	0	27,78	58,33	0	0
Kota Salatiga	29,28	2,21	0	16,57	48,54	0	3,39
Kota Semarang	25,66	4,88	0	13,95	52,18	0	3,34
Kota Pekalongan	53,62	0,72	0	10,14	32,61	0	2,9
Kota Tegal	69,62	2,95	0,42	15,61	10,13	0	1,27
Jawa Tengah	49,69	7,65	0,18	14,47	24,19	0,01	3,82

Lampiran 12. Persentase RTUP Menurut Kabupaten dan *Share* Pendapatan Dari Sektor Pertanian, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	<i>Share</i> Pendapatan Dari Sektor Pertanian		
	<25%	25%-50%	>50%
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	49,33	23,26	27,40
Kab. Banyumas	52,88	22,08	25,03
Kab. Purbalingga	60,12	25,27	14,61
Kab. Banjarnegara	46,80	24,81	28,40
Kab. Kebumen	45,04	30,34	24,62
Kab. Purworejo	34,67	24,46	40,87
Kab. Wonosobo	47,64	21,77	30,59
Kab. Magelang	46,74	22,75	30,50
Kab. Boyolali	41,04	23,49	35,46
Kab. Klaten	50,28	25,11	24,62
Kab. Sukoharjo	50,37	22,54	27,09
Kab. Wonogiri	34,45	25,39	40,15
Kab. Karanganyar	44,04	27,29	28,66
Kab. Sragen	31,27	24,17	44,56
Kab. Grobogan	37,17	22,40	40,43
Kab. Blora	48,96	24,30	26,74
Kab. Rembang	42,37	26,12	31,51
Kab. Pati	46,09	23,07	30,84
Kab. Kudus	71,45	13,21	15,35
Kab. Jepara	59,04	18,13	22,83
Kab. Demak	39,00	23,44	37,56
Kab. Semarang	46,64	24,96	28,41
Kab. Temanggung	35,79	25,38	38,83
Kab. Kendal	38,43	25,13	36,44
Kab. Batang	46,54	28,52	24,94
Kab. Pekalongan	65,38	19,29	15,34
Kab. Pemalang	47,42	19,69	32,89
Kab. Tegal	43,47	26,88	29,65
Kab. Brebes	45,50	20,65	33,85
Kota Magelang	86,65	8,87	4,48
Kota Surakarta	63,89	27,78	8,33
Kota Salatiga	71,13	17,25	11,62
Kota Semarang	66,72	17,88	15,39
Kota Pekalongan	40,58	22,46	36,96
Kota Tegal	34,18	20,25	45,57
Jawa Tengah	45,44	23,74	30,82

**Lampiran 13. Rata-Rata Pendapatan Per Kapita RTUP
Menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Pendapatan Perkapita
(1)	(2)
Kab. Cilacap	5.545,06
Kab. Banyumas	6.059,26
Kab. Purbalingga	5.652,18
Kab. Banjarnegara	5.189,66
Kab. Kebumen	5.303,96
Kab. Purworejo	6.775,84
Kab. Wonosobo	6.010,56
Kab. Magelang	5.584,41
Kab. Boyolali	6.470,27
Kab. Klaten	6.955,69
Kab. Sukoharjo	7.260,01
Kab. Wonogiri	5.477,40
Kab. Karanganyar	6.826,36
Kab. Sragen	6.228,22
Kab. Grobogan	5.131,33
Kab. Blora	5.394,35
Kab. Rembang	7.533,10
Kab. Pati	7.787,75
Kab. Kudus	8.046,05
Kab. Jepara	6.994,80
Kab. Demak	6.624,46
Kab. Semarang	7.276,45
Kab. Temanggung	5.669,32
Kab. Kendal	6.642,60
Kab. Batang	6.910,01
Kab. Pekalongan	6.141,41
Kab. Pemasang	4.187,29
Kab. Tegal	5.329,55
Kab. Brebes	5.830,63
Kota Magelang	9.998,25
Kota Surakarta	7.856,21
Kota Salatiga	7.654,38
Kota Semarang	8.828,71
Kota Pekalongan	5.518,86
Kota Tegal	8.493,31
Jawa Tengah	6.086,95

Lampiran 14. Persentase Penduduk Miskin (*Headcount*), Intensitas Kemiskinan dan Indeks Kemiskinan Multidimensi Pada RTUP menurut Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Intensitas Kemiskinan	Indeks Kemiskinan Multidimensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	13,10	36,41	4,77
Kab. Banyumas	16,80	37,79	6,35
Kab. Purbalingga	20,65	39,06	8,07
Kab. Banjarnegara	25,39	37,07	9,41
Kab. Kebumen	14,47	37,39	5,41
Kab. Purworejo	12,15	37,40	4,54
Kab. Wonosobo	31,06	37,99	11,80
Kab. Magelang	20,44	37,19	7,60
Kab. Boyolali	15,98	36,80	5,88
Kab. Klaten	5,03	35,64	1,79
Kab. Sukoharjo	3,79	36,64	1,39
Kab. Wonogiri	11,94	35,70	4,26
Kab. Karanganyar	5,12	35,89	1,84
Kab. Sragen	14,29	35,07	5,01
Kab. Grobogan	24,66	36,28	8,95
Kab. Blora	23,57	36,21	8,53
Kab. Rembang	15,68	36,51	5,72
Kab. Pati	7,74	38,91	3,01
Kab. Kudus	2,87	36,45	1,05
Kab. Jepara	11,74	37,27	4,38
Kab. Demak	4,38	36,35	1,59
Kab. Semarang	13,79	37,23	5,13
Kab. Temanggung	19,21	37,46	7,20
Kab. Kendal	13,87	37,57	5,21
Kab. Batang	23,67	38,38	9,09
Kab. Pekalongan	18,09	38,38	6,94
Kab. Pemasang	24,68	38,92	9,60
Kab. Tegal	16,49	37,48	6,18
Kab. Brebes	14,39	38,44	5,53
Kota Magelang	-	-	-
Kota Surakarta	1,47	33,33	0,49
Kota Salatiga	4,12	35,46	1,46
Kota Semarang	4,05	36,84	1,49
Kota Pekalongan	5,66	39,81	2,25
Kota Tegal	4,08	40,06	1,63
Jawa Tengah	15,94	37,29	5,95

Lampiran 15. Indeks Ketahanan Pangan menurut Dimensi dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Dimensi			Indeks Ketahanan Pangan	Kriteria
	Persentase Penduduk Miskin	Intensitas Kemiskinan	Indeks Kemiskinan Multidimensi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	93,59	93,24	71,29	86,04	Tinggi
Kab. Banyumas	90,14	89,44	69,68	83,09	Tinggi
Kab. Purbalingga	89,95	85,61	71,48	82,35	Cukup
Kab. Banjarnegara	92,94	88,91	67,87	83,24	Tinggi
Kab. Kebumen	93,15	92,73	68,02	84,63	Tinggi
Kab. Purworejo	98,07	97,64	69,71	88,48	Tinggi
Kab. Wonosobo	92,19	89,57	74,68	85,48	Tinggi
Kab. Magelang	91,60	88,27	69,64	83,17	Tinggi
Kab. Boyolali	94,26	89,62	71,05	84,98	Tinggi
Kab. Klaten	94,49	91,80	70,35	85,55	Tinggi
Kab. Sukoharjo	93,72	94,17	75,77	87,89	Tinggi
Kab. Wonogiri	92,50	92,23	71,51	85,41	Tinggi
Kab. Karanganyar	96,10	95,00	73,97	88,36	Tinggi
Kab. Sragen	96,10	97,08	75,55	89,58	Tinggi
Kab. Grobogan	92,74	92,09	74,02	86,28	Tinggi
Kab. Blora	92,47	91,41	75,45	86,44	Tinggi
Kab. Rembang	89,60	88,58	79,41	85,86	Tinggi
Kab. Pati	93,19	93,58	80,15	88,98	Tinggi
Kab. Kudus	94,77	94,14	75,97	88,29	Tinggi
Kab. Jepara	93,67	88,59	71,86	84,70	Tinggi
Kab. Demak	92,56	91,61	85,21	89,79	Tinggi
Kab. Semarang	93,88	89,32	70,23	84,48	Tinggi
Kab. Temanggung	93,21	88,41	69,41	83,68	Tinggi
Kab. Kendal	91,66	92,21	76,97	86,95	Tinggi
Kab. Batang	93,36	90,26	72,38	85,33	Tinggi
Kab. Pekalongan	95,27	90,15	70,48	85,30	Tinggi
Kab. Pemalang	92,86	92,57	72,37	85,93	Tinggi
Kab. Tegal	95,82	95,29	74,68	88,60	Tinggi
Kab. Brebes	89,80	86,60	79,30	85,24	Tinggi
Kota Magelang	98,90	98,51	88,08	95,16	Tinggi
Kota Surakarta	100,00	100,00	88,66	96,22	Tinggi
Kota Salatiga	95,37	85,13	80,01	86,84	Tinggi
Kota Semarang	95,52	90,07	78,33	87,97	Tinggi
Kota Pekalongan	97,28	97,83	81,64	92,25	Tinggi
Kota Tegal	94,41	90,15	97,57	94,05	Tinggi
Jawa Tengah	93,04	91,27	73,25	85,85	Tinggi

Lampiran 16. Dimensi Ketersediaan Pangan menurut Skor Indikator Aspek Kecukupan Pangan dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Skor Indikator			Skor Aspek Kecukupan Pangan	Dimensi Ketersediaan Pangan
	Kecukupan Persediaan Pangan	Tidak Kekurangan Pangan	Ketakutan Kekurangan Pangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	5,48	2,98	2,78	11,23	93,59
Kab. Banyumas	5,12	2,98	2,71	10,82	90,14
Kab. Purbalingga	5,07	2,96	2,77	10,79	89,95
Kab. Banjarnegara	5,34	2,99	2,82	11,15	92,94
Kab. Kebumen	5,33	2,98	2,86	11,18	93,15
Kab. Purworejo	5,87	3,00	2,91	11,77	98,07
Kab. Wonosobo	5,30	2,95	2,81	11,06	92,19
Kab. Magelang	5,16	2,98	2,85	10,99	91,60
Kab. Boyolali	5,48	2,98	2,86	11,31	94,26
Kab. Klaten	5,48	2,97	2,89	11,34	94,49
Kab. Sukoharjo	5,39	2,95	2,91	11,25	93,72
Kab. Wonogiri	5,52	2,94	2,65	11,10	92,50
Kab. Karanganyar	5,62	2,97	2,94	11,53	96,10
Kab. Sragen	5,77	2,98	2,78	11,53	96,10
Kab. Grobogan	5,42	2,93	2,77	11,13	92,74
Kab. Blora	5,39	2,92	2,79	11,10	92,47
Kab. Rembang	5,16	2,93	2,67	10,75	89,60
Kab. Pati	5,32	2,97	2,89	11,18	93,19
Kab. Kudus	5,57	2,96	2,85	11,37	94,77
Kab. Jepara	5,37	2,94	2,93	11,24	93,67
Kab. Demak	5,34	2,95	2,81	11,11	92,56
Kab. Semarang	5,38	2,98	2,91	11,27	93,88
Kab. Temanggung	5,32	2,98	2,89	11,19	93,21
Kab. Kendal	5,26	2,98	2,76	11,00	91,66
Kab. Batang	5,25	2,99	2,97	11,20	93,36
Kab. Pekalongan	5,56	3,00	2,87	11,43	95,27
Kab. Pemalang	5,39	2,92	2,83	11,14	92,86
Kab. Tegal	5,60	2,98	2,91	11,50	95,82
Kab. Brebes	5,08	2,91	2,79	10,78	89,80
Kota Magelang	5,87	3,00	3,00	11,87	98,90
Kota Surakarta	6,00	3,00	3,00	12,00	100,00
Kota Salatiga	5,52	2,97	2,95	11,44	95,37
Kota Semarang	5,60	2,99	2,88	11,46	95,52
Kota Pekalongan	5,69	2,99	2,99	11,67	97,28
Kota Tegal	5,46	2,99	2,88	11,33	94,41
Jawa Tengah	5,38	2,96	2,82	11,16	93,04

Lampiran 17. Dimensi Keterjangkauan Pangan menurut Skor Indikator Keterjangkauan Fisik, Sosial, Ekonomi dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Skor Indikator			Skor Aspek Keterjangkauan Fisik, Ekonomi dan Sosial	Dimensi Keterjangkauan Pangan
	Pangan Diproduksi di Kecamatan	Tidak Mengalami Kesulitan Menjangkau Lokasi Pembelian	Harga Pembelian Tidak Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	0,97	0,98	0,85	2,80	93,24
Kab. Banyumas	0,96	0,97	0,75	2,68	89,44
Kab. Purbalingga	0,93	0,98	0,66	2,57	85,61
Kab. Banjarnegara	0,87	0,97	0,83	2,67	88,91
Kab. Kebumen	0,94	0,99	0,85	2,78	92,73
Kab. Purworejo	0,96	0,99	0,98	2,93	97,64
Kab. Wonosobo	0,88	0,97	0,84	2,69	89,57
Kab. Magelang	0,91	0,98	0,76	2,65	88,27
Kab. Boyolali	0,77	0,99	0,93	2,69	89,62
Kab. Klaten	0,98	0,99	0,79	2,75	91,80
Kab. Sukoharjo	0,94	0,98	0,91	2,83	94,17
Kab. Wonogiri	0,92	0,98	0,86	2,77	92,23
Kab. Karanganyar	0,92	0,98	0,94	2,85	95,00
Kab. Sragen	0,99	0,98	0,94	2,91	97,08
Kab. Grobogan	0,94	0,98	0,84	2,76	92,09
Kab. Blora	0,93	0,99	0,82	2,74	91,41
Kab. Rembang	0,87	0,98	0,81	2,66	88,58
Kab. Pati	0,95	0,98	0,88	2,81	93,58
Kab. Kudus	0,89	0,98	0,95	2,82	94,14
Kab. Jepara	0,88	0,99	0,80	2,66	88,59
Kab. Demak	0,93	0,97	0,84	2,75	91,61
Kab. Semarang	0,84	0,98	0,86	2,68	89,32
Kab. Temanggung	0,79	0,98	0,88	2,65	88,41
Kab. Kendal	0,94	0,98	0,85	2,77	92,21
Kab. Batang	0,88	0,99	0,84	2,71	90,26
Kab. Pekalongan	0,85	0,97	0,88	2,70	90,15
Kab. Pemasaran	0,96	0,98	0,83	2,78	92,57
Kab. Tegal	0,91	0,99	0,96	2,86	95,29
Kab. Brebes	0,98	0,97	0,65	2,60	86,60
Kota Magelang	0,96	1,00	1,00	2,96	98,51
Kota Surakarta	1,00	1,00	1,00	3,00	100,00
Kota Salatiga	0,74	0,99	0,83	2,55	85,13
Kota Semarang	0,79	0,99	0,93	2,70	90,07
Kota Pekalongan	1,00	1,00	0,93	2,93	97,83
Kota Tegal	0,92	0,97	0,81	2,70	90,15
Jawa Tengah	0,92	0,98	0,84	2,74	91,27

Lampiran 18. Dimensi Pemanfaatan Pangan menurut Aspek dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Aspek		Pemanfaatan Pangan
	Kualitas Air	Kualitas Air	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	99,79	42,80	71,29
Kab. Banyumas	99,21	40,15	69,68
Kab. Purbalingga	99,46	43,50	71,48
Kab. Banjarnegara	99,45	36,29	67,87
Kab. Kebumen	99,63	36,41	68,02
Kab. Purworejo	99,88	39,54	69,71
Kab. Wonosobo	99,76	49,60	74,68
Kab. Magelang	99,89	39,39	69,64
Kab. Boyolali	99,68	42,41	71,05
Kab. Klaten	99,69	41,01	70,35
Kab. Sukoharjo	99,64	51,91	75,77
Kab. Wonogiri	99,73	43,30	71,51
Kab. Karanganyar	99,73	48,21	73,97
Kab. Sragen	99,75	51,35	75,55
Kab. Grobogan	99,83	48,20	74,02
Kab. Blora	99,93	50,98	75,45
Kab. Rembang	99,32	59,50	79,41
Kab. Pati	99,72	60,59	80,15
Kab. Kudus	99,63	52,30	75,97
Kab. Jepara	99,60	44,11	71,86
Kab. Demak	99,69	70,72	85,21
Kab. Semarang	99,86	40,59	70,23
Kab. Temanggung	99,85	38,97	69,41
Kab. Kendal	99,71	54,24	76,97
Kab. Batang	99,85	44,90	72,38
Kab. Pekalongan	99,69	41,26	70,48
Kab. Pemalang	99,41	45,33	72,37
Kab. Tegal	99,46	49,90	74,68
Kab. Brebes	99,82	58,78	79,30
Kota Magelang	100,00	76,16	88,08
Kota Surakarta	100,00	77,31	88,66
Kota Salatiga	99,92	60,10	80,01
Kota Semarang	99,85	56,81	78,33
Kota Pekalongan	100,00	63,29	81,64
Kota Tegal	99,79	95,36	97,57
Jawa Tengah	99,69	46,81	73,25

Lampiran 19. Aspek Kecukupan Asupan Menurut Skor Indikator dan Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2013

Kabupaten/Kota	Skor Indikator		Skor Kecukupan Asupan	Aspek Kecukupan Asupan
	Tidak Ada Balita Kurang Gizi	Tidak ada balita yang Meninggal Karena sakit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	1,00	1,00	2,00	99,79
Kab. Banyumas	0,99	0,99	1,98	99,21
Kab. Purbalingga	0,99	0,99	1,99	99,46
Kab. Banjarnegara	1,00	0,99	1,99	99,45
Kab. Kebumen	1,00	0,99	1,99	99,63
Kab. Purworejo	1,00	1,00	2,00	99,88
Kab. Wonosobo	1,00	1,00	2,00	99,76
Kab. Magelang	1,00	1,00	2,00	99,89
Kab. Boyolali	1,00	1,00	1,99	99,68
Kab. Klaten	1,00	1,00	1,99	99,69
Kab. Sukoharjo	0,99	1,00	1,99	99,64
Kab. Wonogiri	1,00	1,00	1,99	99,73
Kab. Karanganyar	1,00	1,00	1,99	99,73
Kab. Sragen	1,00	1,00	1,99	99,75
Kab. Grobogan	1,00	1,00	2,00	99,83
Kab. Blora	1,00	1,00	2,00	99,93
Kab. Rembang	0,99	0,99	1,99	99,32
Kab. Pati	1,00	1,00	1,99	99,72
Kab. Kudus	1,00	1,00	1,99	99,63
Kab. Jepara	1,00	1,00	1,99	99,60
Kab. Demak	1,00	1,00	1,99	99,69
Kab. Semarang	1,00	1,00	2,00	99,86
Kab. Temanggung	1,00	1,00	2,00	99,85
Kab. Kendal	1,00	1,00	1,99	99,71
Kab. Batang	1,00	1,00	2,00	99,85
Kab. Pekalongan	1,00	1,00	1,99	99,69
Kab. Pemalang	0,99	0,99	1,99	99,41
Kab. Tegal	0,99	1,00	1,99	99,46
Kab. Brebes	1,00	1,00	2,00	99,82
Kota Magelang	1,00	1,00	2,00	100,00
Kota Surakarta	1,00	1,00	2,00	100,00
Kota Salatiga	1,00	1,00	2,00	99,92
Kota Semarang	1,00	1,00	2,00	99,85
Kota Pekalongan	1,00	1,00	2,00	100,00
Kota Tegal	1,00	1,00	2,00	99,79
Jawa Tengah	1,00	1,00	1,99	99,69

**Lampiran 20. Aspek Kualitas Air menurut Skor Indikator dan Kabupaten/Kota,
Jawa Tengah 2013**

Kabupaten/Kota	Skor Indikator		Skor Aspek Kualitas Air	Aspek Kualitas Air
	Sumber Air Minum Utama	Sumber Air Untuk Masak yang Utama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	1,33	1,23	2,57	42,80
Kab. Banyumas	1,23	1,18	2,41	40,15
Kab. Purbalingga	1,33	1,28	2,61	43,50
Kab. Banjarnegara	1,09	1,08	2,18	36,29
Kab. Kebumen	1,11	1,07	2,18	36,41
Kab. Purworejo	1,19	1,18	2,37	39,54
Kab. Wonosobo	1,49	1,49	2,98	49,60
Kab. Magelang	1,19	1,18	2,36	39,39
Kab. Boyolali	1,28	1,26	2,54	42,41
Kab. Klaten	1,25	1,21	2,46	41,01
Kab. Sukoharjo	1,58	1,54	3,11	51,91
Kab. Wonogiri	1,30	1,30	2,60	43,30
Kab. Karanganyar	1,45	1,44	2,89	48,21
Kab. Sragen	1,59	1,49	3,08	51,35
Kab. Grobogan	1,59	1,31	2,89	48,20
Kab. Blora	1,59	1,47	3,06	50,98
Kab. Rembang	1,92	1,65	3,57	59,50
Kab. Pati	1,95	1,69	3,64	60,59
Kab. Kudus	1,68	1,46	3,14	52,30
Kab. Jepara	1,36	1,29	2,65	44,11
Kab. Demak	2,30	1,94	4,24	70,72
Kab. Semarang	1,23	1,21	2,44	40,59
Kab. Temanggung	1,18	1,16	2,34	38,97
Kab. Kendal	1,68	1,57	3,25	54,24
Kab. Batang	1,35	1,35	2,69	44,90
Kab. Pekalongan	1,25	1,22	2,48	41,26
Kab. Pemalang	1,39	1,33	2,72	45,33
Kab. Tegal	1,53	1,47	2,99	49,90
Kab. Brebes	1,82	1,71	3,53	58,78
Kota Magelang	2,28	2,28	4,57	76,16
Kota Surakarta	2,33	2,31	4,64	77,31
Kota Salatiga	1,81	1,80	3,61	60,10
Kota Semarang	1,74	1,67	3,41	56,81
Kota Pekalongan	1,92	1,88	3,80	63,29
Kota Tegal	2,89	2,83	5,72	95,36
Jawa Tengah	1,45	1,36	2,81	46,81

CATATAN TEKNIS



<http://jateng.bps.go.id>

Catatan Teknis1. INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI (IKM)

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (*deprivation*) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dimensi pendidikan dan kesehatan terdiri dari 2 indikator, sementara dimensi standar hidup terdiri dari 6 indikator. Setiap rumah tangga yang mengalami kekurangan (*deprivation*) diberi skor 1 dan yang tidak mengalami kekurangan diberi skor 0. Jumlah dari skor setiap rumah tanggamenunjukkan kekurangan multidimensi rumah tangga.

Tabel 1. Indikator Penyusun IKM yang Diberi Skor 1 (Menunjukkan Kekurangan)

Dimensi	Indikator
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> o tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP)* o memiliki minimal satuanak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> o memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi o memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia .
Standar hidup	<ul style="list-style-type: none"> o tidak memiliki listrik o tidak memiliki aksesair minum bersih o tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai o menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar o memiliki rumah dengan lantai tanah o tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor , radio , kulkas , telepon, atau televisi .

*Menyesuaikan kondisi di Indonesia

Setiap orang diberi skor sesuai dengan kekurangan rumah tangganya menurut 10 indikator yang membentuknya.Skor maksimum adalah 100 persen sehingga masing-masing dimensi memiliki penimbang yang sama, yaitu 33,3 persen. Dimensi pendidikan dan kesehatanmasing-masing memiliki dua indikator, sehingga setiap komponen memiliki penimbang sebesar 16,7 persen. Sementara dimensi standar hidup memiliki 6 indikatorsehingga setiap indikator memiliki penimbang sebesar 5,6 persen .

Untuk mengidentifikasi kemiskinan rumah tanggasecara multidimensi, skor ke 10 komponen indikator untuk setiap rumah tangga dijumlahkan. Sebuah *cut off point(c)* sebesar 33,3 persen yang setaradengan sepertiga dari indikator tertimbang digunakan untuk membedakanantara RT yang miskin dan tidak miskin secara multidimensi.

- Jika $c \geq 33\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap miskin multidimensi.
- o Jika $c \geq 50\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap sangat miskin multidimensi
- Jika $c < 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT tidak dianggap miskin multidimensi
- o Jika $20\% \leq c < 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap rentan miskin multidimensi

Nilai IKM merupakan hasil perkalian antara multidimensi *Headcount Ratio* dan Intensitas atau luasnya kemiskinan.

Headcount ratio, H, adalah proporsi penduduk yang miskin :

$$H = \frac{q}{n}$$

dimana q adalah jumlah orang yang multidimensimiskin

n adalah total populasi.

Intensitas kemiskinan, A , mencerminkan proporsi tertimbang dari indikator, atau rata-rata kekurangan dari orang-orang miskin. Untuk rumah tangga miskin saja, nilai kekurangandijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total orang miskin:

$$A = \frac{\sum_1^q c}{q}$$

dimana q adalah jumlah orang yang multidimensimiskin

c adalah skor kekurangan masing-masing RT .

IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu.

$$MPI = H.A = \frac{\sum_1^q c}{n}$$

Menggambarkan rata-rata kekurangan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang dialami penduduk.

Contoh:

Indikator	Rumah tangga				Weights
	1	2	3	4	
Jumlah Anggota Rumah Tangga	4	7	5	4	
Pendidikan					
• tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun	0	1	0	1	16,7%
• memiliki setidaknya satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah	0	1	0	0	16,7%
Kesehatan					
o memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi	0	0	1	0	16,7%
o memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia .	1	1	1	1	16,7%
Kondisi perumahan					
o tidak memiliki listrik	0	1	1	1	5,6%
o tidak memiliki akses air minum bersih	0	0	1	0	5,6%
	0	0	0	0	5,6%

Indikator	Rumah tangga				Weights
	1	2	3	4	
o tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai	1	1	1	1	5,6%
o menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar	0	1	0	1	5,6%
o memiliki rumah dengan lantai tanah					
o tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor , radio , kulkas , telepon, atau televisi .					
Skor kekurangan RT (c=jumlah tertimbang dari skor tertimbang RT)	22,2	72,7	38,9	50	
Apakah RT miskin ? (c> 33,3 %)	tidak	ya	ya	ya	

Headcount rasio (H) =

$$\left(\frac{7+5+4}{4+7+5+4}\right) = 0,8$$

(80 persen dari penduduk tinggal dalam RT miskin)

Intensitas kemiskinan (A) =

$$\frac{\left(\frac{7,27}{10} \times 7\right) + \left(\frac{3,89}{10} \times 5\right) + \left(\frac{5}{10} \times 4\right)}{(7+5+4)} = 0,5625$$

(rata-rata orang miskin mengalami kekurangan multidimensi sebesar 56 persen dari dilihat dari 10 indikator IKM).

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) = $0,8 \times 0,5625 = 0,450$

(rata-rata penduduk mengalami kekurangan multidimensi sebesar 45 persen dari dilihat dari 10 indikator IKM).

Catatan Teknis 2. KETAHANAN PANGAN

Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah dilakukan pendekatan dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, Keterjangkauan/ Akses pangan, dan Pemanfaatan pangan. Keterbatasan data pada survey ini menyebabkan Indeks Ketahanan Pangan tidak bisa dilakukan tetapi didekati dengan melakukan scoring dari jawaban-jawaban pada kuesioner yang juga dikelompokkan menjadi tiga dimensi. Karena keterbatasan data tiap dimensi hanya diwakili 1 aspek masing-masing yaitu kecukupan pangan, keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial dan 2 aspek untuk dimensi pemanfaatan pangan diantaranya yaitu kecukupan asupan serta kualitas air.

Tabel 2. Dimensi Ketahanan Pangan

Dimensi	Aspek	Indikator	Skor ^{*)}
Ketersediaan pangan	Kecukupan pangan	Kecukupan persediaan pangan	0-6
		Tidak kekurangan pangan	0-3
		Ketakutan kekurangan pangan	0-3
Keterjangkauan/akses pangan	Keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial	Pangan diproduksi di kecamatan	0-1
		Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian	0-1
		Harga pembelian tidak tinggi	0-1
Pemanfaatan pangan	Kecukupan asupan	Tidak ada balita yang kurang gizi	0-1
		Tidak ada balita yang meninggal karena sakit	0-1
	Kualitas air	Sumber air minum utama	0-3
		Sumber air untuk masak yang utama	0-3

^{*)} Pembentukan skor dapat dilihat pada lampiran.

Pemberian skor untuk masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut:

I. Dimensi Ketersediaan pangan

Pengertian ketersediaan pangan dalam UU No.18 tahun 2012 adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek kecukupan pangan dilihat dari tiga indikator masing-masing kecukupan persediaan pangan, tidak kekurangan pangan, dan ketakutan kekurangan pangan.

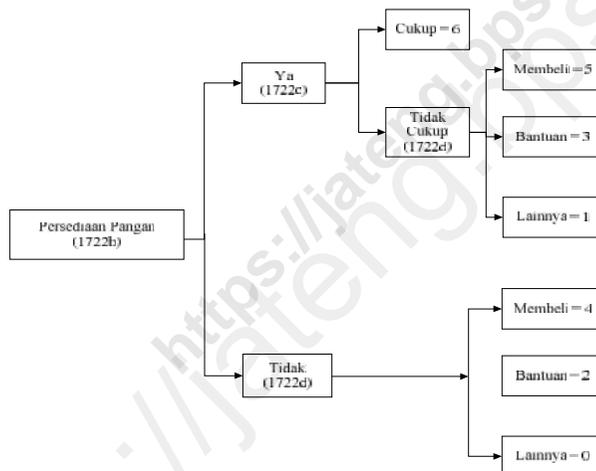
➤ Aspek Kecukupan pangan

1. Indikator Kecukupan persediaan pangan

Kecukupan persediaan pangan yang dimaksud adalah apakah kebutuhan akan pangan selama setahun yang lalu telah tercukupi dalam rumah tangga tersebut.

Dalam kuesioner SPP 2013 indikator ini didapatkan dari pertanyaan Rincian 1722b, Rincian 1722c dan Rincian 1722d.

- Skor 6 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan cukup selama setahun yang lalu atau rumah tangga tidak mengalami *shortage* (kekurangan).
- Skor 5 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan dari membeli.
- Skor 4 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari membeli.
- Skor 3 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan bantuan.
- Skor 2 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari bantuan.
- Skor 1 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan dari lainnya.
- Skor 0 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari lainnya.

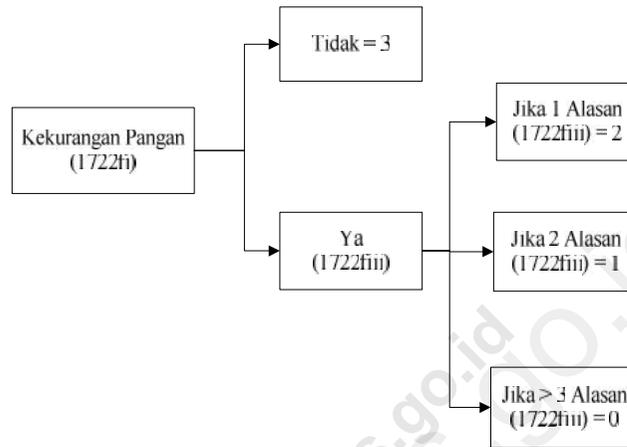


2. Indikator Tidak kekurangan pangan

Kekurangan pangan merupakan kondisi tidak mampu mengkonsumsi makanan sesuai kebiasaannya atau tidak mampu mempertahankan pola makan normal setiap saat selama periode setahun yang lalu dan merubah pola makan secara terpaksa seperti melewati makan, makan lebih sedikit, makan lebih murah, dan mungkin makanan kurang bergizi.

Pengukuran kekurangan makanan adalah dengan melihat Rincian 1722fi, Skor 3 diberikan apabila jawaban adalah tidak kekurangan pangan. Sedangkan apabila jawabannya ya diberi skor berdasarkan alasan/penyebab kekurangan pangan. Penyebab kekurangan pangan diartikan sebagai kejadian luar biasa seperti bencana alam, tanaman rusak/mati, kurangnya lahan, tidak ada pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit/cedera/tua, kurangnya modal, terlalu banyaknya anggota keluarga yang ditanggung, dan lain-lain. Penyebab kekurangan pangan dalam kuesioner ditunjukkan pada rincian 1722 fiii yang terbagi menjadi empat pilihan yaitu

pendapatan rendah, lokasi terpencil, tidak tersedia, dan lainnya. Jika hanya memilih satu alasan maka diberi skor 2, skor 1 untuk 2 alasan, dan skor 0 untuk alasan lebih dari 3. Skor yang besar menunjukkan tidak adanya kekurangan pangan.

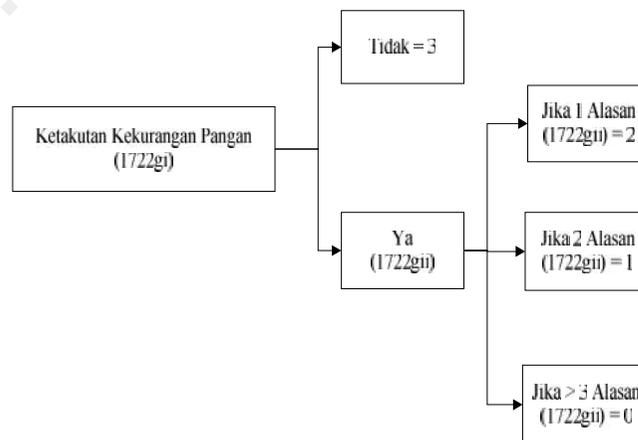


3. Indikator Ketakutan kekurangan pangan

Indikator ini mengukur rasa ketakutan akan kekurangan pangan untuk satu tahun ke depan dan alasan ketakutan akan kekurangan pangan dilihat dari rincian 1722gi dan 1722gii.

Ketakutan akan kekurangan pangan diartikan sebagai rasa takut terhadap situasi kekurangan makanan selama periode setahun yang akan datang karena ancaman bencana alam, rusak/matinya tanaman, kehilangan pekerjaan, atau faktor lainnya.

- Skor yang besar menunjukkan tidak adanya ketakutan kekurangan pangan.
- Skor 3 diberikan jika rumah tangga tidak ketakutan kekurangan pangan
- Skor 2 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 1 penyebab
- Skor 1 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 2 penyebab
- Skor 0 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 3 penyebab



II. Dimensi Keterjangkauan/akses pangan

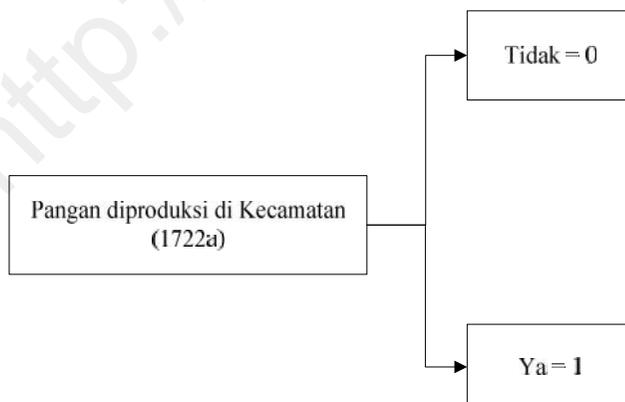
Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas.

Akses pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh sumber penghidupan rumah tangga tersebut. Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – penghasilan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan pangan. Dimensi keterjangkauan terdiri dari satu aspek yaitu aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek ini dibentuk oleh tiga indikator yaitu Indikator Pangan yang diproduksi di Kecamatan, Indikator Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian, dan Indikator Harga pembelian tidak tinggi.

➤ Aspek Keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial

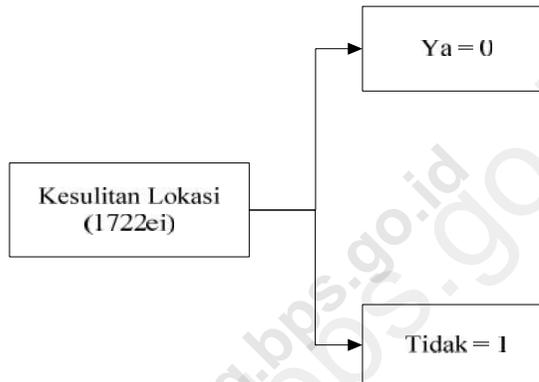
1. Indikator Pangan diproduksi di kecamatan

Pangan yang sebagian besar diproduksi di kecamatan menunjukkan kemudahan akses memperoleh pangan. Jika sebagian besar pangan diproduksi di kecamatan maka akan memudahkan orang-orang sekitar dalam mencukupi kebutuhannya. Tempat tinggal yang dekat dengan tempat produksi akan memudahkan mendapatkan pangan serta persediaan pangan akan terus ada karena mudahnya akses yang dapat dijangkau, tanpa perlu mencari ke tempat yang lebih jauh. Jika pangan diproduksi di kecamatan atau jika jawaban pada rincian 1722a adalah Ya maka skor 1 akan diberikan, dan 0 jika jawaban Tidak yang berarti pangan tidak diproduksi di kecamatan.



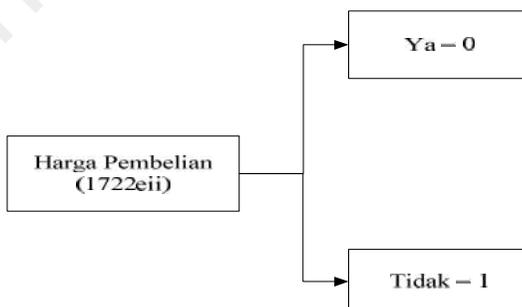
2. Indikator Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian

Ketersediaan yang cukup di suatu wilayah belum tentu menggambarkan wilayah tersebut bebas kerawanan pangan. Aksesibilitas untuk mendapatkan pangan yang sulit bisa menjadi penyebab kerawanan pangan. Kemudahan akses akan memudahkan perolehan pangan yang dibutuhkan. Ada tidaknya kesulitan menjangkau lokasi pembelian pangan diukur dengan melihat rincian 1722ei. Jika tidak terdapat kesulitan maka diberi skor 1 dan jika terdapat kesulitan maka diberi skor 0.



3. Indikator Harga pembelian tidak tinggi

Indikator ketiga yang mengukur dimensi keterjangkauan/akses pangan adalah harga pembelian. Ketersediaan pangan yang cukup, lokasi pembelian pangan yang mudah dijangkau akan tetapi harga pembelian pangan tinggi dapat menyebabkan kerawanan pangan. Harga pembelian ini menunjukkan keterjangkauan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang baik akan memudahkan mendapatkan pangan meskipun dengan harga yang tinggi. Berbeda dengan rumah tangga yang kondisinya ekonominya buruk atau berkategori miskin. Harga yang terlalu tinggi akan menyulitkan rumah tangga untuk membeli kebutuhan hidupnya baik sandang maupun pangan. Indikator ini diwakili dalam kuesioner pada rincian 1722eii. Skor 1 menunjukkan harga pembelian yang tidak tinggi dan skor 0 jika harga pembelian tinggi.



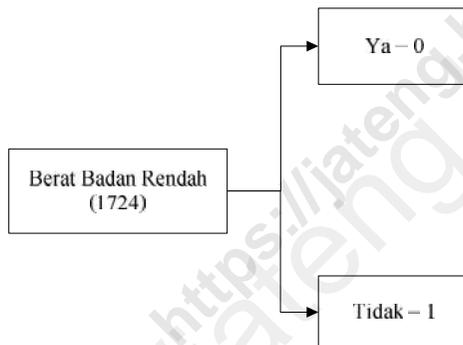
III. Dimensi Pemanfaatan pangan

Pemanfaatan pangan meliputi penggunaan pangan oleh rumah tangga serta meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air serta meliputi status kesehatan anggota rumah tangga. Dimensi pemanfaatan pangan diwakili dua aspek yaitu kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan yang diukur dengan dua indikator yaitu tidak ada balita yang kurang gizi dan tidak ada balita yang meninggal karena sakit. Aspek yang kedua adalah kualitas air yang diukur oleh dua indikator yaitu sumber air minum utama dan sumber air masak utama.

➤ Aspek Kecukupan asupan

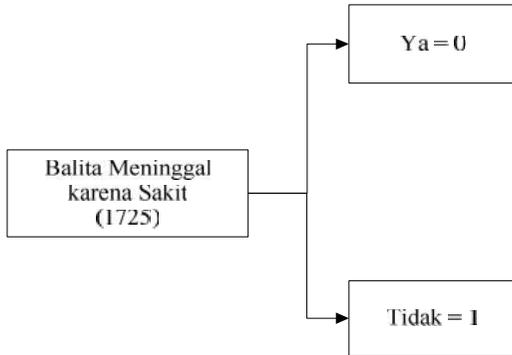
1. Indikator Tidak ada balita yang kurang gizi

Status kesehatan rumah tangga dapat dilihat dengan ada tidaknya balita yang kekurangan gizi atau berat badan yang rendah. Kurangnya gizi pada balita mencerminkan asupan yang kurang pada rumah tangga tersebut. Berat badan balita di bawah normal dapat diketahui dari Kartu Menuju Sehat (KMS) dari Posyandu yaitu berat badan di bawah garis merah. Pertanyaan mengenai balita yang kurang gizi terdapat pada rincian 1724. Skor 1 diberikan jika tidak terdapat balita yang memiliki berat badan rendah sedangkan skor 0 jika terdapat balita dengan berat badan rendah.



2. Indikator Tidak ada balita yang meninggal karena sakit

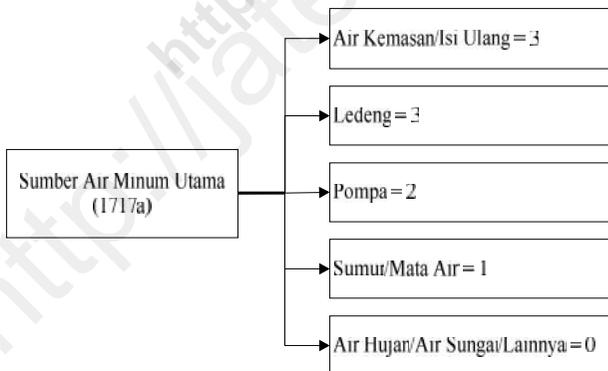
Indikator lain yang mengukur kurangnya asupan adalah ada tidaknya balita yang meninggal karena sakit. Seperti halnya indikator pertama yaitu balita dengan berat badan rendah, indikator ini mencerminkan kesehatan rumah tangga, yang terwakili dari kuesioner rincian 1725. Skor 1 jika tidak terdapat balita yang meninggal karena sakit. Skor 0 jika terdapat balita yang meninggal karena sakit.



➤ **Aspek Kualitas air**

1. Indikator Sumber air minum utama

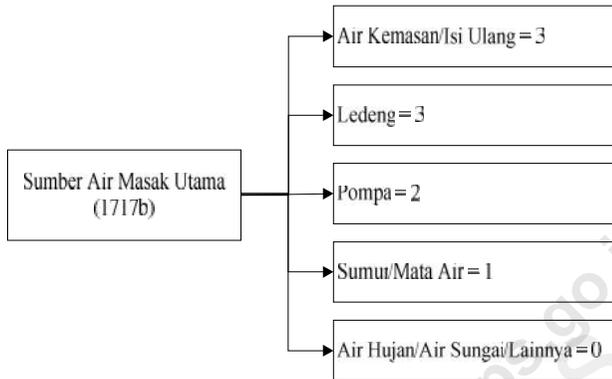
Selain kecukupan asupan, aspek lain yang mewakili dimensi pemanfaatan pangan adalah kualitas air. Salah satu indikator yang mengukur kualitas air yaitu sumber air utama. Dalam hal ini dilihat pada rincian 1717a yang terdiri dari 8 pilihan jawaban diantaranya adalah Air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa, sumur, mata air, air sungai, air hujan dan lainnya. Pemberian skor pada indikator ini dengan membagi 8 pilihan menjadi 5. Skor 3 diberikan jika sumber air minum utama adalah air kemasan/isi ulang atau ledeng, skor 2 untuk pilihan isian pompa, skor 1 untuk sumur atau mata air dan tidak diberikan skor (0) untuk pilihan air hujan, air sungai atau lainnya. Semakin tinggi skor berarti kualitas airnya semakin baik.



2. Indikator Sumber air untuk memasak utama

Indikator kedua yang mengukur aspek kualitas air adalah sumber air masak utama. Pemanfaatan air untuk masak menggambarkan dimensi pemanfaatan pangan rumah tangga. Air yang digunakan untuk memasak baik atau tidaknya akan memengaruhi kesehatan bagi anggota rumah tangga. Semakin baik kualitas air yang dimanfaatkan untuk memasak akan menghindarkan anggota rumah tangga mengalami kesehatan yang buruk. Dalam hal ini dilihat pada rincian 1717b yang terdiri dari 8 pilihan jawaban diantaranya adalah Air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa, sumur, mata air,

air sungai, air hujan dan lainnya. Pemberian skor pada indikator ini dengan membagi 8 pilihan menjadi 5 seperti pada sumber air minum utama. Skor 3 diberikan jika sumber air masak utama adalah air kemasan/isi ulang atau ledeng, skor 2 untuk pilihan isian pompa, skor 1 untuk sumur atau mata air dan tidak diberikan skor (0) untuk pilihan air hujan, air sungai atau lainnya. Semakin tinggi skor berarti kualitas airnya semakin baik.



Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah

Kemungkinan Skor:

No.	Dimensi	Total Skor	
		Min	Maks
1.	Ketersediaan Pangan	0	12
2.	Keterjangkauan/Akses Pangan	0	3
3.	Pemanfaatan Pangan		
	Aspek kecukupan asupan	0	2
	Aspek kualitas air	0	8

Rata-rata skor untuk masing-masing dimensi disimbolkan dengan \bar{X}_i , dimana i menunjukkan dimensi,

1. Rata-rata skor dimensi Ketersediaan pangan (\bar{X}_1)
Terdiri dari satu aspek yaitu kecukupan pangan.

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{11kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_1 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{11kl}}{n} \right)}{12} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 1$ (dimensi ketersediaan pangan)

$j = 1$ (aspek kecukupan pangan)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk aspek kecukupan pangan)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

2. Rata-rata skor dimensi Keterjangkauan/akses pangan (X_2)

Terdiri dari satu aspek yaitu keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{21kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_2 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{21kl}}{n} \right)}{3} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 2$ (dimensi Keterjangkauan/akses pangan)

$j = 1$ (aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

3. Rata-rata skor dimensi Pemanfaatan pangan (X_3)

Terdiri dari dua aspek, yaitu

- Aspek Kecukupan asupan (X_{31})

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_{31} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} \right)}{2} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 3$ (dimensi Pemanfaatan pangan)

$j = 1$ (aspek kecukupan asupan)

$k = 1, 2$ (indikator untuk aspek kecukupan asupan)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

- Aspek Kualitas air

$$\bar{X}_{32} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_{32} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} \right)}{6} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 3$ (dimensi Pemanfaatan pangan)

$j = 2$ (aspek kualitas air)

$k = 1, 2$ (indikator untuk aspek kualitas air)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

Sehingga, rata-rata skor untuk dimensi ketahanan pangan, yaitu:

$$\bar{X}_3 = \frac{(\bar{X}_{31} + \bar{X}_{32})}{2}$$

Jadi, **Indeks Ketahanan Pangan**, dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3}$$

Dimana rentang nilainya $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0\% \leq \bar{X} \leq 100\%$

Untuk melihat apakah rata-rata rumah tangga di suatu wilayah ketahanan pangannya baik atau tidak maka Indeks Ketahanan Pangan masing-masing wilayah akan dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan Nasional. Kategori Indeks Ketahanan Pangan Nasional akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- Kurang Tahan Pangan jika $\bar{X} < (\mu - 1,0\sigma)$
- Cukup Tahan Pangan jika $(\mu - 1,0\sigma) < \bar{X} < (\mu + 1,0\sigma)$
- Tahan Pangan Tinggi jika $\bar{X} \geq (\mu + 1,0\sigma)$

Dimana \bar{X} = Indeks Ketahanan Pangan Wilayah

μ = Indeks Ketahanan Pangan Nasional

σ = Standar deviasi Indeks Ketahanan Pangan Nasional

Contoh:

Dimensi	Aspek dan Indikator	Rumah tangga				Skor Indikator	Skor Aspek	Skor Dimensi
		1	2	3	4			
Ketersediaan Pangan	Kecukupan Pangan						24	24
	• Kecukupan persediaan pangan	4	6	2	3	15		
	• Tidak kekurangan pangan	3	3	0	0	6		
	• Ketakutan kekurangan pangan	1	2	0	0	3		
Keterjangkauan/Akses Pangan	Keterjangkauan Fisik, Ekonomi, Sosial						8	8
	○ Pangan diproduksi di kecamatan	1	1	0	1	3		
	○ Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian	1	1	0	1	3		
	○ Harga pembelian tidak tinggi	1	1	0	0	2		

Pemanfaatan Pangan	Kecukupan Asupan						6	24
	o Tidak ada balita yang kurang gizi	1	1	0	1	3		
	o Tidak ada balita yang meninggal karena sakit	1	1	1	0	3		
	Kecukupan Asupan						18	
	o Sumber air minum utama	3	3	1	2	9		
	o Sumber air untuk masak yang utama	3	3	1	2	9		

- 1) Rata-rata skor dimensi ketersediaan pangan:

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{1kl}}{n} = \frac{(15+6+3)}{4} = 6$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_1 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{1kl}}{n} \right)}{12} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(15+6+3)}{4} \right)}{12} \times 100\% = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

- 2) Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan:

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{2kl}}{n} = \frac{(3+3+2)}{4} = 2$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_2 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{2kl}}{n} \right)}{3} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(3+3+2)}{4} \right)}{3} \times 100\% = \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$$

3) Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan:

a. Aspek Kecukupan asupan:

$$\bar{X}_{31} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} = \frac{(3+3)}{4} = 1,5$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_{31} = \left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} \right) \times 100\% = \left(\frac{(3+3)/4}{2} \right) \times 100\% = \frac{1,5}{2} \times 100\% = 75\%$$

b. Aspek Kualitas air:

$$\bar{X}_{32} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} = \frac{(9+9)}{4} = 4,5$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_{32} = \left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} \right) \times 100\% = \left(\frac{(9+9)/4}{6} \right) \times 100\% = \frac{4,5}{6} \times 100\% = 75\%$$

Sehingga rata-rata skor untuk dimensi pemanfaatan pangan:

$$\bar{X}_3 = \frac{(\bar{X}_{31} + \bar{X}_{32})}{2} = \frac{(75\% + 75\%)}{2} = 75\%$$

Jadi, Indeks ketahanan pangannya adalah

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3} = \frac{(50\% + 66,67\% + 75\%)}{3} = 63,89\%$$

Untuk kategori ketahanan pangan maka dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan RTUP

Ketahanan pangan suatu wilayah belum tentu menggambarkan ketahanan pangan rumah tangganya. Oleh karena itu akan dilihat juga bagaimana ketahanan pangan pada level yang paling kecil (rumah tangga).

1. Dimensi ketersediaan pangan
Rata-rata skor dimensi ketersediaan pangan

$$\bar{y}_{1i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{1k}}{12}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk setiap dimensi)

2. Dimensi keterjangkauan/akses pangan
Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan

$$\bar{y}_{2i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{2k}}{3}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk setiap dimensi)

3. Dimensi pemanfaatan pangan
Rata-rata skor aspek kecukupan pangan

$$\bar{y}_{31i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{31k}}{2}$$

Rata-rata skor aspek kecukupan pangan

$$\bar{y}_{32i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{32k}}{2}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2$ (indikator untuk setiap aspek)

Rata-rata skor dimensi pemanfaatan pangan

$$\bar{y}_{3i} = \frac{\bar{y}_{31i} + \bar{y}_{32i}}{2}$$

➤ Rata-rata skor ketahanan pangan rumah tangga:

$$\bar{y}_i = \frac{\bar{y}_{1i} + \bar{y}_{2i} + \bar{y}_{3i}}{3}$$

Contoh :

Dimensi	Aspek dan Indikator	Rumah tangga				Skor Max dimensi
		1	2	3	4	
Ketersediaan Pangan	Kecukupan Pangan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan persediaan pangan • Tidak kekurangan pangan • Ketakutan kekurangan pangan 	4 3	6 3	2 0	3 0	12
		1	2	0	0	
	Total skor	8	11	2	3	
	Rata-rata skor dimensi kecukupan pangan	8/12	11/12	2/12	3/12	
Keterjangkauan /Akses Pangan	Keterjangkauan Fisik, Ekonomi, Sosial					
	<ul style="list-style-type: none"> o Pangan diproduksi di kecamatan o Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian o Harga pembelian tidak tinggi 	1 1	1 1	0 0	1 1	3
		1	1	0	0	
	Total skor	3	3	0	2	
	Rata-rata skor dimensi keterjangkauan pangan	3/3	3/3	0/3	2/3	
Pemanfaatan Pangan	Kecukupan Asupan					
	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada balita yang kurang gizi o Tidak ada balita yang meninggal karena sakit 	1 1	1 1	0 1	1 0	2
	Total Skor	2	2	1	1	
	Rata-rata skor aspek kecukupan pangan	2/2	2/2	1/2	1/2	
	Kecukupan Asupan					
<ul style="list-style-type: none"> o Sumber air minum utama o Sumber air untuk masak yang utama 	3 3	3 3	1 1	2 2	8	
Total Skor	6	6	2	4		
Rata-rata skor aspek kecukupan pangan	6/8	6/8	2/8	4/8		
	Rata-rata skor dimensi pemanfaatan pangan	$\frac{1,75}{2}$	$\frac{1,75}{2}$	$\frac{0,75}{2}$	$\frac{1}{2}$	
Skor Ketahanan Pangan Rumah Tangga		0,847	0,931	0,181	0,472	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp : (024) 8412802, 8412804 Fax : (024) 8311195
Homepage : <http://jateng.bps.go.id>
E-mail : bps3300@bps.go.id

ISBN 978-602-0916-25-5



9 786020 916255